

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL

**Pendekatan Inklusif untuk Ketahanan
Sosial dan Ekonomi Lokal**

Disusun oleh:

Novi Diana Badrut Tamami
Priskilah Febi Widya Ningrum
Erlinda Yurisinthae
Irfan Zikri
Helda Ibrahim
Moh Muchlis Djibrán
Lu'lu'a Ulyn Ni'mah
Nur Saudah Al Arifa Dewi
Damara Dinda N. Zebua
Yuwinti Nearti



PT GHANI PRESS GROUP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL

Pendekatan Inklusif untuk Ketahanan Sosial dan Ekonomi Lokal

Penulis:

Novi Diana Badrut Tamami; Priskilah Febi Widya Ningrum; Erlinda Yurisinthae; Irfan Zikri; Helda Ibrahim; Moh Muchlis Djibran; Lu'lu'a Ulyn Ni'mah; Nur Saudah Al Arifa Dewi; Damara Dinda N. Zebua; Yuwinti Nearti

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Rizki Baehtiar Afandi, S.Kom

Editor Naskah:

Dr. Esther Kembauw, SP.,M.Si

14 x 21 cm, v-171

ISBN: 978-634-05-1754-5

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Alamat:

**Bumi Permata Raya Blok 8 No. 16 Tanjung, Lamongan
HP. 0896-5710-0105**

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital: Pendekatan Inklusif untuk Ketahanan Sosial dan Ekonomi Lokal” dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan bentuk kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai pemberdayaan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial yang menyertainya.

Era transformasi digital telah menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, memperluas akses terhadap sumber daya, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif. Namun demikian, manfaat transformasi digital hanya dapat dirasakan secara optimal apabila didukung oleh literasi digital yang memadai, akses yang setara, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marjinal.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan praktik pemberdayaan masyarakat berbasis digital. Pembahasan dimulai dari landasan teoritis pemberdayaan masyarakat, dinamika transformasi digital, penguatan literasi digital, hingga berbagai strategi dan model pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya inklusivitas, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi pemberdayaan masyarakat, aparatur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan masyarakat dan pembangunan berbasis digital. Melalui buku ini, pembaca diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan perspektif kritis dan aplikatif dalam merancang serta mengimplementasikan program pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Bangkalan, Mei 2026

Penulis

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	
KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	1
BAB 2	
ERA KONEKTIVITAS DIGITAL DAN DINAMIKA PEMBERDAYAAN BARU	17
BAB 3	
LITERASI DIGITAL SEBAGAI FONDASI KEKUATAN MASYARAKAT	31
BAB 4	
KETIMPANGAN DIGITAL DAN INKLUSI SOSIAL	55
BAB 5	
EKONOMI DIGITAL DAN KEKUATAN EKONOMI KOMUNITAS	87
BAB 6	
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN INOVASI KOMUNITAS	99
BAB 7	
MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA MOBILISASI SOSIAL	109
BAB 8	
RANTAI PASOK KOMUNITAS DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN LOKAL	117

BAB 9	
PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF UNTUK	
GENERASI DIGITAL.....	133
BAB 10	
STRATEGI IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIGITAL	145
BIODATA PENULIS	167

BAB 1

KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep dasar pemberdayaan masyarakat serta perbedaannya dengan pendekatan pembangunan.
- b. Menjelaskan peran berbagai aktor dan pentingnya prinsip inklusivitas dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- c. Menganalisis pemberdayaan sebagai proses sosial dan politik yang bertujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.

➤ **Pengertian dan Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengambil keputusan, berpartisipasi aktif, serta mandiri dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa akar dari ketimpangan dan kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep sentral dalam pengembangan komunitas yang berevolusi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merujuk pada proses yang memungkinkan individu dan komunitas untuk meningkatkan kendali atas kehidupan mereka dan

kapasitas untuk bertindak secara kolektif guna mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan (Safitriani, dkk, 2024). Terminologi ini melibatkan transfer kekuasaan dari pihak eksternal kepada masyarakat itu sendiri, sehingga mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, mengartikulasikan aspirasi, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan sekadar intervensi teknis, melainkan transformasi sosial yang melibatkan dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemberdayaan bersifat multidimensi, meliputi pengembangan kapasitas individu maupun kolektif dalam konteks sosio-ekologis. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa aspek, sebagaimana dirumuskan oleh Sriati, (2022):

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- b. Transformasi relasi kekuasaan yang memungkinkan partisipasi penuh dalam pengambilan Keputusan.
- c. Penguatan modal sosial dan kapasitas kolektif.
- d. Peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan publik, dan kesempatan ekonomi.
- e. Mendorong keberlanjutan dalam pembangunan local.

Sriati (2022) menambahkan bahwa dalam era digital, pemberdayaan masyarakat juga mencakup aspek literasi digital dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk mobilisasi sumber daya dan pengetahuan. Pemberdayaan sejati harus menjawab tantangan kekuasaan struktural dan ketimpangan sistemik, bukan sekadar intervensi jangka pendek.

Tujuan pemberdayaan mencakup peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain pendidikan (*better education*), akses terhadap sumber daya (*better accessibility*), tindakan kolektif (*better action*),

kelembagaan yang lebih baik (*better institution*), usaha yang maju (*better business*), kecukupan pendapatan (*better income*), lingkungan yang lebih baik (*better environment*), kualitas hidup memadai (*better living*), dan terbentuknya komunitas mandiri (*better community*) (Safitriani, 2024).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep dan praktik, dengan demikian, berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat agar mereka memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan untuk menentukan pilihan hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui proses ini, diharapkan tercipta masyarakat yang berdikari, memiliki ketahanan, dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan kontemporer.

Pemberdayaan masyarakat diimplementasikan melalui berbagai pendekatan yang berkembang seiring dengan evolusi pemahaman tentang pembangunan sosial.

- a. Pendekatan Partisipatif: Menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program, dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menjadi subjek, bukan objek pembangunan.
- b. Pendekatan Berbasis Aset: Berfokus pada identifikasi dan mobilisasi aset komunitas (keterampilan, pengetahuan lokal, sumber daya alam, modal sosial) sebagai titik awal pemberdayaan.
- c. Pendekatan Transformatif: Berupaya mengubah struktur kekuasaan dan relasi sosial yang melanggengkan ketidakadilan dan marginalisasi.
- d. Pendekatan Ekosistem: Memandang pemberdayaan dalam konteks keterhubungan sistem sosial, ekonomi, dan ekologis, yang menekankan pentingnya

mempertimbangkan dimensi keberlanjutan lingkungan dalam upaya pemberdayaan.

- e. Pendekatan Berbasis Hak: Mendasarkan pemberdayaan pada pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Rahmatullah dkk, (2021) berpendapat bahwa pendekatan ini menjadikan pemberdayaan sebagai kewajiban moral dan legal, bukan sekadar bantuan sukarela.

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi praktik pemberdayaan yang efektif, sebagaimana dirumuskan oleh Chasani (2023):

- a. Keadilan dan Inklusivitas: Memastikan semua anggota masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat.
- b. Keberlanjutan: Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mempertahankan hasil pemberdayaan setelah dukungan eksternal berakhir.
- c. Kontekstualisasi: Mengadaptasi strategi pemberdayaan sesuai dengan kondisi lokal, mempertimbangkan nilai budaya, norma sosial, dan struktur masyarakat setempat.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjalankan proses pemberdayaan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
- e. Pembelajaran Berkesinambungan: Menjadikan refleksi kritis dan pembelajaran dari pengalaman sebagai bagian integral dari proses pemberdayaan.
- f. Kemitraan setara antara fasilitator eksternal dan komunitas: menekankan pentingnya menghormati pengetahuan lokal sambil memfasilitasi akses ke pengetahuan dan keterampilan baru. Prinsip keberdayaan dari dalam (endogenous empowerment)

yang mengakui bahwa perubahan sejati harus berakar dari aspirasi dan potensi internal masyarakat sendiri.

Prinsip dasar pemberdayaan mencakup kesetaraan, partisipasi aktif, kemandirian (swadaya), keberlanjutan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program (Sriati, 2022). Pendekatan ini tidak hanya menysasar hasil, melainkan juga proses yang membentuk masyarakat sadar, kritis, dan bertanggung jawab terhadap perubahan sosialnya.

➤ Perbedaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Pembangunan secara konvensional sering bersifat *top-down* dan fokus pada pertumbuhan ekonomi serta modernisasi infrastruktur. Sementara itu, pemberdayaan bersifat *bottom-up*, menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang aktif, sadar, dan partisipatif (Sriati, 2022). Pemberdayaan memiliki orientasi sosial dan politis yang lebih kuat, yaitu memperkuat posisi tawar masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Pembangunan berfokus pada hasil, sedangkan pemberdayaan menekankan proses yang melibatkan masyarakat sejak dari perencanaan hingga evaluasi (Chasani, 2023). Rahmatullah dkk. (2023) mengidentifikasi beberapa perbedaan kunci antara pembangunan konvensional dan pemberdayaan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. 1. Perbedaan Kunci Pembangunan dan Pemberdayaan

Aspek	Pembangunan Konvensional	Pemberdayaan
Arah proses	Top-down, terencana secara terpusat	Bottom-up, responsif terhadap konteks lokal
Peran masyarakat	Penerima manfaat, objek pembangunan	Agen perubahan, subjek aktif
Fokus utama	Hasil fisik dan pertumbuhan ekonomi	Proses sosial dan penguatan kapasitas
Ukuran keberhasilan	Indikator kuantitatif standar	Perubahan kualitatif dalam relasi kekuasaan
Jangka waktu	Tertarget pada periode tertentu	Proses berkelanjutan dan jangka panjang

Sumber: Rahmatullah dkk, (2025)

Pembangunan konvensional sering berfokus pada defisit dan kebutuhan, sementara pemberdayaan menekankan aset dan potensi masyarakat. Pembangunan cenderung melihat kemiskinan sebagai masalah teknis yang memerlukan solusi teknis, sedangkan pemberdayaan memandangnya sebagai hasil dari ketidakadilan struktural yang memerlukan transformasi sosial-politik. Dikotomi yang terlalu kaku antara pembangunan dan pemberdayaan dapat kontraproduktif. Mereka mengusulkan pemahaman yang lebih terintegrasi, di mana elemen-elemen pemberdayaan dapat memperbarui praktik pembangunan, sementara infrastruktur dan kapasitas yang dihasilkan oleh pembangunan dapat mendukung proses pemberdayaan.

Pada praktik kontemporer, pendekatan "Pembangunan yang Memberdayakan" atau "*Empowering Development*" semakin mendapatkan perhatian sebagai sintesis dari kedua paradigma tersebut (Chasani, 2023). Pendekatan ini mengintegrasikan perencanaan strategis dan investasi infrastruktur dengan prinsip partisipasi, penguatan kapasitas lokal, dan transformasi relasi kekuasaan. Ia menekankan bahwa pemberdayaan perlu melampaui sekadar partisipasi simbolis dalam proses pembangunan. Pemberdayaan sejati melibatkan redistribusi kekuasaan yang memungkinkan masyarakat untuk secara substantif mengontrol sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Tanpa dimensi politis ini, pelibatan masyarakat dalam pembangunan berisiko menjadi sekadar legitimasi bagi agenda yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbedaan antara pembangunan dan pemberdayaan bukan hanya masalah metodologi, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang berbeda tentang kekuasaan, perubahan sosial, dan hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam proses transformasi sosial.

➤ **Aktor-aktor dalam Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan arena dimana berbagai aktor berinteraksi dalam relasi yang kompleks dan dinamis. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada kualitas interaksi dan sinergi antara aktor-aktor tersebut. Hubungan ini menggambarkan ekosistem pemberdayaan sebagai jaringan interdependen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan kapasitas yang berbeda namun saling melengkapi.

Pemerintah

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*) bagi inisiatif pemberdayaan, yaitu:

- a. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberdayaan
- b. Penyediaan pendanaan dan infrastruktur dasar
- c. Fasilitasi koordinasi lintas sektor dan wilayah
- d. Menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat

Sektor Swasta

Peran sektor swasta dalam pemberdayaan semakin signifikan seiring dengan berkembangnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai bersama (*shared value*). Beberapa kontribusi potensial dari sektor swasta:

- a. Pengembangan rantai nilai inklusif yang melibatkan produsen lokal
- b. Investasi dalam pengembangan keterampilan dan kewirausahaan komunitas
- c. Penyediaan akses terhadap teknologi dan inovasi
- d. Pembentukan kemitraan bisnis-komunitas yang saling menguntungkan

Komunitas

Komunitas merupakan aktor sentral dalam proses pemberdayaan. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama perubahan. Beberapa peran kunci komunitas:

- a. Artikulasi kebutuhan dan aspirasi kolektif
- b. Mobilisasi sumber daya dan modal sosial internal
- c. Pengembangan kepemimpinan lokal
- d. Pemeliharaan keberlanjutan inisiatif pemberdayaan

Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki posisi unik dalam ekosistem pemberdayaan melalui tridharma perguruan tinggi. Sriati (2022), kontribusi perguruan tinggi meliputi:

- a. Pengembangan pengetahuan dan metodologi pemberdayaan berbasis riset
- b. Pendampingan teknis dan penguatan kapasitas Masyarakat
- c. Fasilitasi dialog multipihak dan mediasi konflik
- d. Dokumentasi dan diseminasi praktik baik

Peran ini akan optimal jika pendekatan trans-disipliner dan keterlibatan jangka panjang untuk memaksimalkan dampak perguruan tinggi dalam proses pemberdayaan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM sering menjadi jembatan penting antara komunitas dengan pemerintah dan sektor swasta. Peran LSM dijabarkan sebagai berikut:

- a. Advokasi kebijakan dan perlindungan hak Masyarakat
- b. Pendampingan teknis dan penguatan kapasitas
- c. Fasilitasi akses terhadap jaringan dan sumber daya eksternal
- d. Pemantauan dan evaluasi partisipatif

Keragaman aktor dalam pemberdayaan masyarakat menciptakan potensi sinergi, namun juga menghadirkan tantangan koordinasi. Pendekatan "pentahelix" yang menekankan kolaborasi sistematis antara pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media dalam ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi. Keselarasan visi dan komplementaritas peran merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Contoh Peta Aktor Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ciheulang Kabupaten Bandung

Peta aktor tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses kolaboratif yang melibatkan hubungan vertikal dan horizontal antaraktor. Pemerintah pusat berperan melalui kebijakan dan regulasi, sedangkan pemerintah desa menjadi aktor utama pelaksana pemberdayaan di tingkat lokal. Kepala desa dan sekretaris desa bertugas merancang, mengelola, dan meng-koordinasikan program, sementara BPD melakukan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi Masyarakat (Rahmatullah dkk., 2025).

Di sisi lain, elit lokal, tokoh pendidikan, dan organisasi sosial berperan sebagai penghubung sosial yang membantu membangun partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat menjadi subjek utama pemberdayaan karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan program, seperti pelatihan keterampilan,

pengembangan UMKM, peternakan, dan wisata desa. Hubungan antarpelaku ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh sinergi, partisipasi aktif, dan komunikasi yang baik antaraktor dalam mencapai kemandirian masyarakat.

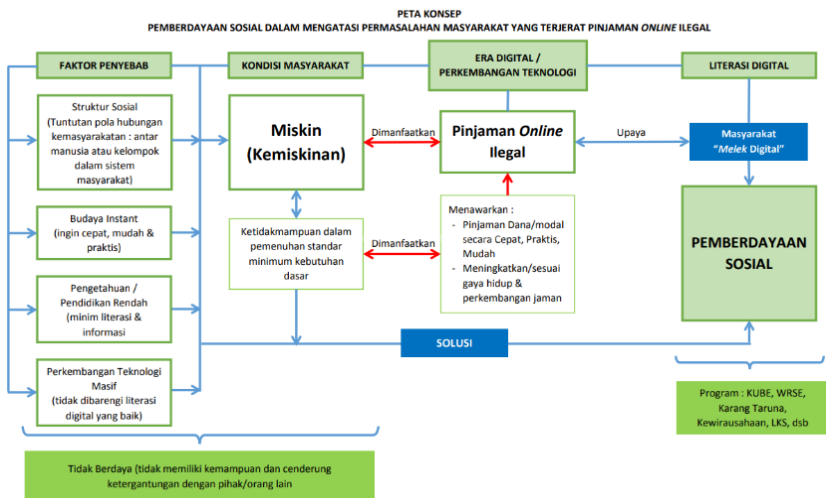
➤ **Dimensi Inklusivitas: Gender, Disabilitas, dan Kelompok Rentan**

Karakteristik sosial (seperti disabilitas, status sosial ekonomi, status migrasi dan pengungsian, etnis, ras, usia, agama, orientasi seksual, dan identitas gender) memengaruhi akses terhadap sumber daya, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang dirugikan. Karakteristik sosial bersifat interseksional, dan berbagai bentuk diskriminasi dapat memperparah satu sama lain sehingga menciptakan hambatan dalam kegiatan pemberdayaan. Chasani (2023), ada tiga konsep yang saling berkaitan dalam pemberdayaan yaitu:

- a. Pendekatan yang berfokus pada Kesetaraan Gender bertujuan untuk menghapus ketimpangan relasi kuasa antara berbagai identitas gender dalam upaya mencapai hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara bagi semua. Pendekatan ini mengatasi ketidaksetaraan dan mengubah distribusi peluang, pilihan, dan sumber daya yang tersedia bagi perempuan, anak perempuan, dan individu nonbiner sehingga mereka memiliki kekuatan yang setara untuk membentuk kehidupan dan berpartisipasi dalam proses, sehingga meningkatkan kesetaraan di antara semua gender.
- b. Inklusi disabilitas adalah proses untuk memastikan adanya partisipasi yang bermakna bagi individu penyandang disabilitas dalam segala keragamannya

dan memastikan promosi serta pengarusutamaan hak-haknya.

- c. Inklusi sosial adalah proses memperbaiki syarat-syarat agar individu dan kelompok dapat berpartisipasi dalam masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, peluang, dan martabat orang-orang yang kurang beruntung serta termarginalisasi dari pengambilan keputusan dan pengaruh secara historis akibat identitas mereka.



Gambar 1. 2 Contoh Kasus Konsep Pemberdayaan Inklusif dalam Mengatasi Permasalahan Pinjol di Kabupaten Tegal (Dinas Sosial Kab Tegal, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut, konsep pemberdayaan inklusif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal menekankan bahwa permasalahan pinjaman online ilegal tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya instan, rendahnya pendidikan, serta perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan

literasi digital. Kondisi kemiskinan dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar membuat sebagian masyarakat rentan memanfaatkan pinjaman online ilegal sebagai solusi cepat. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, literasi digital, penguatan kapasitas ekonomi, dan pendampingan sosial. Melalui program seperti KUBE, WRSE, Karang Taruna, kewirausahaan, dan LKS, masyarakat tidak hanya dibantu secara ekonomi, tetapi juga diperkuat kemampuan, pengetahuan, dan kemandiriannya sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa terjebak pada praktik pinjaman online ilegal. Konsep ini menunjukkan bahwa inklusivitas menjadi unsur penting dalam pemberdayaan karena memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berdaya, dan keluar dari ketergantungan sosial maupun ekonomi.

➤ **Pemberdayaan sebagai Proses Sosial dan Politik**

Pemberdayaan tidak hanya bersifat teknis atau ekonomi, melainkan juga proses sosial dan politik yang mendorong masyarakat untuk aktif menyuarkan hak dan aspirasinya. Ini mencakup transformasi struktur kekuasaan, penguatan kelembagaan lokal, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan menjadi alat untuk demokratisasi pembangunan, memperkuat kontrol sosial atas kebijakan, dan mendorong perubahan yang berakar dari bawah (Sriati, 2022).

Pemberdayaan sebagai Proses Sosial

Pemberdayaan sebagai proses sosial, melibatkan transformasi kesadaran kolektif dan penguatan modal sosial. Safitriani dkk (2024) mengidentifikasi beberapa dimensi sosial kunci dalam pemberdayaan:

- a. Transformasi kesadaran kritis: Mengembangkan pemahaman tentang akar masalah struktural dan menantang internalisasi ketidakberdayaan. Proses ini sebagai "conscientização" atau penyadaran kritis yang memungkinkan masyarakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan mereka.
- b. Penguatan identitas kolektif: Membangun rasa kebersamaan dan solidaritas yang menjadi landasan aksi kolektif. Identitas kolektif yang kuat memberi masyarakat daya tahan psikologis dalam menghadapi tantangan.
- c. Rekonstruksi norma sosial: Menantang dan mengubah norma-norma yang melanggar ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Seperti praktik pemberdayaan dapat mengubah norma gender yang membatasi, menghasilkan transformasi sosial yang lebih luas.
- d. Pengembangan ruang aman: Menciptakan ruang di mana suara-suara marginal dapat didengar dan divalidasi. Hal ini menekankan pentingnya "ruang demokrasi mikro" di mana warga dapat bereksperimen dengan bentuk-bentuk baru engagement dan pengambilan keputusan.

Pemberdayaan sebagai Proses Politik

Dimensi politik pemberdayaan berkaitan dengan redistribusi kekuasaan dan transformasi struktur tata kelola. Ridwan, dkk (2024), berargumen bahwa pemberdayaan sejati selalu mengandung potensi untuk mengganggu status quo kekuasaan:

- a. Penguatan suara politik: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan dan menuntut akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Hal ini meneliti bagaimana pemberdayaan meningkatkan kapasitas "*citizen voice*" dalam tata kelola pelayanan publik.
- b. Perluasan ruang partisipasi: Membuka dan memperluas ruang bagi keterlibatan substantif warga dalam pengambilan keputusan. Konsep ini membuka arena kontestasi di mana warga dapat memengaruhi keputusan politik.
- c. Transformasi institusi: Mengubah struktur formal dan informal yang mengatur distribusi sumber daya dan kesempatan. Hal ini akan mengeksplorasi bagaimana inisiatif pemberdayaan dapat secara bertahap mengubah norms kelembagaan dan praktik tata Kelola.
- d. Perubahan kebijakan: memengaruhi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marjinal. Mobilisasi berbasis komunitas mendorong reformasi kebijakan agraria di beberapa negara.

➤ Daftar Pustaka

Ridwan, A., Herdiana, D., & Hilman, F. A. (2024). Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui program Gerakan Membangun Desa Provinsi Jawa Barat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 181–204.

- Rahmatullah, A., Zuhri, M. A., & Yuningsih, N. Y. (2025). Peran aktor lokal dan hambatan pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kabupaten Bandung dalam dinamika kebijakan pusat dan lokal tahun 2019–2025. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 8(2), 5966–5974.
- Chasani, M. F. (2023). Konsep pemberdayaan sosial dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal. Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- Sriati, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat. UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Safitriani, I., Wartiningih, M., Wicaksono, D., Supiadi, E., & Noviana, A. C. (2024). Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik. CV Widina Media Utama.

BAB 2

ERA KONEKTIVITAS DIGITAL DAN DINAMIKA PEMBERDAYAAN BARU

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami perubahan sosial yang terjadi akibat transformasi digital serta pengaruh teknologi, informasi, dan konektivitas terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Menjelaskan peran teknologi digital dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, pengembangan ekonomi lokal, serta berbagai program digitalisasi dan konsep *Smart Village*.
- c. Menganalisis dampak, peluang, dan tantangan transformasi digital bagi perempuan, kelompok marjinal, dan pembangunan yang inklusif, partisipatif, serta berkelanjutan.

➤ Perubahan Struktur Sosial dalam Era Digital

Indonesia mengalami transformasi digital yang pesat dalam satu dekade terakhir. Perkembangan internet, telepon pintar, dan platform digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, belajar dan berpartisipasi dalam pembangunan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses internet dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2024, persentase penduduk yang mengakses internet mencapai 72,78 persen. Angka tersebut menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang masih berada pada tingkat 62,10 persen. Peningkatan akses internet ini tidak terlepas dari semakin luasnya penggunaan telepon pintar (*smartphone*) di berbagai lapisan masyarakat, meningkatnya kemampuan ekonomi untuk memperoleh perangkat dan layanan internet, serta perluasan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang menjangkau wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan berperan dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Meskipun penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, pemerataan akses teknologi digital masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2024, tingkat penggunaan internet di wilayah perkotaan mencapai 79,13 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang hanya sebesar 63,71 persen. Kesenjangan yang sama juga terlihat pada kepemilikan telepon seluler, dimana rumah tangga perkotaan memiliki tingkat kepemilikan sebesar 95,11 persen, sedangkan rumah tangga perdesaan sebesar 89,80 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat perdesaan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Hambatan tersebut antara lain berupa keterbatasan infrastruktur digital, akses jaringan yang belum merata, serta kemampuan literasi digital yang masih relatif rendah dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Sebaran pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat akses internet masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Berdasarkan hasil survei APJII, (2026), Pulau Jawa menjadi wilayah dengan proporsi pengguna internet terbesar, yaitu mencapai 52,4 persen dari total pengguna internet nasional. Dominasi Pulau Jawa ini tidak terlepas dari tingginya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi yang relatif lebih maju, serta ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, Pulau Sumatra menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 20,74 persen. Adapun wilayah Sulawesi menyumbang 6,62 persen, Kalimantan 6,20 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,26 persen. Di sisi lain, wilayah Maluku dan Papua memiliki proporsi pengguna internet paling rendah, yaitu hanya sebesar 2,94 persen. Perbedaan distribusi pengguna internet antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kesenjangan akses infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Tabel 2. 1 Perubahan Sosial Akibat Digitalisasi

Aspek Sosial	Kondisi Sebelum Digitalisasi	Kondisi Setelah Digitalisasi
Komunikasi	Informasi disampaikan secara tatap muka atau melalui surat dan telepon	Komunikasi dilakukan secara cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital
Ekonomi	Pemasaran dan transaksi dilakukan secara konvensional dengan jangkauan pasar terbatas.	Pemasaran dan transaksi dilakukan secara konvensional dengan jangkauan pasar terbatas.
Akses Informasi	Informasi diperoleh dari sumber terbatas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk disebar.	Informasi diperoleh dari sumber terbatas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk disebar.
Hubungan Sosial	Jaringan sosial terbatas pada lingkungan geografis tertentu.	Jaringan sosial terbatas pada lingkungan geografis tertentu.
Pelayanan Publik	Administrasi dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lebih lama	Layanan publik mulai menggunakan sistem digital dan aplikasi
Partisipasi Masyarakat	Informasi pembangunan desa diperoleh melalui pertemuan fisik	Informasi dapat disebar melalui website, media sosial, dan grup digital
Budaya dan Gaya Hidup	Penyebaran budaya berlangsung secara lokal	Budaya dan tren global mudah diakses melalui internet

Sumber: Castells, 2010

➤ **Konektivitas Digital Sebagai Instrumen Pemberdayaan masyarakat**

Teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tetapi juga instrumen pemberdayaan. Melalui internet, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, platform digital memungkinkan UMKM memasarkan produk secara lebih luas. Dalam aspek sosial, teknologi digital memperkuat jejaring sosial dan komunitas pembelajaran. Pada aspek tata kelola, teknologi mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan konektivitas digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital, penguatan kelembagaan lokal, kolaborasi multipihak, serta dukungan kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Transformasi digital yang inklusif akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Transformasi komunitas melalui teknologi digital terjadi ketika akses terhadap internet tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi informasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan bersama. Kehadiran *smartphone* dan internet di berbagai wilayah perdesaan telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam sektor pertanian, misalnya, petani kini dapat memperoleh informasi harga pasar secara lebih cepat, memperluas jaringan pemasaran, serta menjual hasil produksi secara langsung kepada konsumen tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perantara. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Akses teknologi dan tranformasi komunitas perlu didukung dengan adanya penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas adalah proses meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di lingkungan global. Tidak hanya pemain lokal bersaing, tetapi juga pemain dari seluruh dunia. Beberapa cara untuk menguatkan kapasitas untuk tranformasi masyarakat dalam menghadapi era konektivitas, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan pelatihan Keterampilan

Program pendidikan berbasis teknologi telah memungkinkan anak-anak di komunitas marginal menerima pendidikan berkualitas tinggi tanpa terbatas oleh infrastruktur fisik. Dalam menghadapi dinamika pasar global dan kemajuan teknologi yang pesat untuk bersaing di pasar global, sistem pendidikan harus adaptif dan berorientasi pada keterampilan. Kurikulum perlu menekankan penguasaan teknologi digital, seperti pemrograman, kecerdasan buatan, dan analisis data. Pendidikan berbasis STEM terbukti efektif dalam membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan inovatif Selain itu, pelatihan vokasional dan sertifikasi kompetensi menjadi solusi strategis. Program seperti Digital Talent Scholarship memberikan pelatihan teknologi kepada masyarakat, sementara negara-negara lain me-ngembangkan pelatihan keterampilan digital untuk memperkuat daya saing tenaga kerja di era Revolusi Industri 4.0

b. Mendorong Inovasi dan Riset Teknologi

Inovasi dan penelitian teknologi memperkuat daya saing negara dengan menciptakan produk dan layanan

bernilai tambah tinggi yang bersaing di pasar global. Proses ini mendukung transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi pengetahuan yang lebih berkelanjutan, sambil menyediakan solusi untuk tantangan seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesehatan. Pengembangan teknologi mandiri tidak hanya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan teknologi dan pengembangan keahlian berbasis riset. Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi R&D serta mendorong kolaborasi antara universitas, pusat riset, dan industri, khususnya di sektor agribisnis, manufaktur, dan teknologi informasi.

c. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Digital

Digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi lintas negara, seperti menjual produk UMKM ke pasar global atau menjadi pekerja lepas di platform digital internasional.

➤ **Program Digitalisasi dan Pemberdayaan di Indonesia**

Upaya mempercepat transformasi digital nasional, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mengembangkan berbagai program untuk memperluas akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai inisiatif yang dilakukan meliputi pembangunan jaringan 4G dan 5G, penyediaan akses internet pada fasilitas publik, pengoperasian satelit SATRIA-1 untuk meningkatkan konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pelaksanaan program pengembangan kapasitas masyarakat seperti Digital Talent Scholarship, Gerakan Nasional Literasi Digital, dan Digital

Entrepreneurship Academy. Berbagai program tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan akses digital sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh tingkat literasi digital, penguatan kelembagaan lokal, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi digital diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat, memperluas peluang ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional yang berdaya saing.

Smart Village atau Desa Cerdas merupakan konsep pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pembangunan desa yang inklusif serta berkelanjutan. Konsep ini dikembangkan untuk membantu desa memanfaatkan teknologi secara efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia.



Gambar 2. 1 Enam Pilar Smart Village
Sumber: (Kementrian Desa, 2020)

Pengembangan *Smart Village* tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur digital, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan desa. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan melalui berbagai inovasi dan solusi yang berasal dari kebutuhan serta potensi lokal.

Sebagai adaptasi dari konsep *Smart City* dalam skala desa, *Smart Village* dibangun melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang mampu mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, *Smart Village* mencakup enam dimensi utama, yaitu ekonomi cerdas (*smart economy*), masyarakat cerdas (*smart people*), kehidupan

cerdas (*smart living*), mobilitas cerdas (*smart mobility*), tata kelola cerdas (*smart governance*), dan lingkungan cerdas (*smart environment*). Keenam dimensi tersebut saling mendukung dalam mewujudkan desa yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing.

➤ **Dampak terhadap Perempuan dan Kelompok Marjinal di Era Konektivitas**

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah masyarakat. Hal ini menyebabkan perbedaan digital bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan masih memainkan peran yang lebih besar dalam pengembangan teknologi informasi. Beberapa penyebab pemisahan digital perempuan termasuk tingkat pendidikan dan keahlian, kesulitan menggunakan bahasa, keterbatasan waktu, stereotipe seksual yang melekat pada perempuan sehingga mudah dilecehkan, dan norma sosial dan budaya yang berkembang. Di era konektivitas, yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dampak terhadap perempuan dan kelompok marjinal sangat kompleks dan memiliki efek yang baik dan buruk. Berikut adalah penjelasan umum dampaknya:

a. Pembukaan Akses dan Pemberdayaan Digital

Revolusi digital telah membuka pintu baru bagi perempuan dan kelompok marjinal yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke informasi dan peluang ekonomi. Seorang ibu rumah tangga di pedesaan kini bisa menjalankan bisnis online dari dapur rumahnya, atau penyandang disabilitas dapat bekerja dari rumah tanpa hambatan fisik yang biasa mereka hadapi menyebutkan bahwa teknologi digital telah menjadi alat pemberdayaan yang memungkinkan perempuan untuk

melampaui batasan tradisional yang sebelumnya membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi formal.

Perempuan khususnya di daerah pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital seperti internet dan perangkat teknologi. Akses ke informasi, layanan publik digital, dan peluang ekonomi digital menjadi lebih sulit karena hambatan ini.

b. Ketimpangan Akses Digital (*Digital Divide*)

Perempuan di banyak masyarakat menghadapi tantangan tambahan seperti norma sosial yang membatasi penggunaan teknologi, beban pekerjaan rumah tangga yang tidak proporsional, dan kontrol atas penggunaan perangkat digital keluarga. Norma gender tradisional menghalangi Perempuan untuk memanfaatkan teknologi seutuhnya. Misalnya anggapan bahwa laki-laki lebih pantas memiliki akses ke teknologi masih menjadi kepercayaan yang kuat ataupun seorang wanita muda di pedesaan mungkin harus meminta izin untuk menggunakan telepon keluarganya, sementara saudara laki-lakinya dapat menggunakannya tanpa batasan. Tanggungjawab rumah tangga dan pekerjaan ganda membatasi waktu Wanita untuk belajar dan menggunakan teknologi.

c. Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Maya

Sayangnya, era konektivitas juga telah melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan kelompok marjinal. Pelecehan online, penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*), *doxing* (penyebaran informasi pribadi), dan berbagai bentuk intimidasi digital lainnya telah menjadi ancaman nyata.

Untuk mengatasi kekerasan berbasis gender online (KSBG), diperlukan pendekatan yang menyeluruh,

dimulai dengan peningkatan kesadaran dan pendidikan melalui program edukasi serta kampanye tentang hak-hak perempuan dalam tata kelola internet. Penegakan hukum yang kuat dan tegas juga penting untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Selain itu, penguatan kebijakan yang berpihak pada perempuan perlu dilakukan untuk menjamin perlindungan korban. Layanan kesehatan dan hukum harus disediakan secara sensitif terhadap isu gender, disertai dengan pendampingan dan dukungan psikososial bagi korban agar dapat pulih dari trauma. Keterlibatan aktif perempuan dalam perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan di bidang digital sangat penting. Terakhir, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan.

➤ **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Digital Berbasis Potensi Lokal di Desa Plajan, Jepara**

Desa Plajan di Jepara, Jawa Tengah, memiliki potensi lokal yang kaya namun belum optimal termanfaatkan akibat keterbatasan akses pasar, teknologi, dan dukungan kelembagaan. Memanfaatkan era konektivitas digital, desa ini bertransformasi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Inisiatif dimulai dengan memperkuat literasi digital warga, melatih pembuatan konten promosi, pemanfaatan media sosial, dan pengelolaan toko daring. Pemetaan potensi lokal seperti ukiran, herbal, makanan khas, dan wisata edukatif juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

Hasil pemberdayaan ini menunjukkan dampak positif. Produk lokal Plajan mulai dikenal luas melalui penjualan dan promosi daring, meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama dari kerajinan dan wisata. Terbentuknya komunitas kreatif desa mendorong inovasi dan kolaborasi, menjadikan Plajan contoh desa digital kreatif. Studi kasus ini menekankan bahwa konektivitas digital dapat menjadi jembatan transformasi melalui pemanfaatan yang tepat serta pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan komunitas kreatif untuk pemberdayaan berkelanjutan (Arifin dkk., 2025).

➤ Daftar Pustaka

- APJII. (2026). Profil Internet Indonesia 2026: Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026.
- Arifin, N., Imron, M., & Rohman, F. (2025). Revitalisasi Desa Wisata Plajan Pakis Aji melalui Peningkatan Capacity Building dan Pengembangan Kerjasama. 7(1), 26–35.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024.
- Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society (2nd ed.) (Wiley-Blackwell (ed.); Vol. 2).
- Kementrian Desa, P. D. T. dan T. (2020). Panduan Umum Pengembangan Model Desa Cerdas (*Smart Village*).

BAB 3

LITERASI DIGITAL SEBAGAI FONDASI KEKUATAN MASYARAKAT

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep, ruang lingkup, serta pentingnya literasi digital, termasuk kesadaran siber, etika digital, akses informasi, dan keamanan data.
- b. Menganalisis tantangan dan penerapan literasi digital dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pada komunitas desa, wilayah pesisir, dan sektor pertanian.
- c. Menjelaskan peran perempuan dan anak muda dalam penguatan literasi digital serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat di era transformasi teknologi.

➤ Definisi dan Ruang Lingkup Literasi Digital

Pada era revolusi industri 4.0 dan transformasi menuju masyarakat 5.0, literasi digital telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ahmad dkk., 2023; Rahmat dkk., 2024). Kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi syarat mutlak untuk dapat berpartisipasi aktif dalam arus informasi dan ekonomi digital yang berkembang pesat (Bejaković & Mrnjavac, 2020). (Hussain & Phulpoto, 2024). Literasi digital bukan hanya soal kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut pemahaman kritis terhadap informasi yang beredar serta etika dalam berinteraksi di ruang digital (Hauck, 2025) (Polizzi, 2025).

Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital tinggi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, mampu menangkal disinformasi, serta lebih siap memanfaatkan peluang di tengah transformasi digital (Sultanbayeva dkk., 2024). (Rød dkk., 2025) (Isnaini dkk., 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Literasi digital juga membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan publik, serta kesempatan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal (Jesse, 2024).

Pada konteks sektor pertanian, literasi digital memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi menuju pertanian modern dan berkelanjutan. Petani yang melek digital memiliki akses lebih luas terhadap informasi pasar, prakiraan cuaca, teknologi budidaya, dan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi usahatani (Ngulube, 2025) (Luo, 2025). Platform digital juga memungkinkan petani terhubung langsung dengan konsumen, memotong rantai distribusi yang panjang, dan meningkatkan nilai tambah produknya.

Literasi digital menjadi jembatan bagi petani untuk mengakses layanan keuangan digital, pelatihan daring, hingga dukungan kebijakan pemerintah yang berbasis sistem informasi. Dengan demikian, penguasaan teknologi digital tidak hanya meningkatkan kualitas hidup petani, tetapi juga mem-perkuat posisi mereka dalam sistem pangan nasional dan global. Literasi digital menjadi titik masuk penting untuk menghadirkan pertanian yang cerdas (*smart farming*) dan responsif terhadap tantangan zaman (Sanjay & Aparna, 2025) (Yunandar dkk., 2025).

Era globalisasi ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, literasi digital telah menjadi kebutuhan. Perubahan cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, bahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengakses dan mengelola informasi digital secara efektif. Literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan telah menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat modern.

Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang baik akan lebih adaptif terhadap perubahan, mampu memilah informasi yang valid, serta mampu menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan, memperluas kesenjangan informasi, dan membuka ruang bagi penyebaran hoaks, disinformasi, serta kejahatan digital lainnya.

Di era digital, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi sudah menjadi kebutuhan penting. Teknologi digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi bukan hanya untuk kebutuhan hiburan, tetapi juga sebagai upaya pribadi untuk meningkatkan kemampuan diri dan karier. Agar pemanfaatan teknologi ini tepat dan bermanfaat, masyarakat perlu memahami apa itu literasi digital. Oleh karena itu, bagian berikut akan membahas pengertian dan ruang lingkup literasi digital sebagai dasar pemahaman awal.

Literasi adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan mengelola informasi yang berkaitan dengan situasi sosial. Adapun digital adalah segala bentuk kata, gambar, video dan segala aplikasi yang ada yang di jelaskan dalam komputer (Tuna, 2021). Literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan dan menyebar luaskan informasi dalam dunia digital.

Literasi digital juga di definisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini berarti mengetahui tentang berbagai teknologi dan memahami bagaimana menggunakannya, serta memiliki kesadaran dampaknya terhadap individu dan masyarakat (Maulana, 2020).

Literasi digital berbeda dari sekadar melek teknologi. Seseorang bisa terbiasa menggunakan ponsel cerdas atau media sosial setiap hari, namun belum tentu memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Literasi digital menuntut keterampilan yang lebih dalam, seperti menganalisis sumber informasi, mengenali bias media, memverifikasi keaslian data, serta memahami konteks sosial dari konten yang dikonsumsi dan dibagikan. Hal ini mencerminkan pergeseran penting dari hanya menjadi konsumen teknologi menuju menjadi pengguna yang reflektif dan bertanggung jawab.

Literasi digital mencakup berbagai aspek yang sangat luas dan saling berkaitan, yang hadir dalam hampir seluruh aktivitas kehidupan modern. Ruang lingkup ini tidak hanya berbicara tentang kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman kritis, etika, serta partisipasi aktif dalam dunia

maya. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dari literasi digital:

a. Akses terhadap Teknologi

Akses teknologi merupakan langkah awal yang menentukan sejauh mana seseorang dapat terlibat dalam dunia digital. Ini mencakup kemampuan individu untuk mendapatkan dan menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, atau *smartphone*, serta koneksi internet yang memadai.

b. Keterampilan Penggunaan Teknologi

Langkah selanjutnya setelah memiliki akses adalah menguasai keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Keterampilan ini mencakup kemampuan dasar seperti mengetik, mengoperasikan perangkat lunak (misalnya Microsoft Word, Excel, atau Google Docs), menggunakan internet untuk mencari informasi, serta berinteraksi melalui media sosial dan platform digital lainnya.

c. Kemampuan Evaluasi Informasi

Salah satu tantangan utama di era digital adalah melimpahnya informasi yang belum tentu benar atau relevan. Oleh karena itu, literasi digital juga mencakup kemampuan untuk menilai dan menyaring informasi. Ini meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi sumber informasi yang terpercaya, membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali berita palsu (*hoaks*) dan disinformasi.

d. Etika dan Keamanan dalam Dunia Digital

Literasi digital tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga mencakup aspek moral dan keamanan. Pada penggunaan teknologi, penting untuk memahami etika digital seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta bersikap sopan dalam komunikasi daring. Selain itu, individu

juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang keamanan digital, seperti membuat kata sandi yang kuat, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mengenali dan menghindari penipuan online (phishing dan scam).

e. Partisipasi Aktif di Dunia Digital

Ruang lingkup terakhir adalah kemampuan untuk berperan aktif dan produktif dalam ekosistem digital. Hal ini mencakup partisipasi dalam komunitas online, pembuatan konten yang bermanfaat, berdiskusi secara sehat di platform media sosial, mengikuti kursus atau pelatihan daring, hingga membangun usaha melalui *e-commerce* atau media digital lainnya. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya soal menjadi pengguna pasif, tetapi juga tentang berkontribusi secara positif dan inovatif dalam masyarakat digital.

➤ Kesadaran Siber dan Etika Digital

Kemajuan teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan dan etika dalam menggunakan teknologi tersebut (Poonam dkk., 2025) (Biros & Biros, 2020). Oleh karena itu, kesadaran siber dan etika digital menjadi aspek penting dalam literasi digital, agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan aman dalam menggunakannya.

Kesadaran siber (*cyber awareness*) adalah pemahaman menyeluruh terhadap potensi risiko, ancaman, dan tantangan yang muncul dalam penggunaan teknologi digital, termasuk internet dan perangkat elektronik lainnya. Kesadaran keamanan siber (*cybersecurity awareness*) dapat didefinisikan sebagai pemahaman atau

kemampuan individu dalam menerapkan praktik keamanan saat menggunakan situs jejaring internet. Selain itu, kesadaran ini juga mencakup pemahaman tentang pentingnya melindungi data pribadi maupun data organisasi ketika memutuskan untuk mengakses atau menggunakan platform jejaring internet (Ray dkk., 2025).

Pada era digital saat ini, kesadaran siber menjadi aspek vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran ini mencakup kemampuan untuk mengenali berbagai bentuk ancaman digital seperti phishing, scamming, peretasan akun (hacking), penyebaran malware dan ransomware, serta pencurian identitas. Masyarakat yang memiliki kesadaran siber tinggi tidak hanya mampu mengenali dan menghindari risiko, tetapi juga memiliki kebiasaan baik dalam menggunakan perangkat digital (Hong & Furnell, 2021; Al Doghan & Mirzaliyev, 2024).

Etika digital merujuk pada norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia saat menggunakan teknologi dan internet. Hal ini mencakup sikap saling menghormati, tidak menyebarkan kebencian, tidak mencuri atau menjiplak karya digital orang lain, serta menjaga sopan santun dalam komunikasi daring. Tata cara berkomunikasi dan bersikap di dunia digital disebut etika digital. Etika digital terdiri dari kata etika yang artinya sikap, perilaku dan tata kerama seseorang, digital diartikan sebagai sistem dan perangkat teknologi yang digunakan.

Jadi bila disimpulkan etika digital adalah sikap, perilaku dan tata kerama seseorang dalam memanfaatkan sistem digital untuk berbagai keperluan dan kepentingan (Terttiaavini dkk., 2022). Etika digital memberikan kenyamanan dalam berinteraksi di media digital. Etika digital bukan hanya cakap dalam penggunaan alat teknologi juga memiliki mampu melakukan proses mediasi

secara produktif. Etika digital penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan saling menghargai. Tanpa kesadaran etika, dunia maya bisa menjadi tempat yang berbahaya, penuh ujaran kebencian, *cyberbullying*, hingga penyalah-gunaan informasi.

Beberapa contoh dari penerapan kesadaran siber dan etika digital antara lain:

- a. Menghindari berbagi informasi pribadi secara sembarangan di media sosial atau situs yang tidak terpercaya.
- b. Menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak, serta mengubahnya secara berkala.
- c. Tidak menyebarkan konten provokatif, hoaks, atau ujaran kebencian, meskipun terlihat menarik.
- d. Menghargai privasi dan hak cipta orang lain, termasuk tidak membagikan foto atau karya tanpa izin.
- e. Membiasakan komunikasi yang sopan dan konstruktif, baik dalam grup chat, komentar, maupun media sosial.

Akses Informasi, Data, dan Keamanan Digital

Pada era percepatan transformasi digital, kemampuan untuk mengakses informasi dan data secara cepat dan akurat menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Namun, kemudahan akses ini juga membawa tantangan baru, seperti banjir informasi yang tidak selalu dapat dipercaya serta meningkatnya risiko terhadap keamanan data pribadi. Terkait konteks literasi digital, akses terhadap informasi tidak cukup hanya dilihat dari segi teknis seperti memiliki perangkat dan koneksi internet melainkan juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab dan etis.

Pemahaman terhadap data digital dan pentingnya menjaga keamanan dalam aktivitas daring menjadi aspek penting yang harus diperkuat. Masyarakat perlu menyadari bahwa dunia digital tidak hanya menyediakan manfaat, tetapi juga potensi risiko yang bisa merugikan jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, pembahasan ini mencakup tiga hal utama yaitu kemampuan mengakses informasi digital dengan tepat, pemahaman terhadap data digital, serta pentingnya menjaga keamanan dan privasi di dunia maya.

Akses terhadap informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental yang mana memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan terlibat dalam proses demokrasi. Di era digital, akses terhadap informasi menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi kemampuan individu untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat (Tarmizi & Puan, 2024). Informasi yang akurat, relevan, dan terkini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Terkait konteks demokrasi digital, akses informasi menjadi pondasi utama keterlibatan warga negara dalam proses sosial dan politik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses ini belum sepenuhnya merata.

Ketimpangan digital (*digital divide*) masih menjadi tantangan serius, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, pulau terluar, atau wilayah dengan infrastruktur teknologi informasi yang terbatas mengalami hambatan besar dalam mengakses internet dan informasi digital. Pada wilayah tersebut, tidak hanya keterbatasan jaringan, tetapi

juga faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya turut mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat menikmati manfaat dari dunia digital. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam pengetahuan, partisipasi sosial, dan peluang ekonomi yang semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan.

Data di era digital menjadi aset penting yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, seperti menggunakan media sosial, mencari informasi, atau berbelanja online. Pemahaman terhadap data digital merupakan bagian penting dari literasi digital, karena masyarakat perlu menyadari bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Beberapa aspek penting yang harus dipahami meliputi:

a. Jenis dan Sumber Data

Data bisa berupa informasi pribadi, perilaku digital, hingga data agregat yang dipakai untuk analisis. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap data yang dibagikan, secara sadar atau tidak, bisa digunakan untuk tujuan positif maupun negatif.

b. Kesadaran Terhadap Hak dan Risiko Data

Masyarakat harus mengetahui hak-haknya atas data pribadi, seperti hak untuk tahu dan menghapus data. Kesadaran ini membantu mencegah penyalahgunaan, seperti pencurian identitas dan pelanggaran privasi.

c. Literasi Data untuk Pengambilan Keputusan

Kemampuan membaca grafik, mengenali hoaks berbasis data, atau membandingkan informasi digital merupakan bagian dari literasi data. Hal tersebut membuat masyarakat lebih kritis, tidak mudah tertipu, dan bisa mengambil keputusan yang tepat.

d. Etika dan Perlindungan Data

Mengelola dan membagikan data harus dilakukan dengan tanggung jawab. Tidak menyebarkan data

orang lain tanpa izin dan memastikan perlindungan privasi adalah bagian penting dari etika digital yang sehat.

Dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, keamanan digital menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Namun demikian, meskipun memberikan berbagai kemudahan teknologi ini juga membuka peluang bagi serangan siber, salah satunya adalah serangan phishing melalui link palsu, serangan ini memanfaatkan ketidaktahuan atau kelengahan pengguna untuk mendapatkan informasi pribadi, seperti kata sandi, dan data keuangan, seiring dengan perkembangan teknologi (Nugroho dkk., 2023).

Keamanan digital adalah aspek penting dalam literasi digital yang mencakup perlindungan terhadap data, perangkat, dan aktivitas daring dari ancaman siber. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan keamanan digital menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna internet.

a. Perlindungan Data Pribadi

Setiap individu perlu memahami bahwa data pribadi bersifat sensitif dan dapat disalah gunakan jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan pengelolaan izin aplikasi adalah langkah dasar dalam menjaga keamanan data pribadi di dunia maya.

b. Ancaman Siber yang Umum

Pengguna internet harus waspada terhadap berbagai bentuk ancaman seperti phishing (penipuan melalui email/tautan palsu), malware (perangkat lunak berbahaya), dan ransomware (perangkat lunak pemeras). Edukasi tentang mengenali ciri-ciri ancaman

ini menjadi bagian penting dari literasi keamanan digital.

c. Etika dan Tanggung Jawab Pengguna

Keamanan digital tidak hanya soal menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga keamanan digital orang lain. Etika dalam dunia digital, termasuk tidak menyebarkan perangkat lunak bajakan, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan tidak menyebarkan informasi palsu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga digital yang etis.

d. Peran Edukasi dan Kesadaran Kolektif

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam membangun budaya keamanan digital. Edukasi berkelanjutan, pelatihan keamanan dasar, dan kampanye anti hoaks bisa menjadi strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Keamanan digital bukan hanya urusan teknis, melainkan fondasi untuk menjaga kepercayaan, kenyamanan, dan keberlangsungan kehidupan digital.

➤ **Literasi Digital di Komunitas Desa dan Pesisir serta Kelompok Perempuan dan Anak Muda**

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital yang inklusif, tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang sama. Dua kelompok yang sering menghadapi tantangan lebih besar adalah komunitas desa dan pesisir serta kelompok perempuan dan anak muda (Zulaiha dkk., 2023; Hermawan & Victor, 2025; Pratikto & Kristanty, 2018).

Komunitas desa dan pesisir sering kali berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan fasilitas teknologi. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap kesenjangan digital, padahal literasi

digital dapat membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan partisipasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, perhatian khusus diberikan agar mereka tidak tertinggal dalam arus digitalisasi nasional (Zulaiha dkk., 2023; Jesse, 2024).

Kelompok perempuan dan anak muda memiliki posisi strategis sekaligus kompleks. Perempuan berperan penting dalam pendidikan keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan aktivitas sosial, sehingga literasi digital dapat memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan (Hermawan & Victor, 2025). Sementara itu, anak muda adalah generasi yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi, namun juga paling rentan terhadap risiko digital seperti hoaks, *cyberbullying*, dan penyalahgunaan data. Dukungan literasi digital bagi mereka berarti membekali generasi penerus bangsa dengan keterampilan kritis, etis, dan produktif di dunia digital (Pratikto & Kristanty, 2018).

Dengan memberikan perhatian khusus pada kedua kelompok ini, literasi digital tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga strategi pemberdayaan sosial-ekonomi yang memastikan tidak ada komunitas yang tertinggal dalam proses transformasi digital (Ahmad dkk., 2023; Hussain & Phulpoto, 2024).

Sehingga, literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan informasi, termasuk di komunitas desa dan wilayah pesisir. Di tengah arus digitalisasi yang semakin kuat, masyarakat di daerah ini tidak boleh tertinggal dalam hal akses, pemahaman, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Literasi digital dapat menjadi jembatan yang menghubungkan komunitas desa dan pesisir dengan peluang yang lebih luas dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

Zulaiha dkk. (2023) menyatakan, komunitas desa dan pesisir sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan dalam hal literasi digital. Tantangan yang dihadapi, antara lain:

a. Keterbatasan infrastruktur digital

Masih banyak desa dan daerah pesisir yang belum memiliki akses internet stabil atau bahkan belum terjangkau jaringan sama sekali. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pembelajaran dan pemanfaatan teknologi digital.

b. Minimnya fasilitas teknologi

Ketersediaan perangkat seperti komputer, laptop, atau bahkan ponsel pintar masih terbatas. Beberapa keluarga hanya memiliki satu perangkat yang digunakan bersama, dan tidak semua individu memiliki kemampuan mengoperasikannya dengan baik.

c. Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan

Kurangnya pengetahuan dasar tentang dunia digital menjadikan masyarakat desa lebih rentan terhadap misinformasi, hoaks, dan penipuan daring.

d. Budaya dan bahasa

Materi literasi digital yang berbahasa nasional atau menggunakan istilah teknis sering kali sulit dipahami masyarakat yang terbiasa menggunakan bahasa daerah.

Meski menghadapi tantangan, literasi digital berpotensi besar untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat desa dan pesisir. Keterlibatan komunitas setempat dalam pengembangan program literasi digital, memungkinkan masyarakat desa dan pesisir merasa memiliki program tersebut dan lebih mungkin untuk mengadopsinya. Peningkatan literasi digital di masyarakat pesisir, memerlukan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan kebutuhan tentang

literasi digital yang lebih baik, menyusun program pelatihan yang relevan, dan memahami konteks budaya setempat (Zulaiha dkk., 2023).

Menurut Zulaiha dkk. (2023), peningkatan literasi digital di komunitas desa dan pesisir dapat membawa manfaat nyata, seperti:

a. Mendukung kegiatan ekonomi lokal

Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan hasil pertanian, perikanan, kerajinan tangan, atau produk UMKM ke pasar yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional.

b. Mengakses informasi penting

Petani dan nelayan dapat memperoleh informasi cuaca, harga pasar, teknik budidaya terbaru, dan informasi lainnya yang relevan untuk meningkatkan produktivitas.

c. Memperkuat pendidikan dan keterampilan

Anak-anak dan remaja di desa bisa belajar secara daring melalui internet jika memiliki akses dan bimbingan. Demikian pula orang dewasa bisa mengikuti pelatihan atau kursus keterampilan kerja secara daring.

d. Peningkatan partisipasi warga

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam kegiatan sosial, administrasi desa, serta pengawasan terhadap program pembangunan.

Sehingga Zulaiha dkk. (2023) mengemukakan strategi agar digitalisasi pada komunitas desa dan pesisir dapat terlaksana, antara lain melalui:

a. Menyelenggarakan pelatihan berbasis komunitas

Pelatihan literasi digital sebaiknya dilakukan dengan pendekatan langsung dilapangan, melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan pemuda lokal sebagai fasilitator.

Materi pelatihan disusun sesuai kebutuhan dan konteks lokal.

b. Kolaborasi multi pihak

Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur (seperti wifi publik atau balai internet desa), perangkat digital, serta kurikulum pelatihan yang mudah dipahami.

c. Penggunaan bahasa dan pendekatan lokal

Materi pelatihan dan penyuluhan sebaiknya disampaikan dalam bahasa daerah dan menggunakan contoh kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami dan diterima.

d. Membangun pusat belajar digital di desa

Pusat ini dapat menjadi tempat masyarakat mengakses internet, mendapatkan pelatihan, serta berkonsultasi tentang isu digital dengan pendamping yang kompeten.

Literasi digital yang merata di seluruh wilayah, termasuk pada komunitas desa dan pesisir, akan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih cerdas, mandiri, dan mampu beradaptasi di era digital. Sehingga pembangunan digital yang inklusif dapat tercapai, tanpa meninggalkan komunitas yang berada di pinggiran.

Selanjutnya, pada perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital telah menjadi keterampilan penting bagi semua lapisan masyarakat. (Hermawan & Victor, 2025) mengemukakan bahwa kelompok perempuan dan anak muda juga memegang posisi yang sangat strategis sekaligus kompleks dalam ekosistem literasi digital.

Kelompok perempuan dan anak muda, merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial. Namun peran penting kedua kelompok ini pada pemanfaatan teknologi digital

secara positif, juga mempunyai sisi lain. Kelompok perempuan dan anak muda adalah juga kelompok yang paling rentan terhadap berbagai tantangan dalam ruang digital.

Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap informasi, etika bermedia, perlindungan data pribadi, serta kemampuan beradaptasi di dunia yang serba terkoneksi. Oleh karena itu, mendukung penguatan literasi digital bagi kelompok perempuan dan anak muda bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, cerdas, dan tahan terhadap dampak negatif digitalisasi.

Perempuan memiliki peran sentral dalam struktur sosial masyarakat, baik sebagai pengasuh, pendidik, pelaku ekonomi, maupun tokoh komunitas. Dampak transformasi digital terhadap perempuan sangat bergantung pada sejauh mana mereka memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut (Hermawan & Victor, 2025).

Dalam konteks digital, perempuan yang memiliki literasi digital yang baik (Hermawan & Victor, 2025), dapat berkontribusi dalam berbagai sektor:

a. Pendidikan dan pengasuhan anak

Perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran penting dalam mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara sehat dan aman. Dengan literasi digital yang cukup, mereka dapat membantu anak mengakses sumber belajar daring, menyaring konten yang sesuai usia, serta mendorong penggunaan teknologi untuk keperluan positif.

b. Kemandirian ekonomi

Banyak perempuan yang mulai memanfaatkan platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi keuangan untuk mengembangkan usaha rumahan atau UMKM. Literasi digital memungkinkan mereka mempromosikan produk, mengelola transaksi, dan membangun jaringan pelanggan secara mandiri.

c. Peran dalam masyarakat

Perempuan yang aktif secara digital juga dapat berperan dalam menyuarakan isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta hak-hak sosial melalui media digital.

Namun, tidak sedikit perempuan yang masih mengalami keterbatasan dalam hal akses terhadap teknologi, waktu untuk belajar, serta minimnya dukungan sosial dan budaya. Maka dari itu, literasi digital bagi perempuan harus dirancang dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif gender.

Selanjutnya, kelompok anak muda termasuk remaja dan generasi Z adalah kelompok yang paling cepat dalam mengadopsi teknologi. Kelompok ini, lahir dan tumbuh dalam era digital, menjadikan anak muda lebih akrab dengan media sosial, aplikasi daring, serta berbagai bentuk komunikasi digital.

Generasi Z merupakan generasi yang aktif dalam penggunaan internet, mereka menerima media sosial sebagai sesuatu yang taken for granted (sesuatu yang sudah biasa), dengan karakteristik generasi Z ini, maka generasi ini akan menjadi generasi yang memegang peranan penting dalam perkembangan Negara Indonesia (Pratikto & Kristanty, 2018). Potensi kelompok anak muda dalam mendukung transformasi digital antara lain:

a. Kreator konten digital

Anak muda mampu menciptakan konten yang informatif, menghibur, sekaligus mendidik. Mereka bisa menjadi penggerak perubahan sosial lewat kampanye digital, video edukasi, dan gerakan online.

b. Pemimpin komunitas digital

Anak muda sering kali menjadi motor penggerak kegiatan digital di komunitasnya, seperti mengajar teknologi kepada orang tua, mengembangkan website desa, atau memimpin forum diskusi daring.

c. Pelindung literasi digital komunitas

Dengan pengetahuan digital yang baik, anak muda dapat menjadi penyebar informasi benar, penangkal hoaks, serta pelopor dalam menjaga etika dan keamanan digital.

Namun, kelompok anak muda juga menghadapi risiko besar seperti kecanduan digital, perundungan daring (*cyber-bullying*), penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga radikalisasi melalui internet. Oleh karena itu, penguatan literasi digital bagi anak muda tidak hanya fokus pada keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga pada pembentukan sikap kritis, kesadaran etis, serta pemahaman terhadap risiko di ruang digital.

➤ Daftar Pustaka

Ahmad, S., Umirzakova, S., Mujtaba, G., Amin, M. S., & Whangbo, T. (2023). Education 5.0: Requirements, Enabling Technologies, and Future Directions. <http://arxiv.org/abs/2307.15846>

- Al Doghan, M. A., & Mirzaliev, S. (2024). Cybersecurity Awareness And Digital Banking Adoption: Exploring The Moderating Impact Of Digital Literacy. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 16(3), 34–58. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202416303>
- Bejaković, P., & Mrnjavac, Ž. (2020). The importance of digital literacy on the labour market. *Employee Relations: The International Journal*, 42(4), 921–932. <https://doi.org/10.1108/ER-07-2019-0274>
- Biros, D., & Biros, D. P. (2020). The Challenges of New Information Technology on Security, The Challenges of New Information Technology on Security, Privacy and Ethics Privacy and Ethics Editor's Comments The Challenges of New Information Technology on Security, Privacy and Ethics. *Challenges of New IT on Security and Privacy 1 Journal of the Midwest Association for Information Systems*, 2020(2). <https://doi.org/10.17705/3jmwa.000057>
- Hauck, M. (2025). Critical Digital Literacy. In *The Palgrave Encyclopedia of Computer-Assisted Language Learning* (pp. 1–7). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51447-0_246-1
- Hermawan, S., & Victor, Y. (2025). Peran Perempuan Dalam Transformasi Keuangan Rumah Tangga: Penerapan Aplikasi Keuangan Digital untuk Merencanakan Anggaran dan Mengelola Utang Dengan Efisien. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 9(01), 36–46.

- Hong, Y., & Furnell, S. (2021). Understanding cybersecurity behavioral habits: Insights from situational support. *Journal of Information Security and Applications*, 57, 102710. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102710>
- Hussain, N., & Phulpoto, S. (2024). Digital Literacy: Empowering Individuals in the Digital Age. *Assyfa Learning Journal*, 2(2), 70–83. <https://doi.org/10.61650/alj.v2i2.231>
- Isnaini, I., Nasyiriyah, T. N., Aulia Istighfari, N., & Rohmah, S. R. (2025). The Role of Digital Literacy in Social Media. *MIMESIS*, 6(1), 58–74. <https://doi.org/10.12928/mms.v6i1.12242>
- Jesse, P. (2024). The Role of Digital Literacy in Bridging the Socioeconomic Divide: A Global Perspective. *International Journal of Social and Human Studies (IJSHS)*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101321>.
- Luo, M. (2025). Enhancing agricultural knowledge and digital literacy of farmers through data-driven technology integration. *International Journal of Information and Communication Technology*, 26(10). <https://doi.org/10.1504/IJICT.2025.10070827>
- Maulana, M. (2020). Definisi, Manfaat dan Elemen Penting Literasi Digital. 1(2), 1–12.

- Ngulube, P. (2025). Leveraging information and communication technologies for sustainable agriculture and environmental protection among smallholder farmers in tropical Africa. *Discover Environment*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.1007/s44274-025-00190-1>
- Nugroho, H., Ihsan, M. N., Haryoko, A., Màarif, F., & Alifah, F. (2023). Edukasi Keamanan Digital Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Link Phising. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)*, 1(2), 28–40.
- Polizzi, G. (2025). Digital literacy and strategic (dis)engagement: examining how functional and critical digital literacy shapes participation. *Information, Communication & Society*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2452282>
- Poonam, P., Sahu, P. K., Kumar Rout, S., Arrawatia, M. A., & Sharma, P. (2025). Safety, Security and Ethical Use of Digital Technologies for Sustainable Societies. *Journal of Neonatal Surgery*, 14(9S), 343–351. <https://doi.org/10.52783/jns.v14.2677>
- Pratikto, R. G., & Kristanty, S. (2018). Literasi Media Digital Generasi Z. *Universitas Budi Luhur*, 1–28.
- Rahmat, T., Ashshiddiqi, M. T., & Apriliani, D. (2024). Urgency of Digital Literacy to Improving Work Readiness in the Industrial Revolution 4.0. *The Journal of Society and Media*, 8(1), 307–326. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n1.p307-326>

- Ray, S., Das, J., Pande, R., & Nithya, A. (2025). Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi: Analisis Ancaman Siber dan Pendekatan Mitigasi. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Rød, B., Pursiainen, C., & Eklund, N. (2025). Combatting Disinformation – How Do We Create Resilient Societies? Literature Review and Analytical Framework. *European Journal for Security Research*. <https://doi.org/10.1007/s41125-025-00105-4>
- Sanjay, V. C., & Aparna, J. R. (2025). Digital Marketplaces and *E-Commerce* Platforms for Agricultural Producers. In N. K. Priya, A. Pandey, B. M. Naik, M. Kumar, & C. L. Navya (Eds.), *E-Extension in Agriculture: Digital Platform for Knowledge Dissemination* (1st ed., Vol. 1, pp. 172–187). Textify Publisher. <https://textifypublishers.co.in>
- Sultanbayeva, G., Akynbekova, A., Belgarayeva, A., Buyenbayeva, Z., & Ashimova, A. (2024). Digital Literacy as a Tool for Identifying Fake News: A Comparative Analysis Using the Example of European and Kazakh Media. *Journal of Information Policy*, 15. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.15.2025.0001>
- Tarmizi, & Puan, A. Z. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital : Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 31–36.

- Terttiaavini, Terttiaavini, & Saputra, T. S. (2022). Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital Bagi Pelajar Di Kota Palembang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2155. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8203>.
- Yulisnawati Tuna. (2021). Literasi Digital Dalam Pembelajaran di SD Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidik. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2005(November), 388–397.
- Yunandar, D. T., Arsyad, K. A., Nuryanti, N., Ihsan, R. M., & Parasdya, S. D. (2025). Ketahanan Digital dalam Transformasi Agribisnis (Studi pada Fenomena Penggunaan Facebook Marketplace oleh Petani Milenial Program YESS). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 31(1), 96. <https://doi.org/10.22146/jkn.105116>
- Zulaiha, F., Iman, Y. S. Al, Maulana, M. D., Widianingsih, L., & Haq, N. (2023). Literasi Digital dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Pada Masyarakat Pesisir. 404–415.

BAB 4

KETIMPANGAN DIGITAL DAN INKLUSI SOSIAL

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep, dimensi, dan faktor penyebab ketimpangan digital serta berbagai bentuk kesenjangan akses teknologi dalam masyarakat.
- Menganalisis kesenjangan digital berdasarkan wilayah, gender, dan pendidikan serta mengevaluasi strategi kebijakan, infrastruktur, dan penguatan kapasitas untuk mengatasinya.
- Menilai peran teknologi dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial serta mengkaji praktik-praktik inklusi digital pada komunitas perdesaan dan wilayah pesisir.

➤ Kesenjangan Digital: Konsep dan Dimensinya Pertanian

Pembangunan komunitas didefinisikan sebagai proses partisipatif yang berlandaskan nilai-nilai, yang memberdayakan individu dan komunitas terutama mereka yang terpinggirkan untuk secara kolektif meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka (Gilchrist & Taylor, 2022). Pendekatan ini menekankan partisipasi, pemberdayaan, keadilan sosial, serta kolaborasi antara individu, komunitas, layanan publik, dan sektor sukarela. Pembangunan komunitas tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan lokal yang mendesak, tetapi juga membangun kapasitas jangka panjang komunitas untuk berpartisipasi, mempengaruhi, dan mendorong transformasi sistemik.

Kerangka konseptual pembangunan komunitas berpijak pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keberlanjutan, dan demokrasi partisipatif. Pendekatan ini bekerja di berbagai level dari pemberdayaan individu dan pembangunan modal sosial hingga mempengaruhi perubahan struktural. Selain menangani persoalan langsung, pembangunan komunitas juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan agensi komunitas dalam jangka panjang untuk mendorong transformasi sistemik. Pada era digital, hal ini berarti memastikan inklusi digital menjadi pilar utama pemberdayaan, karena akses dan literasi digital secara signifikan memengaruhi peluang dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sipil (Park, 2017; Warschauer, 2003). Inklusi digital dalam kerangka ini, dipandang sebagai komponen penting dari pemberdayaan, karena akses terhadap teknologi digital dan internet semakin menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, dan interaksi sosial.

Kerangka konseptual kesenjangan digital dalam pembangunan komunitas melampaui pemahaman sederhana tentang akses terhadap perangkat atau konektivitas internet. Kesenjangan ini mencakup berbagai dimensi yang saling terkait akses fisik terhadap infrastruktur dan perangkat literasi dan keterampilan digital, keterjangkauan teknologi, serta kemampuan untuk menggunakan alat digital secara bermakna dalam meningkatkan kualitas hidup (van Dijk, 2020). Pada komunitas perdesaan, dimensi-dimensi ini menjadi lebih kompleks karena isolasi geografis, minimnya investasi infrastruktur, keterbatasan kesempatan pendidikan dan eksklusi sosial (Roberts dkk., 2017). Oleh karena itu, kesenjangan digital mencerminkan dan memperkuat ketimpangan struktural yang lebih luas, menjadikannya

sekaligus sebagai gejala dan penyebab dari marginalisasi perdesaan.

Salah satu dimensi utama dari kesenjangan digital di komunitas perdesaan adalah kurangnya infrastruktur dan konektivitas. Banyak wilayah perdesaan tidak memiliki akses broadband yang andal, sinyal seluler, atau bahkan listrik, yang menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi digital dan akses terhadap layanan daring. Kekurangan infrastruktur ini membatasi partisipasi dalam ekonomi digital, layanan pemerintahan digital, dan layanan daring lainnya, sehingga memperkuat ketimpangan spasial yang erat kaitannya dengan marginalisasi ekonomi dan sosial (Salemin dkk., 2017). Selain itu, keterjangkauan menjadi hambatan signifikan, karena biaya perangkat, paket data, dan perawatan sering kali terlalu mahal bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, menjadikan akses internet reguler tidak terjangkau. Akibatnya, banyak penduduk perdesaan secara efektif "terpinggirkan secara digital", memperlebar apa yang disebut sebagai "*digital class divide*".

Selain masalah akses dan keterjangkauan, literasi digital tetap menjadi isu mendesak. Banyak penduduk perdesaan, khususnya orang lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk menggunakan platform digital secara efektif. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan mereka dalam mengakses layanan penting seperti perbankan daring, layanan kesehatan jarak jauh, aplikasi pemerintah, atau pendidikan jarak jauh (Helsper, 2021). Eksklusi sosial dan budaya juga memperumit inklusi digital. Platform dan layanan digital sering kali dirancang tanpa mempertimbangkan bahasa lokal, praktik budaya, atau mata pencaharian perdesaan, yang mengakibatkan keterasingan dan rendahnya pemanfaatan. Banyak

platform digital tidak memperhitungkan bahasa lokal, pengetahuan pertanian, atau sistem komunikasi adat, sehingga menjadi tidak dapat diakses atau tidak relevan bagi pengguna perdesaan (Gurstein, 2003).

Ketimpangan gender dan interseksionalitas juga memainkan peran penting dalam eksklusi digital. Perempuan di perdesaan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat sering kali menghadapi berbagai lapisan kerentanan yang membatasi keterlibatan mereka dalam ruang digital. Norma gender, kurangnya konten digital yang relevan bagi kelompok-kelompok yang beragam, dan diskriminasi sistemik semuanya berkontribusi terhadap akses dan partisipasi yang tidak setara (Hilbert, 2011). Dengan demikian, eksklusi digital menjadi isu multidimensi yang bersinggungan dengan perjuangan yang lebih luas untuk keadilan dan inklusi mencerminkan ketimpangan kekuasaan, suara, dan akses terhadap sumber daya.

Berpijak pada perspektif pembangunan komunitas, menjembatani kesenjangan digital membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, inklusif, dan berbasis hak. Strategi harus mencakup perencanaan digital partisipatif, di mana komunitas secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan merancang solusi digital. Pembangunan kapasitas melalui pengembangan local digital champions, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan penyedia teknologi, serta pengakuan bahwa akses digital merupakan hak dasar, semuanya merupakan elemen yang diperlukan (Ashmore dkk., 2017). Tanpa upaya yang terintegrasi seperti ini, transformasi digital justru berisiko memperdalam kesenjangan sosial alih-alih menjembatani. Oleh karena itu, inklusi digital di wilayah perdesaan harus dipandang bukan hanya sebagai tantangan teknologi, tetapi sebagai

medan penting dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

➤ **Ketimpangan Akses: Wilayah, Gender dan Pendidikan**

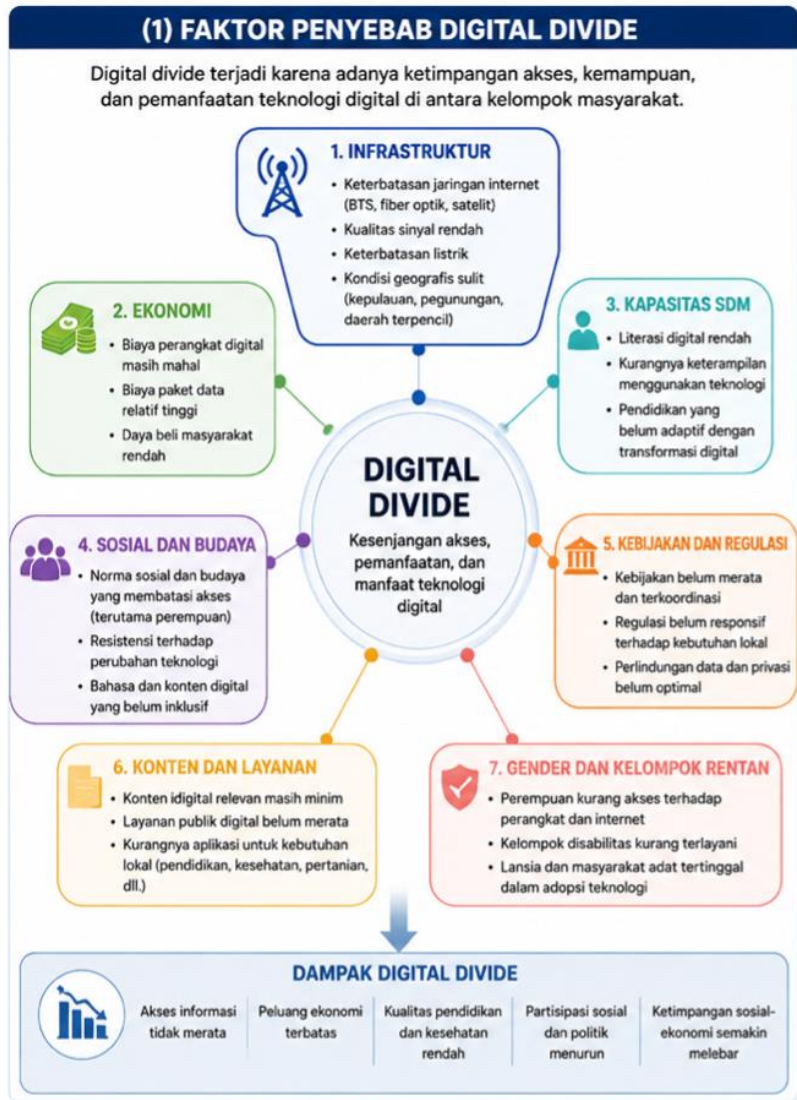
Ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan keterampilan digital tetap berlangsung di era digital, terutama antar wilayah geografis, gender, dan tingkat pendidikan. Ketimpangan ini menghambat pembangunan masyarakat yang inklusif dan memperdalam jurang kesenjangan sosial serta ekonomi yang telah ada. Akses terhadap teknologi digital kini menjadi komponen penting dalam pemberdayaan, partisipasi ekonomi, dan akses terhadap layanan publik (Helsper, 2021). Namun, manfaat dari inklusi digital belum terdistribusi secara merata.

Ketimpangan Regional

Ketimpangan geografis tetap menjadi salah satu dimensi paling mencolok dari kesenjangan digital. Wilayah perkotaan cenderung memiliki akses internet berkecepatan tinggi, infrastruktur yang baik, serta konsentrasi layanan digital yang lebih tinggi. Sebaliknya, komunitas perdesaan dan terpencil sering mengalami konektivitas yang terbatas, literasi digital yang rendah, dan kekurangan dukungan teknis (OECD, 2024). Misalnya, contoh yang dilakukan oleh International Telecommunication Union menunjukkan bahwa secara global, populasi perkotaan memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk terhubung ke *internet broadband* dibandingkan dengan populasi perdesaan (ITU, 2024).

Gambar 4.2 menunjukkan adanya ketimpangan penetrasi internet yang cukup signifikan antarwilayah di Indonesia. Wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih maju, seperti

Jakarta (89%), Jawa Barat (82%), dan Bali (80%), memiliki tingkat akses internet yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku (67%) dan Papua (58%). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa manfaat transformasi digital belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.



Gambar 4. 1 Faktor Penyebab *Digital Divide*



Gambar 4. 2 Tingkat Penetrasi Internet Menurut Wilayah di Indonesia

Kesenjangan digital di Indonesia masih menjadi isu signifikan, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan paling mencolok terjadi di wilayah timur Indonesia. Daerah perkotaan umumnya menunjukkan penetrasi internet yang lebih tinggi karena infrastruktur telekomunikasi yang sudah berkembang, sedangkan wilayah perdesaan terutama yang masuk kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih menghadapi akses internet yang terbatas (Kominfo, 2024). Provinsi-provinsi timur seperti Papua secara nyata mencerminkan kesenjangan ini, di mana tantangan geografis dan kurangnya infrastruktur menghambat penyediaan layanan internet yang andal (BPS, 2024). Kesenjangan digital tidak hanya mencakup akses fisik terhadap koneksi internet, tetapi juga ketimpangan dalam

literasi digital serta kemampuan masyarakat lokal dalam memanfaatkan teknologi secara efektif.

Visualisasi peta memperlihatkan pola geografis yang jelas, yaitu semakin jauh suatu wilayah dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional, semakin rendah tingkat penetrasi internet yang dicapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kepadatan penduduk, serta tingginya biaya pembangunan jaringan di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain mencerminkan kesenjangan akses teknologi, data ini juga menggambarkan potensi munculnya ketimpangan baru dalam berbagai sektor pembangunan. Masyarakat yang memiliki akses internet lebih baik cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dalam pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, akses informasi, serta pengembangan usaha berbasis digital. Sebaliknya, masyarakat di wilayah dengan konektivitas rendah berisiko semakin tertinggal dalam proses transformasi ekonomi dan sosial yang semakin terdigitalisasi.

Oleh karena itu, ini menegaskan pentingnya kebijakan pemerataan infrastruktur digital sebagai bagian dari agenda pembangunan inklusif nasional. Program pembangunan BTS 4G, perluasan jaringan fiber optik, pemanfaatan satelit multifungsi, serta pengembangan akses internet desa menjadi langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan digital antarwilayah dan memastikan bahwa transformasi digital dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesenjangan digital di Indonesia masih memiliki dimensi geografis yang kuat. Tingginya penetrasi internet di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi belum sepenuhnya

diikuti oleh daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah timur Indonesia, sehingga pemerataan akses digital menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kesenjangan digital di Indonesia masih menjadi isu signifikan, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan paling mencolok terjadi di wilayah timur Indonesia. Daerah perkotaan umumnya menunjukkan penetrasi internet yang lebih tinggi karena infrastruktur telekomunikasi yang sudah berkembang, sedangkan wilayah perdesaan terutama yang masuk kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih menghadapi akses internet yang terbatas (Kominfo, 2024). Provinsi-provinsi timur seperti Papua secara nyata mencerminkan kesenjangan ini, di mana tantangan geografis dan kurangnya infrastruktur meng-hambat penyediaan layanan internet yang andal (BPS, 2024). Kesenjangan digital tidak hanya mencakup akses fisik terhadap koneksi internet, tetapi juga ketimpangan dalam literasi digital serta kemampuan masyarakat lokal dalam memanfaatkan teknologi secara efektif.

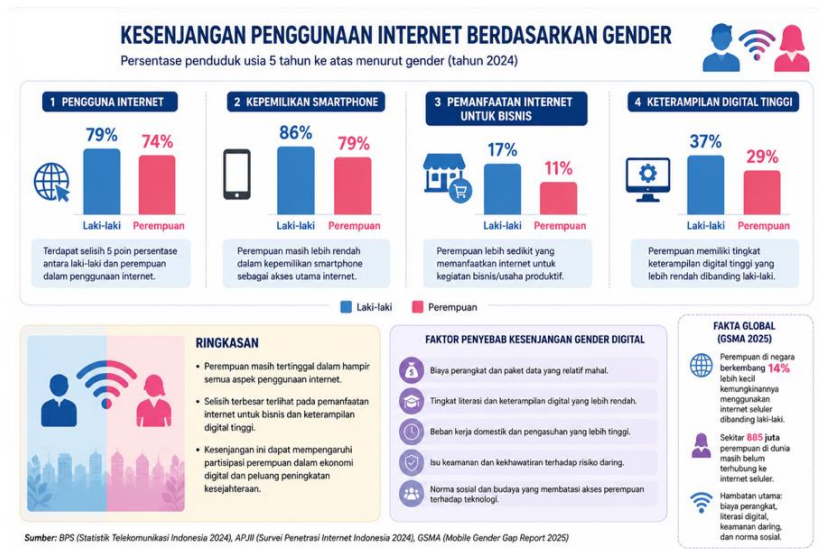
Konsekuensi dari ketimpangan digital ini sangat luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Komunitas perdesaan dan 3T dalam hal akses terhadap informasi dan layanan publik, seringkali kesulitan memperoleh informasi penting, termasuk layanan administrasi, kesehatan, dan bantuan sosial yang kini semakin tersedia melalui platform digital. Pada sisi ekonomi, keterbatasan akses internet membatasi pengembangan lokal, karena pelaku usaha di perdesaan kesulitan berpartisipasi dalam pasar digital seperti *e-commerce* (APJII, 2023). Sektor pendidikan juga terdampak, terutama saat pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring menjadi metode utama. Banyak

sekolah di perdesaan tidak memiliki akses yang memadai terhadap materi pembelajaran digital, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa di kota dan desa.

Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan digital. Perluasan infrastruktur digital menjadi prioritas utama, termasuk pengembangan jaringan broadband di wilayah terpencil melalui proyek seperti Palapa Ring, serta penyediaan akses internet ke desa-desa. Program Universal Service Obligation (USO) bertujuan memastikan ketersediaan internet di daerah yang belum terlayani, terutama di wilayah 3T. Selain itu, pemerintah juga berinvestasi dalam pengembangan keterampilan digital melalui program literasi digital, untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dalam menggunakan teknologi secara lebih efektif. Melalui upaya menyeluruh ini, pemerintah bertujuan untuk secara bertahap mengurangi kesenjangan digital, agar seluruh warga negara tanpa memandang lokasi geografis dapat memperoleh manfaat yang setara dari kemajuan teknologi.

Ketimpangan Berbasis Gender

Gender masih menjadi hambatan signifikan terhadap inklusi digital, terutama di negara-negara berkembang. Perempuan cenderung memiliki kemungkinan lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk memiliki perangkat digital, mengakses internet, atau mengembangkan keterampilan digital. Ketimpangan ini disebabkan oleh norma sosial-budaya, tidak adanya kebijakan yang berpihak pada gender, tingkat pendapatan perempuan yang lebih rendah, serta konten digital yang tidak sensitif gender (Avanesian dkk., 2024).



Gambar 4. 3 Kesenjangan Penggunaan Internet Berdasarkan Gender

Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa kesenjangan digital berbasis gender masih menjadi tantangan nyata dalam pembangunan digital Indonesia. Meskipun akses internet telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek pemanfaatan teknologi digital. Data menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet pada laki-laki mencapai 79%, sementara perempuan sebesar 74%, menunjukkan selisih sekitar 5 poin persentase. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap informasi, komunikasi, dan layanan digital belum sepenuhnya setara antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan yang serupa juga terlihat pada kepemilikan perangkat digital, khususnya *smartphone* yang saat ini menjadi sarana utama untuk mengakses internet. Sebanyak 86% laki-laki memiliki *smartphone* dibandingkan 79% perempuan. Keterbatasan kepemilikan

perangkat ini berpotensi menghambat perempuan dalam memperoleh manfaat dari layanan pendidikan daring, layanan kesehatan digital, transaksi keuangan elektronik, serta peluang ekonomi berbasis internet.

Perbedaan yang lebih mencolok terlihat pada aspek pemanfaatan internet untuk kegiatan ekonomi produktif. Persentase laki-laki yang menggunakan internet untuk mendukung aktivitas bisnis dan usaha tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengembangan usaha, pemasaran produk, maupun perluasan jaringan ekonomi. Akibatnya, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan memperoleh manfaat ekonomi dari transformasi digital menjadi relatif lebih terbatas.

Selain aspek akses dan pemanfaatan, kesenjangan juga terlihat pada tingkat keterampilan digital. Persentase perempuan yang memiliki keterampilan digital tinggi masih berada di bawah laki-laki. Rendahnya literasi dan kompetensi digital dapat mengurangi kemampuan perempuan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, baik untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, maupun partisipasi dalam ruang publik digital. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan gender digital tersebut, antara lain keterbatasan akses terhadap perangkat dan konektivitas internet, rendahnya tingkat literasi digital, beban kerja domestik yang lebih besar pada perempuan, kekhawatiran terhadap keamanan dan kekerasan berbasis gender di ruang digital, serta norma sosial yang masih membatasi

akses perempuan terhadap teknologi di beberapa komunitas. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital gender bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi kesempatan perempuan dalam memanfaatkan teknologi digital.

Pada tingkat global, laporan GSMA *Mobile Gender Gap Report 2025* menunjukkan bahwa perempuan di negara berkembang memiliki kemungkinan sekitar 14% lebih rendah untuk menggunakan internet seluler dibandingkan laki-laki. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesenjangan yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari tantangan global yang dihadapi banyak negara berkembang dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan gender.

Transformasi digital tidak secara otomatis menciptakan kesetaraan. Tanpa intervensi kebijakan yang responsif gender, perempuan berisiko tertinggal dalam akses, pemanfaatan, dan penguasaan teknologi digital. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital perlu diiringi dengan peningkatan literasi digital perempuan, perluasan akses terhadap perangkat dan internet yang terjangkau, serta penciptaan ruang digital yang aman dan inklusif agar manfaat ekonomi dan sosial dari transformasi digital dapat dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat.

Tabel 4. 1 Faktor Penyebab Kesenjangan Digital Gender

Faktor	Dampak terhadap Akses Digital Perempuan	Intervensi yang Disarankan
Norma sosial dan budaya	Membatasi akses perempuan terhadap perangkat dan konten daring	Edukasi masyarakat dan kebijakan inklusif
Keterjangkauan	Perempuan memiliki pendapatan dan kemandirian finansial yang lebih rendah	Subsidi perangkat dan data bagi perempuan
Literasi digital	Pelatihan dan paparan terhadap alat digital lebih rendah	Program keterampilan digital berperspektif gender
Relevansi konten	Layanan daring tidak disesuaikan dengan kebutuhan perempuan	Ko-kreasi platform dengan partisipasi perempuan

Sumber: *GSMA Mobile Gender Gap Report, 2023*

Ketimpangan Pendidikan

Pendidikan adalah faktor penentu yang kuat dalam inklusi digital. Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi lebih mungkin untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Mereka juga lebih aktif dalam layanan e-government, pembelajaran daring, dan layanan kesehatan digital. Sebaliknya, individu dengan pendidikan formal yang terbatas cenderung tidak memiliki literasi digital dasar, yang menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi digital maupun kehidupan publik (van Deursen & Helsper, 2015).

Bukti terbaru menunjukkan adanya “*second-level digital divide*” bukan hanya terkait akses, tetapi kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara bermakna dan kritis (Hargittai & Micheli, 2019). Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital di komunitas marjinal perlu dilakukan dengan mengintegrasikan pelatihan TIK ke dalam sistem pendidikan dasar dan pembelajaran sepanjang hayat.

Mengatasi ketimpangan dalam akses digital harus melampaui penyediaan perangkat atau infrastruktur semata. Pendekatan yang komprehensif dan inter-seksional sangat dibutuhkan, dengan mempertimbangkan kesenjangan geografis, eksklusi berbasis gender, dan kerugian akibat kurangnya pendidikan. Kebijakan inklusi digital harus memprioritaskan konektivitas perdesaan, strategi TIK yang responsif gender, serta program literasi digital yang terintegrasi dengan pendidikan. Menjembatani kesenjangan ini adalah kunci untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di era digital.

➤ Strategi Menjembatani Kesenjangan Digital

Menjembatani kesenjangan digital membutuhkan pendekatan yang multidimensional dan terintegrasi, yang berakar pada prinsip-prinsip pembangunan masyarakat partisipatif. Strategi yang efektif tidak hanya berhenti pada perluasan infrastruktur digital, tetapi juga mencakup peningkatan literasi digital, promosi kebijakan yang inklusif, pengembangan konten lokal, serta pembentukan kemitraan multipihak yang berkelanjutan. Keterbatasan infrastruktur seperti konektivitas internet dan perangkat digital masih menjadi hambatan utama di banyak wilayah perdesaan dan kelompok marjinal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berpijak pada prinsip keadilan spasial harus menjadi prioritas. Akses yang

setara terhadap infrastruktur digital merupakan syarat penting untuk mewujudkan keadilan teknologi dalam masyarakat (Febrianty dkk., 2024).

Peningkatan literasi digital merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa akses disertai dengan kemampuan dalam menggunakan teknologi secara produktif. Hal ini menegaskan bahwa kesenjangan keterampilan digital berkontribusi langsung terhadap ketimpangan sosial-ekonomi yang lebih luas (Mhlongo & Dlamini, 2022; van Dijk & Hacker, 2003). Literasi digital perlu diintegrasikan dalam pendidikan formal maupun non-formal, dengan pendekatan yang inklusif untuk menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan komunitas adat. Kebijakan publik yang mendorong transformasi digital yang adil juga dibutuhkan untuk membangun ekosistem yang memberdayakan kelompok marjinal.

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal sangat penting dalam mendorong inovasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Inisiatif seperti program desa pintar (*smart village*) atau pelatihan digital berbasis komunitas telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam membangun kapasitas lokal (UNDP, 2024). Selain itu, pengembangan konten lokal dalam bahasa asli dan format yang relevan secara budaya sangat penting untuk meningkatkan kegunaan dan relevansi teknologi digital bagi masyarakat perdesaan.



Gambar 4. 4 Pembangunan BTS 4G Wilayah 3T oleh BAKTI

Gambar 4.4 menggambarkan salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia dalam mengurangi kesenjangan digital melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Program ini dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional yang bertujuan memperluas akses internet bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan telekomunikasi yang memadai.

Berdasarkan data yang ditampilkan, pembangunan BTS 4G telah mencapai 7.904 lokasi di berbagai wilayah 3T Indonesia. Capaian tersebut terdiri atas 4.200 lokasi pada Tahap I dan 3.704 lokasi pada Tahap II, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperluas jangkauan konektivitas digital hingga ke daerah-daerah yang memiliki hambatan geografis paling

berat. Pembangunan BTS ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga sebagai fondasi bagi pemerataan akses informasi dan layanan publik berbasis digital.

Visualisasi peta menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan BTS terbesar berada di kawasan Indonesia Timur, khususnya wilayah Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Dominasi pembangunan di wilayah tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan konektivitas digital pada daerah yang selama ini menghadapi keterisolasian geografis akibat kondisi pegunungan, hutan lebat, dan keterbatasan infrastruktur transportasi. Selain Papua, pembangunan BTS juga banyak dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara yang memiliki karakteristik kepulauan dan penyebaran penduduk yang relatif terpencar.

Keberadaan BTS 4G di wilayah 3T memberikan berbagai manfaat strategis bagi masyarakat. Dari aspek pendidikan, konektivitas internet memungkinkan akses terhadap sumber belajar digital, pembelajaran jarak jauh, serta berbagai platform pendidikan daring. Dari aspek kesehatan, jaringan internet mendukung pengembangan layanan telemedicine, konsultasi kesehatan jarak jauh, dan sistem informasi kesehatan yang lebih efektif. Sementara itu, dari aspek ekonomi, akses internet membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi digital melalui pemasaran produk lokal, perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan pengembangan usaha mikro berbasis teknologi.

Selain pembangunan BTS, pemerintah juga mengintegrasikan program ini dengan berbagai inisiatif pendukung seperti pengembangan internet desa, pusat layanan internet masyarakat, serta peningkatan literasi digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerataan

digital tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan berkelanjutan.

Secara lebih luas, pembangunan BTS 4G di wilayah 3T merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan digital (*digital equity*) di Indonesia. Dengan semakin luasnya akses internet di daerah terpencil, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk mengakses informasi, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang sebelumnya hanya lebih mudah dinikmati oleh masyarakat di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, program ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional dan memperkuat integrasi sosial-ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Pembangunan BTS 4G di wilayah 3T merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan digital antarwilayah di Indonesia. Dengan menghadirkan konektivitas hingga ke daerah terpencil, pemerintah tidak hanya membangun jaringan telekomunikasi, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, dan peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat yang selama ini berada di pinggiran pembangunan digital.

Gambar 4.5 menggambarkan pendekatan holistik yang diperlukan untuk mewujudkan inklusi digital di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada penyediaan akses, model inklusi digital menempatkan masyarakat sebagai pusat dari transformasi digital sehingga seluruh kelompok dapat memperoleh manfaat yang setara dari perkembangan teknologi.

Model ini menunjukkan bahwa inklusi digital dibangun melalui enam komponen utama yang saling mendukung. Komponen pertama adalah penyediaan infrastruktur digital yang merata melalui pembangunan jaringan internet, BTS, fiber optik, satelit, dan dukungan akses listrik yang memadai. Infrastruktur menjadi fondasi awal yang memungkinkan masyarakat terhubung dengan ekosistem digital.

Komponen kedua adalah penguatan literasi dan kapasitas digital masyarakat. Akses internet yang tersedia tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya secara aman, produktif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan digital, pelatihan keterampilan teknologi, dan pendampingan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi inklusi digital.

Komponen ketiga adalah penyediaan konten dan layanan digital yang inklusif. Layanan publik digital, platform pendidikan, aplikasi kesehatan, layanan keuangan digital, serta konten berbasis kebutuhan lokal harus dirancang agar dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Komponen keempat adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ke-sejahteraan sosial dan ekonomi. Pemanfaatan internet untuk mendukung UMKM, pertanian, perikanan, pendidikan, dan pelayanan sosial dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat.

Komponen kelima berkaitan dengan kebijakan dan ekosistem digital yang mendukung. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang

mendorong pemerataan akses, perlindungan data pribadi, keamanan digital, dan pengembangan inovasi teknologi yang inklusif.



Gambar 4. 5 Model Inklusi Digital

Terakhir, keberhasilan inklusi digital memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal. Pendekatan kolaboratif memungkinkan optimalisasi sumber daya dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan digital yang inklusif.

Melalui integrasi keenam komponen tersebut, inklusi digital tidak hanya menghasilkan peningkatan konektivitas, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, partisipasi sosial, peluang ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Inklusi digital tercapai ketika setiap individu memiliki akses, kemampuan, kesempatan, dan dukungan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi digital secara aman, produktif, dan setara. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari jumlah pengguna internet semata, tetapi dari sejauh mana teknologi mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat tanpa meninggalkan kelompok rentan dan wilayah tertinggal.

Pendekatan strategis ini menegaskan bahwa kesenjangan digital tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi teknologi, tetapi memerlukan perubahan sistemik yang memperkuat kapasitas komunitas, memperluas inklusi sosial, dan mendorong akses yang adil terhadap peluang digital. Tanpa strategi yang inklusif dan partisipatif, transformasi digital justru berisiko memperdalam ketimpangan yang ada (Robinson dkk., 2020). Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan digital harus menjadi agenda utama dalam memajukan pembangunan masyarakat di era digital.

Tabel 4. 2 Kerangka Strategi Menjembatani Kesenjangan Digital

Dimensi Strategis	Pendekatan	Aktor yang Terlibat
Akses Infrastruktur	Penyediaan internet dan perangkat digital yang terjangkau	Pemerintah, penyedia layanan internet (ISP), LSM
Literasi Digital	Pelatihan keterampilan digital berbasis sekolah dan komunitas	Institusi pendidikan, relawan TIK, LSM
Kebijakan Inklusif	Skema subsidi, insentif teknologi, dan perlindungan hak digital	Pemerintah pusat dan daerah
Konten Lokal & Budaya	Produksi konten dalam bahasa lokal dan sesuai kebutuhan lokal	Komunitas lokal, kreator konten, akademisi
Kemitraan Multi-Pihak	Program CSR, inkubasi digital desa, kolaborasi LSM dengan pemerintah	Sektor swasta, LSM, universitas, pemerintah

Sumber: Febrianty dkk., 2024; Mhlongo & Dlamini, 2022; Robinson dkk., 2020; UNDP, 2024; van Dijk & Hacker, 2003; Ye & Yang, 2020.

➤ **Teknologi untuk Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial**

Kemajuan teknologi digital telah menciptakan peluang besar untuk mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menjadi medium pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas yang terpinggirkan

lainnya. Dalam konteks pembangunan masyarakat, platform digital dapat memfasilitasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sumber daya ekonomi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif, sehingga mengurangi ketimpangan struktural.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Teknologi digital telah memainkan peran transformasional dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, informasi, layanan keuangan, dan peluang kewirausahaan. Sebagai contoh, platform digital seperti *e-commerce* dan media sosial memungkinkan perempuan memasarkan produk dan jasa lokal dari rumah, mengurangi hambatan mobilitas dan kendala norma sosial. Aplikasi pelatihan daring memberikan akses terhadap keterampilan digital dan pengetahuan kewirausahaan yang sebelumnya sulit dijangkau, terutama di wilayah perdesaan. Selain itu, layanan telemedisin dan e-kesehatan telah meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak bagi perempuan di daerah terpencil. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan signifikan, termasuk rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap perangkat, dan norma sosial-budaya yang membatasi penggunaan teknologi oleh perempuan. Masalah-masalah ini menuntut strategi yang terarah untuk menjembatani kesenjangan digital berbasis gender.

Teknologi untuk Inklusi Sosial Kelompok Rentan

Inovasi teknologi juga memiliki potensi untuk mengatasi hambatan fisik dan sosial yang dihadapi oleh kelompok rentan lainnya. Teknologi bantu, seperti pembaca layar (*screen reader*) dan alat bantu dengar digital, memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam

pendidikan dan pekerjaan. Aplikasi berbasis komunitas membantu masyarakat adat dan kelompok etnis minoritas dalam melestarikan warisan budaya, mengakses layanan penting, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Alat pemetaan digital partisipatif memungkinkan komunitas untuk men-dokumentasikan isu-isu lokal, memengaruhi wacana publik, dan memperkuat advokasi kebijakan dari akar rumput. Teknologi-teknologi inklusif ini menekankan pentingnya desain solusi digital yang peka terhadap konteks dan berorientasi pada keadilan.

Tantangan dan Pendekatan Strategis

Meskipun teknologi memiliki potensi yang inklusif, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan utama. Diperlukan berbagai strategi untuk memastikan bahwa pembangunan digital benar-benar mendorong kesetaraan dan inklusi. Secara global, perempuan memiliki kemungkinan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk menggunakan internet seluler di negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs), dengan kesenjangan yang semakin besar di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara (GSMA, 2023).

Tantangan kesenjangan digital yang semakin kompleks, memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, inklusif, dan berkelanjutan. Kesenjangan ini tidak hanya tercermin dalam akses terhadap perangkat dan konektivitas internet, tetapi juga dalam kapasitas untuk menggunakan teknologi secara produktif, relevansi konten, serta representasi kelompok rentan dalam pengambilan keputusan digital. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan digital harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan sosial yang lebih luas. Tiga pendekatan strategis utama berikut ini saling mendukung dan membentuk kerangka kerja

yang komprehensif untuk mendorong kesetaraan dan inklusi sosial.

a. Perluasan Infrastruktur Digital.

Langkah awal yang paling mendasar adalah memastikan tersedianya infrastruktur digital yang adil dan merata. Investasi dalam konektivitas internet yang terjangkau dan mudah diakses khususnya di wilayah perdesaan, tertinggal, dan komunitas marjinal merupakan fondasi untuk membuka peluang yang setara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tanpa koneksi yang memadai, masyarakat tidak akan dapat mengakses layanan pendidikan daring, layanan kesehatan digital, atau peluang ekonomi berbasis teknologi. Oleh karena itu, perluasan infrastruktur tidak boleh bersifat jangka pendek atau simbolik, melainkan harus menjadi komitmen jangka panjang dan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan spasial dan kebutuhan lokal.

b. Peningkatan Literasi Digital.

Setelah infrastruktur tersedia, penguatan kapasitas manusia menjadi faktor krusial. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, keamanan digital, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Program pelatihan literasi digital harus dirancang berbasis komunitas dan konteks, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga membangun solidaritas dan kemandirian digital di tingkat lokal. Pendidikan formal dan non-formal perlu

saling melengkapi untuk menciptakan budaya digital yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

c. Pengembangan Kebijakan Inklusif.

Infrastruktur dan literasi digital hanya akan efektif jika didukung oleh kerangka kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, perlu merumuskan kebijakan teknologi yang peka gender, responsif terhadap inklusi sosial, dan menjamin perlindungan hak digital warga negara. Lebih jauh, kelompok yang selama ini kurang terwakili harus diberi ruang untuk terlibat secara langsung dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan digital. Ini mencakup pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat dalam desain solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Hanya dengan representasi yang adil, kebijakan digital dapat benar-benar menjangkau dan memberdayakan semua lapisan masyarakat.

Ketiga strategi ini bukanlah pendekatan yang terpisah, melainkan saling memperkuat dalam satu ekosistem transformasi digital yang adil. Infrastruktur menyediakan akses, literasi membangun kapasitas, dan kebijakan memastikan keberlanjutan serta keadilan distribusi manfaat teknologi. Dalam konteks pembangunan masyarakat, strategi ini tidak hanya menjawab tantangan kesenjangan digital, tetapi juga membuka jalan menuju masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan berdaya di era digital.

➤ **Daftar Pustaka**

- APJII. (20243). Survey Penetrasi Internet Indonesia.
- Ashmore, F. H., Farrington, J. H., & Skerratt, S. (2017). Community-led broadband in rural digital infrastructure development: Implications for resilience. *Journal of Rural Studies*, 54, 408–425. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.09.004>
- Avanesian, G., Zaw, H. T., Kelly, P., & Mizunoya, S. (2024). Dissecting the *digital divide*: A household fixed effects approach to estimating gender gaps in digital skills of youth in low- and middle-income economies. *Heliyon*, 10(12), e33127. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33127>
- BAKTI Kominfo (2024). Program Penyediaan BTS 4G Wilayah 3T.
- Bappenas. (2024). Strategi Transformasi Digital Indonesia 2025–2045
- BPS. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023 (Vol. 12). BPS.
- Febrianty, Ambarita, J., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2024). Digital Transformation For Inclusive Education In Rural Indonesia: Realizing Equity And Sdgs. *Migration Letters*, 21(S3 SE-Articles), 961–981. <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/6879>

Gilchrist, A., & Taylor, M. (2022). *The Short Guide to Community Development* (3rd ed.). Policy Press. <https://books.google.co.id/books?id=NWIZFrT-Ns8C>

GSMA. (20253). *The Mobile Gender Gap Report 20253*.

Gurstein, M. (2003). *Effective use: A community informatics strategy beyond the Digital Divide*. First Monday, 8(12). <https://doi.org/10.5210/fm.v8i12.1107>

Hargittai, E., & Micheli, M. (2019). *Internet Skills and Why They Matter*. In *Society and the Internet* (pp. 109–124). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198843498.003.0007>

Helsper, E. (2021). *The digital disconnect: the social causes and consequences of digital inequalities*. SAGE Publications.

Hilbert, M. (2011). *Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries? A typical case of lies, damned lies, and statistics*. *Women's Studies International Forum*, 34(6), 479–489. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2011.07.001>

ITU. (2024). *Measuring digital development: Facts and figures 2024*.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) (2025). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional*.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2024). *Data Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)*.

- Kominfo. (2024). Percepatan Pemerataan Akses Internet, Menkominfo: Buka Kesempatan Setara (Siaran Pers No. 563/HM/KOMINFO/09/2024).
- Mhlongo, S., & Dlamini, R. (2022). Digital Inequities and Societal Context: Digital Transformation as a Conduit to Achieve Social and Epistemic Justice (pp. 1–15). https://doi.org/10.1007/978-3-031-12825-7_1
- OECD. (2024). OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 2). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3adf705b-en>
- Park, S. (2017). Digital inequalities in rural Australia: A double jeopardy of remoteness and social exclusion. *Journal of Rural Studies*, 54, 399–407. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.12.018>
- Roberts, E., Beel, D., Philip, L., & Townsend, L. (2017). Rural resilience in a digital society: Editorial. *Journal of Rural Studies*, 54, 355–359. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.010>
- Robinson, L., Schulz, J., Blank, G., Ragnedda, M., Ono, H., Hogan, B., Mesch, G. S., Cotten, S. R., Kretchmer, S. B., Hale, T. M., Drabowicz, T., Yan, P., Wellman, B., Harper, M.-G., Quan-Haase, A., Dunn, H. S., Casilli, A. A., Tubaro, P., Carvath, R., ... Khilnani, A. (2020). Digital inequalities 2.0: Legacy inequalities in the information age. *First Monday*. <https://doi.org/10.5210/fm.v25i7.10842>

Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 54, 360–371. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.001>

UNDP. (2024). *From Access to Empowerment: Digital Inclusion in a Dynamic World*. UNDP Policy Center.

van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). The Third-Level *Digital Divide*: Who Benefits Most from Being Online? (pp. 29–52). <https://doi.org/10.1108/S2050-206020150000010002>

van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Polity.

van Dijk, J., & Hacker, K. (2003). The *Digital Divide* as a Complex and Dynamic Phenomenon. *The Information Society*, 19(4), 315–326. <https://doi.org/10.1080/01972240309487>

Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion. The MIT Press*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/6699.001.0001>

Ye, L., & Yang, H. (2020). From *Digital Divide* to Social Inclusion: A Tale of Mobile Platform Empowerment in Rural Areas. *Sustainability*, 12(6), 2424. <https://doi.org/10.3390/su12062424>.

BAB 5

EKONOMI DIGITAL DAN KEKUATAN EKONOMI KOMUNITAS

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep dasar, perkembangan, dan dampak ekonomi digital terhadap masyarakat serta perubahan model bisnis yang terjadi pada komunitas lokal akibat digitalisasi.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi digitalisasi ekonomi rakyat serta model pemberdayaan yang relevan dalam mendukung pengembangan ekonomi di era digital.
- c. Mengkaji praktik transformasi UMKM dan peran perempuan dalam ekonomi digital sebagai upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

➤ **Ekonomi Digital: Konsep dan Perkembangan**

Pengertian Ekonomi Digital

Ekonomi digital merujuk pada sistem ekonomi yang didukung teknologi digital, termasuk internet dan berbagai platform digital. Ini mencakup semua kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi digital, data menjadi aset berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing (OECD, 2021).

Sejarah Perkembangan Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital dimulai dengan munculnya internet pada akhir abad ke-20. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarahnya:

- a. *Era Internet Awal* (1990-an): Internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Munculnya situs web pertama dan *e-commerce* membuka peluang baru bagi bisnis (Castells, 1996).
- b. *Boom Dot-Com* (akhir 1990-an): Banyak perusahaan teknologi baru bermunculan, berinvestasi dalam model bisnis berbasis internet. Meskipun banyak yang gagal, periode ini menandai awal dari perubahan besar dalam cara bisnis beroperasi (Brynjolfsson & Kahin, 2002).
- c. *Krisis Dot-Com* (awal 2000-an): Setelah krisis, fokus beralih pada model bisnis yang berkelanjutan dan inovatif. Perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk memperbaiki efisiensi dan menjangkau pelanggan (Zengler, 2006).
- d. *Kemunculan Platform Digital* (2010-an): Perkembangan platform seperti media sosial, marketplace, dan aplikasi mobile semakin mendominasi ekonomi. Ini memungkinkan interaksi yang lebih baik antara produsen dan konsumen (Parker dkk., 2016).
- e. *Transformasi Digital* (2020-an): Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor, memperlihatkan pentingnya ekonomi digital dalam ketahanan ekonomi global. McKinsey (2021), banyak bisnis yang mengalami percepatan digitalisasi hingga lima tahun dalam waktu kurang dari satu tahun.

Dampak Teknologi terhadap Perekonomian Global

Perkembangan ekonomi digital membawa dampak signifikan pada perekonomian global, antara lain:

- a. Peningkatan Efisiensi: Teknologi digital memungkinkan otomatisasi dan pengolahan data yang lebih cepat, meningkatkan produktivitas di berbagai sektor (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
- b. Akses Pasar yang Lebih Luas: Bisnis kecil dan menengah dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia melalui platform online, membuka peluang baru untuk pertumbuhan (World Bank, 2020).
- c. Inovasi Berkelanjutan: Teknologi mendorong inovasi dalam produk dan layanan, menciptakan nilai tambah bagi konsumen (Chesbrough, 2010).
- d. Perubahan dalam Tenaga Kerja: Digitalisasi mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja, mendorong pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi tantangan baru ekonomi digital bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan perubahan fundamental berbisnis dan berinteraksi secara ekonomi.

➤ Perubahan Model Bisnis Komunitas Lokal

Beberapa bisnis lokal telah berhasil melakukan transisi ke model digital dengan efektif:

- a. UMKM di Sektor Makanan: Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan, seperti warung makan dan katering, telah memanfaatkan platform pemesanan online. Contohnya, restoran lokal yang memanfaatkan aplikasi pengantaran makanan seperti Gojek atau Grab untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas.
- b. Kerajinan Tangan dan Produk Lokal: Usaha kerajinan tangan di desa-desa telah berhasil memasarkan produk

mereka melalui *e-commerce*, seperti Tokopedia atau Etsy. Ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar internasional tanpa harus membuka toko fisik.

- c. Layanan Kesehatan: Klinik-klinik lokal mulai menawarkan layanan *telemedicine*, yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memperluas jangkauan layanan kesehatan di komunitas.

Contoh-Contoh Bisnis Lokal yang Berhasil Beradaptasi:

- a. Kedai Kopi Lokal. Adaptasi: Menawarkan pengalaman komunitas dengan mengadakan acara seperti pertunjukan musik, pameran seni, atau diskusi buku. Mereka juga menjual produk lokal dan organik.
- b. Pasar Petani. Adaptasi: Mengintegrasikan platform digital untuk pemesanan dan pengiriman produk segar. Memperkuat hubungan dengan petani lokal dan menawarkan pilihan berlangganan untuk produk mingguan.
- c. Toko Ritel Berbasis Komunitas. Adaptasi: Menggunakan model koperasi di mana anggota memiliki saham dan mendapatkan diskon. Mengadakan workshop dan kelas untuk mendukung keterampilan lokal dan produk handmade.
- d. Layanan Katering dan Makanan Siap Saji. Adaptasi: Menyediakan pilihan makanan sehat dan lokal, serta layanan pengantaran untuk mendukung pelanggan yang lebih memilih makan di rumah. Menggunakan bahan dari petani setempat.
- e. Bisnis Kerajinan Tangan. Adaptasi: Memanfaatkan platform online untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mengadakan kelas kerajinan untuk komunitas, sehingga meningkatkan keterlibatan lokal

- f. *Co-Working Space*. Adaptasi: Menawarkan ruang kerja yang fleksibel dan fasilitas untuk startup lokal, serta menyelenggarakan acara *networking* dan seminar untuk meningkatkan kolaborasi
- g. Penginapan Berbasis Komunitas. Adaptasi: Mengintegrasikan pengalaman lokal dalam penawaran, seperti tur budaya atau kelas memasak. Menggunakan platform digital untuk pemesanan dan promosi.

Tantangan yang Dihadapi oleh Bisnis Lokal dalam Proses Digitalisasi, meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bisnis lokal:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak bisnis lokal, terutama UMKM, mengalami kesulitan dalam investasi untuk teknologi dan pelatihan. Keterbatasan finansial sering menjadi penghalang utama untuk mengadopsi teknologi baru (World Bank, 2021).
- b. Kurangnya Keterampilan Digital: Transisi ke model digital memerlukan keterampilan baru. Banyak pekerja di komunitas lokal tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif (UNCTAD, 2021).
- c. Persaingan dengan Perusahaan Besar: Bisnis lokal sering kali harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih untuk investasi dalam teknologi dan pemasaran. Hal ini dapat membuat sulit bagi bisnis kecil untuk bertahan (OECD, 2020).
- d. Keamanan dan Privasi Data: Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko keamanan data juga meningkat. Banyak bisnis lokal tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk melindungi informasi pelanggan (*Cybersecurity & Infrastructure Security Agency*, 2021).

Perubahan model bisnis komunitas lokal akibat digitalisasi menciptakan peluang baru tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan. Untuk berhasil, bisnis lokal perlu beradaptasi dengan cepat, berinvestasi dalam keterampilan digital, dan mencari dukungan dari pemerintah serta lembaga lain dalam proses transisi ini.

➤ Strategi Digitalisasi Ekonomi Rakyat

Pentingnya Akses Teknologi bagi Masyarakat

Akses terhadap teknologi adalah kunci untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Tanpa akses yang memadai, individu dan komunitas tidak dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital. Ini mencakup:

- a. **Infrastruktur Digital:** Penyediaan jaringan internet yang andal dan luas sangat penting, terutama di daerah pedesaan. Akses internet yang baik memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan pasar, informasi, dan layanan online (World Bank, 2021).
- b. **Perangkat Teknologi:** Masyarakat memerlukan perangkat yang memadai, seperti *smartphone* dan komputer, untuk mengakses layanan digital. Tanpa perangkat ini, mereka akan terisolasi dari peluang yang ada (ITU, 2020).
- c. **Pendidikan dan Pelatihan:** Penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan teknologi. Keterampilan digital yang baik akan membantu masyarakat memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka dan dalam kehidupan sehari-hari (UNESCO, 2021).

Upaya Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Mendukung Digitalisasi

Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi ekonomi rakyat:

- a. Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan membantu mengurangi biaya akses internet. Contohnya, program subsidi untuk penyedia layanan internet di daerah terpencil (OECD, 2020).
- b. Program Pelatihan: Banyak pemerintah daerah telah meluncurkan program pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital (McKinsey, 2021).
- c. Kemitraan Publik-Swasta: Sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan teknologi dan pelatihan. Misalnya, perusahaan teknologi dapat menawarkan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang fokus pada pelatihan digital bagi UMKM (World Economic Forum, 2020).

Inisiatif Komunitas yang Berhasil dalam Mengimplementasikan Digitalisasi

Beberapa inisiatif komunitas telah berhasil dalam mengimplementasikan digitalisasi untuk memberdayakan ekonomi rakyat:

- a. Platform Marketplace Lokal: Banyak komunitas telah mengembangkan platform marketplace lokal yang memungkinkan produsen kecil untuk menjual produk mereka secara online. Contohnya, beberapa daerah di Indonesia memiliki aplikasi lokal yang menghubungkan petani dan konsumen langsung (StartUpAsia, 2021).

- b. Program Inkubator Bisnis: Komunitas juga mengembangkan program inkubator bisnis yang memberikan dukungan teknis dan akses ke teknologi bagi calon wirausahawan. Ini termasuk pelatihan bisnis dan akses ke pendanaan (GIZ, 2021).
- c. Kooperasi Digital: Beberapa komunitas telah membentuk kooperasi digital yang memungkinkan anggota untuk berbagi sumber daya, seperti perangkat teknologi dan pelatihan. Ini meningkatkan kolaborasi dan memperkuat jaringan di antara anggota komunitas (FAO, 2020).

➤ Model Pemberdayaan di Era Digital

Model-model Pemberdayaan yang Efektif

Pemberdayaan masyarakat di era digital memerlukan model yang inovatif dan adaptif. Beberapa model yang terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat antara lain:

- a. Model Partisipatif: Pada model ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota komunitas. Contohnya, program-program yang melibatkan masyarakat dalam pengembangan aplikasi lokal untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka (UNDP, 2021).
- b. Model Kolaboratif: Model ini melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini memungkinkan berbagi sumber daya dan pengetahuan, yang dapat mempercepat proses pemberdayaan (OECD, 2020).
- c. Model Berbasis Teknologi: Penggunaan teknologi digital untuk memberdayakan masyarakat, seperti

platform e-learning dan aplikasi mobile, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya. Contohnya, aplikasi yang menyediakan pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat di daerah terpencil (World Bank, 2021).

Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Keterampilan Digital

Pendidikan dan pelatihan memainkan peran krusial dalam meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Beberapa aspek pentingnya meliputi:

- a. Pendidikan Formal dan Non-Formal: Program pendidikan yang mengintegrasikan keterampilan digital dalam kurikulum, baik di sekolah maupun dalam pelatihan non-formal, sangat penting untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan ekonomi digital (UNESCO, 2021).
- b. Pelatihan Berbasis Komunitas: Pelatihan yang diselenggarakan di tingkat komunitas dapat menjangkau individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program-program ini sering kali lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan dapat disesuaikan dengan konteks masyarakat (GIZ, 2021).
- c. Pengembangan Keterampilan Berkelanjutan: Dengan cepatnya perkembangan teknologi, penting bagi masyarakat untuk terus mengembangkan keterampilan digital mereka. Program pelatihan yang berkelanjutan dan adaptif dapat membantu individu tetap relevan di pasar kerja yang berubah (McKinsey, 2021).

➤ **Daftar Pustaka**

Brynjolfsson, E., & Kahin, B. (2002). Understanding the digital economy: Data, tools, and research. MIT Press.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company.

Castells, M. (1996). The rise of the network society. Blackwell Publishing.

Chesbrough, H. (2010). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Review Press.

Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. (2021). Cybersecurity for small businesses: A practical guide.

FAO. (2020). Digital technologies for smallholder farmers: Opportunities and challenges.

GIZ. (2021). Business incubation in developing countries: A guide.

GIZ. (2021). Digital skills for the future: A guide for practitioners.

ITU. (2020). Measuring digital development: Facts and figures 2020.

McKinsey & Company. (2021). The future of work after COVID-19.

OECD. (2020). Digital economy outlook 2020.

OECD. (2021). The digital economy outlook 2021. OECD Publishing.

OECD. (2020). SMEs and the digital economy: The role of digital technologies in SME performance.

Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. W. W. Norton & Company.

StartUpAsia. (2021). Empowering local farmers through digital marketplaces.

UNCTAD. (2021). Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development.

UNESCO. (2021). Education and digital skills: A global perspective.

UNICEF. (2020). Education in emergencies: A global perspective.

UNDP. (2021). Empowering communities through digital innovation.

World Bank. (2020). World development report 2021: Data for better lives.

World Bank. (2021). World development report 2021: Data for better lives.

World Economic Forum. (2020). The future of jobs report 2020.

Zengler, T. (2006). The new model of business in the digital age. Harvard Business Review.

BAB 6

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN INOVASI KOMUNITAS

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep kewirausahaan sosial, karakteristik-nya, serta perbedaannya dengan kewirausahaan konvensional dalam menjawab berbagai permasalahan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.
- b. Menganalisis peran teknologi digital dalam mendukung pengembangan kewirausahaan sosial serta meng-identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, khususnya oleh perempuan dan komunitas lokal.
- c. Menjelaskan prinsip ekosistem inovasi inklusif, peran berbagai pemangku kepentingan, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kewirausahaan sosial di wilayah perdesaan dan pesisir.

➤ Definisi dan Karakteristik Kewirausahaan Sosial

Pengertian Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan konsep yang menekankan pada pengembangan solusi inovatif untuk permasalahan sosial, dengan tujuan utama menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang lebih fokus pada perolehan keuntungan finansial, kewirausahaan sosial bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial atau lingkungan melalui pendekatan yang berkelanjutan. Wirausahawan sosial menggunakan sumber daya yang

tersedia untuk menghasilkan perubahan signifikan, seperti mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya yang terpinggirkan. Model bisnis sosial ini menekankan kolaborasi dengan berbagai entitas, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan sosial dan keberlanjutan (Hasanah dkk., 2022).

Tujuan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial bertujuan untuk mengatasi isu sosial dan ekonomi secara berkelanjutan melalui model bisnis inovatif yang menghasilkan dampak sosial yang positif. Kewirausahaan sosial tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan solusi praktis untuk permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Melalui model bisnis ini, kewirausahaan sosial memberdayakan masyarakat dengan menyediakan keterampilan, pelatihan, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan, untuk pada gilirannya meningkatkan kemandirian ekonomi komunitas.

Selain itu, kewirausahaan sosial berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki kondisi lingkungan melalui penciptaan peluang yang inklusif. Melalui inovasi sosial dan penekanan pada keberlanjutan, kewirausahaan sosial mendorong pembangunan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (Hasanah dkk., 2022).

Karakteristik Wirausahaan Sosial

Kepemimpinan visioner dan keberanian mengambil risiko sosial merupakan karakteristik utama wirausahawan sosial. Pemimpin visioner merumuskan visi jangka

panjang yang mengarah pada tujuan sosial lebih besar, bukan sekadar keuntungan finansial. Keberanian menghadapi ketidak-pastian mendorong wirausahawan sosial mengambil langkah inovatif dan meng-inspirasi komunitas untuk menciptakan perubahan yang berarti.

Peran Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kewirausahaan sosial memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, dan masyarakat miskin. Model ini menawarkan pelatihan dan akses pasar yang membantu mengurangi pengangguran, sekaligus membekali individu dengan keterampilan teknis dan manajerial untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi (Hasanah dkk., 2022).

➤ Model Bisnis Sosial Berbasis Teknologi

Model bisnis sosial berbasis teknologi menjadi langkah inovatif yang memperkuat kewirausahaan sosial, khususnya dalam memberdayakan kelompok marginal. Melalui pemanfaatan teknologi, wirausahawan sosial dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan dampak sosial yang signifikan. Teknologi memungkinkan pelaku kewirausahaan sosial beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, serta memberikan solusi yang relevan untuk masalah sosial dan lingkungan. Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam menyediakan pelatihan keterampilan digital bagi pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi mereka melalui pemasaran digital dan

platform online, serta meningkatkan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab (Herdiyani dkk., 2022).

Teknologi memainkan peran krusial dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional dalam model bisnis sosial. Melalui pemanfaatan platform digital seperti e-commerce, wirausahawan sosial dapat memperkenalkan produk mereka kepada audiens yang lebih luas, tanpa batasan geografis, serta mengurangi biaya pemasaran. Hal ini memungkinkan untuk lebih kompetitif di pasar yang lebih besar sambil tetap memberikan dampak sosial yang signifikan. Selain itu, media sosial menjadi alat penting untuk membangun komunitas, memperkuat hubungan dengan audiens, dan meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu sosial yang dihadapi. Platform ini juga mendorong kolaborasi antara individu dan organisasi yang memiliki tujuan sosial serupa, menciptakan jaringan yang lebih kuat untuk saling mendukung (Herdiyani dkk., 2022).

➤ **Peran Perempuan dalam Kewirausahaan Sosial**

Kewirausahaan Sosial dan Gender

Kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan dengan memberikan mereka kesempatan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Hal tersebut tidak hanya memberikan kebebasan finansial, tetapi juga meningkatkan status sosial perempuan dalam masyarakat. Melalui program kewirausahaan sosial, perempuan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi keluarga dan komunitas, serta mengubah pandangan masyarakat terhadap peran gender tradisional (Nurhikmah dkk., 2022).

Dampak kewirausahaan sosial terhadap pemberdayaan perempuan sangat signifikan program pelatihan yang dirancang khusus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kepemimpinan mereka. Hasilnya, perempuan yang terlibat lebih mandiri dan aktif dalam membuat keputusan ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas (Nurhikmah dkk., 2022)).

Hambatan Perempuan dalam Kewirausahaan Sosial

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam kewirausahaan sosial adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya, modal, dan jaringan sosial. Meskipun memiliki potensi besar dalam sektor bisnis, perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk membangun jaringan sosial yang dapat mendukung usaha mereka, seperti dalam hal mendapatkan nasihat, dukungan, dan peluang investasi. Jaringan sosial sangat penting bagi perempuan dalam mengakses sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun pengetahuan.

Diskriminasi gender dalam sektor kewirausahaan juga menjadi hambatan yang signifikan bagi perempuan. Pandangan sosial yang meremehkan kemampuan perempuan dan menganggap mereka tidak mampu menjalankan usaha sering kali membatasi peluang kewirausahaan mereka. Stereotip yang berkembang mengenai peran gender tradisional dapat menghalangi perempuan untuk mengambil risiko dan mengejar peluang bisnis. Pandangan ini sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis dalam

sektor kewirausahaan, meskipun mereka memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai.

Pemberdayaan Perempuan melalui Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial telah menjadi alat yang efektif dalam pemberdayaan perempuan, tidak hanya dengan memberikan kesempatan finansial, tetapi juga memperkuat posisi sosial mereka. Pendidikan dan pelatihan merupakan elemen penting dalam pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan sosial. Program-program yang mengajarkan keterampilan kewirausahaan, seperti manajemen bisnis, pemasaran digital, dan pengembangan produk, memberi perempuan kemampuan untuk mengelola usaha secara lebih efektif dan mandiri (Nurhikmah dkk., 2022). Pelatihan keterampilan komunikasi, seperti public speaking dan penggunaan media sosial, juga sangat diperlukan untuk memperluas jaringan sosial dan meningkatkan kemampuan berbisnis. Dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, perempuan tidak hanya dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Nurhikmah dkk., 2022).

➤ Ekosistem Inovasi Inklusif dan Kolaboratif

Pengenalan Ekosistem Kolaboratif

Ekosistem inovasi inklusif adalah sebuah platform yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk bekerja bersama dalam menciptakan solusi sosial dan ekonomi yang bermanfaat, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Inklusivitas dalam ekosistem ini sangat penting, karena memastikan bahwa

semua suara, terutama dari pihak yang kurang terlayani, didengar dan dipertimbangkan. Pemetaan ekosistem inovasi, membantu mengidentifikasi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses inovasi, sehingga mendorong solusi yang lebih relevan dan efektif yang dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama (Eriksson dkk., 2023).

Pentingnya Kolaborasi dalam Ekosistem Inovasi

Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil memainkan peran vital dalam mengembangkan ekosistem inovasi yang sukses. Sinergi ketiga sektor ini memungkinkan pemanfaatan optimal sumber daya dan pengetahuan yang ada, serta menghasilkan solusi yang lebih holistik dan responsif terhadap tantangan sosial. Pemahaman yang mendalam tentang harapan dan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan. Sektor publik dapat memberikan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung, sektor swasta menyumbangkan inovasi dan investasi, sementara masyarakat sipil membawa perspektif lokal dan keahlian yang memastikan solusi inovasi relevan dan efektif (Eriksson dkk., 2023).

Sinergi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi menghasilkan dampak sosial yang lebih besar. Kolaborasi inklusif antara pemerintah, sektor swasta, universitas, dan masyarakat memperkuat kapasitas inovasi dan memastikan solusi yang berkelanjutan secara ekonomi maupun sosial.

Stakeholder dalam Ekosistem Inovasi

Pemerintah berperan sebagai regulator yang menciptakan kebijakan inklusif untuk mendukung kewirausahaan sosial dan mendorong kolaborasi sektor publik-swasta.

Lembaga swasta menyediakan investasi dan sumber daya penelitian, sementara organisasi masyarakat sipil (OMS) memastikan solusi yang dihasilkan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta dampak sosial yang berkelanjutan.

➤ **Komunitas Inovatif: Contoh Kasus dari Daerah Pedesaan dan Pesisir**

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk, memproduksi berbagai produk olahan berbasis komoditas perikanan lokal seperti kerupuk ikan dan abon ikan. Melalui program ini, anggota komunitas diberikan kesempatan untuk me-ngembangkan potensi ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan (Septiandika dkk., 2024).

Keberhasilan Program ini juga terlihat pada peningkatan akses pasar melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital, termasuk media sosial dan *e-commerce*. Produk-produk olahan lokal yang sebelumnya terbatas di pasar lokal kini dapat dipasarkan lebih luas, bahkan ke pasar nasional. Dengan peningkatan pendapatan yang mencapai 25%, program kewirausahaan sosial ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan berbagai pihak (sektor publik, swasta, dan lembaga sosial) dapat menciptakan dampak sosial yang positif. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi ini menjadi model bagi daerah pesisir lainnya, memperlihatkan bagaimana kewirausahaan sosial dapat mendorong keberlanjutan ekonomi dan me-ningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Septiandika dkk., 2024).

➤ **Daftar Pustaka**

- Eriksson, V., Keipi, T., & Björklund, T. (2023). Dimensions of Proximity in Stakeholder Choice Reflected in the Creation of Knowledge-Based Innovation Ecosystem Partnerships. *Proceedings of the Design Society*, 3, 1505–1514. <https://doi.org/10.1017/pds.2023.151>
- Hasanah, B., Sururi, A., Prananda, D. P., & Noval, A. M. (2022). Kewirausahaan Sosial: Partisipasi Masyarakat Dan Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 291–317. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1721>
- Herdayani, S., Barkah, C. S., Auliana, L., & Sukoco, I. (2022). Peranan Media Sosial Dalam Mengembangkan Suatu Bisnis: Literature Review. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(2), 103–121. <https://doi.org/10.26593/jab.v18i2.5878.103-121>
- Nurhikmah, N., Rusvitawati, D., Anisa, N., & Nadila, N. (2022). Pembekalan Pendidikan Kewirausahaan Berwawasan Gender Bagi Mahasiswa Perintis Wirausaha Di Banjarmasin Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Bubungan Tinggi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 244. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i1.4740>
- Septiandika, V., Suchayo, I., Rahmadhi, A., Dewi, R. C., Maksin, M., & Fadilah, S. N. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Di Kota Probolinggo 1*.

BAB 7

MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA MOBILISASI SOSIAL

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami peran media sosial dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk sebagai sarana akses informasi, partisipasi publik, kolaborasi, advokasi, dan mobilisasi sosial.
- b. Menganalisis strategi serta praktik gerakan sosial digital, termasuk kampanye partisipatif, advokasi berbasis media sosial, serta keterlibatan perempuan dan generasi muda.
- c. Mengevaluasi tantangan dan pentingnya literasi digital dalam menghadapi slacktivism, polarisasi, disinformasi, serta menjaga kualitas komunikasi di ruang digital.

➤ Fungsi Media Sosial dalam Pemberdayaan

Media sosial telah berkembang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan ruang baru bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan aspirasi, mengakses informasi dan membangun kekuatan kolektif. Castells (2015) menjelaskan bahwa dalam masyarakat jaringan (*network society*) kekuasaan bergeser dari struktur yang terpusat menuju jejaring komunikasi horizontal, sehingga warga biasa memperoleh kapasitas untuk memproduksi dan menyebarkan informasi secara

mandiri. Inilah yang menjadikan media sosial sebagai infrastruktur baru bagi keterlibatan warga dalam urusan publik (*civic engagement*).

Dalam konteks pemberdayaan, media sosial menjalankan empat fungsi utama. Pertama, akses informasi: masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, dapat memperoleh informasi tentang hak, peluang ekonomi, dan program pemerintah. Kedua, partisipasi publik: fitur komentar dan tagar memungkinkan warga menyuarakan aspirasi sekaligus berdialog dengan pemerintah. Ketiga, jaringan dan kolaborasi: individu dengan tujuan yang sama membentuk komunitas digital yang saling mendukung lintas wilayah. Keempat, mobilisasi sumber daya: media sosial menggerakkan bantuan nyata seperti penggalangan dana dan pemasaran usaha. Wujud konkret fungsi terakhir tampak pada pemasaran UMKM melalui TikTok; dengan konten kreatif dan fitur live streaming, pelaku usaha menjangkau konsumen secara langsung, dan nilai transaksinya di Indonesia telah menembus ratusan triliun rupiah pada 2024. Keempat fungsi ini menegaskan bahwa media sosial dapat memperkuat posisi masyarakat, selama dibarengi kemampuan dan literasi digital yang memadai.

➤ **Komunitas Virtual dan Jaringan Solidaritas**

Salah satu kekuatan media sosial adalah kemampuannya membentuk komunitas virtual dan jaringan solidaritas yang melampaui batas geografis. Melalui grup dan forum daring, individu yang semula tidak saling mengenal dapat merasakan ikatan emosional (*sense of community*) karena memperjuangkan tujuan yang sama. Saat pandemi COVID-19, banyak inisiatif gotong royong digital bermunculan, mulai dari penggalangan bantuan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri hingga layanan

konsultasi gratis. Achmad (2022) menunjukkan bahwa selama pandemi terjadi peningkatan aksi dan solidaritas sosial digital di Indonesia yang berdampak nyata bagi komunitas terdampak, membuktikan bahwa solidaritas daring dapat berbuah aksi nyata di kehidupan luring.

Namun, solidaritas digital juga memiliki tantangan. Komunitas maya dapat berubah menjadi kelompok tertutup yang hanya menerima pandangan sejenis, fenomena yang dikenal sebagai *echo chamber*, di mana algoritma menyaring dan memperkuat pandangan yang sudah ada. Akibatnya dapat muncul polarisasi yang memperdalam perbedaan antar kelompok dan menghambat dialog terbuka. Karena itu, kesadaran literasi digital menjadi penting agar anggota komunitas tetap terbuka terhadap ragam informasi dan perspektif.

➤ **Kampanye Sosial dan Advokasi Berbasis Digital**

Selain membentuk komunitas, media sosial menjadi alat mobilisasi massa melalui kampanye sosial dan advokasi. Kampanye berbasis tagar bersifat terdesentralisasi dan partisipatif: siapa pun dapat memulai, dan jika pesannya resonan, orang lain ikut menyebarkan hingga tercipta efek viral. Kampanye global seperti #MeToo dan #Black-LivesMatter memperlihatkan bagaimana keterhubungan personal di media sosial mampu menggerakkan aksi kolektif lintas negara tanpa memerlukan organisasi formal yang ketat.

Di Indonesia, dinamika serupa tampak pada gerakan #SaveKendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di kawasan karst Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Digerakkan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng bersama para petani, aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara pada 2016 dan 2017 menyebar luas melalui Twitter, Instagram, dan

Facebook hingga menjadi trending topic nasional. Sitowin dan Alfirdaus (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan Instagram dalam gerakan ini efektif memperluas dukungan publik sekaligus me-ngangkat isu lingkungan lokal ke dalam wacana nasional. Tekanan publik daring beriringan dengan jalur hukum hingga Mahkamah Agung membatalkan izin lingkungan pabrik pada 2016, bukti bahwa mobilisasi berbasis media sosial dapat menjembatani komunitas akar rumput dengan ranah kebijakan.

Meski berpotensi besar, kampanye digital menghadapi tantangan. Lim (2013) mengingatkan bahwa banyaknya klik tidak otomatis berbuah perubahan; aktivisme daring di Indonesia cenderung berhasil hanya ketika narasinya sederhana, berisiko rendah, dan terhubung dengan jejaring yang lebih luas. Keterlibatan yang dangkal, sekadar menyukai atau membagikan konten tanpa tindakan lanjutan (*slacktivism*), kerap menghasilkan dukungan yang tidak berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan kampanye ber-gantung bukan hanya pada teknologi, melainkan pada pesan yang kuat dan autentik serta keterpaduannya dengan aksi nyata.

➤ **Isu Disinformasi dan Literasi Media Sosial**

Di balik peluangnya, media sosial menyimpan sisi gelap berupa cepatnya penyebaran misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi keliru yang disebarkan tanpa niat menyesatkan, sedangkan disinformasi sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan pihak tertentu. Dampaknya nyata: hoaks politik pada Pemilu 2019 membingungkan pemilih dan merusak kepercayaan antarwarga, sementara misinformasi kesehatan sempat menghambat penanganan pandemi.

Mobilisasi yang berpijak pada informasi salah justru dapat merusak, sehingga literasi media menjadi kunci.

Literasi media sosial mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Beberapa prinsip praktis yang penting antara lain memverifikasi sumber melalui situs cek fakta, mewaspadaai judul provokatif, mengenali manipulasi konten visual seperti deepfake, serta menjunjung etika berkomunikasi di ruang digital. Tantangan lain adalah kesenjangan akses: kelompok dengan keterbatasan pendidikan dan infrastruktur lebih rentan terhadap disinformasi, sehingga upaya literasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain dari sisi pengguna, penanganan hoaks menuntut tata kelola konten (*content moderation*) dari platform dan negara. Gillespie (2018) menyebut platform sebagai “penjaga” ruang publik digital karena keputusan mereka untuk menyaring, menurunkan, atau menandai konten ikut menentukan informasi yang beredar di masyarakat. Di Indonesia, kerangka regulasi memberi dasar penanganan konten ilegal, sementara pemerintah bekerja sama dengan platform dan organisasi pemeriksa fakta. Namun moderasi menyimpan dilema antara melindungi masyarakat dari informasi berbahaya dan menjaga kebebasan berekspresi, sehingga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

➤ **Aktivisme Digital Perempuan dan Kaum Muda**

Media sosial membuka ruang besar bagi perempuan dan generasi muda yang sebelumnya kerap termarginalkan dalam ruang publik. Bagi perempuan, platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi sarana menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak. Feminisme digital di Indonesia berkembang pesat melalui

akun-akun edukasi dan solidaritas yang mengangkat isu kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan kritik terhadap patriarki. Bahagijo dkk. (2022) mencatat peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mempersempit kesenjangan gender digital di Indonesia. Meski ruang digital tidak selalu aman dan perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender daring, solidaritas serta pendampingan digital turut menjadi mekanisme perlindungan. Dampak nyatanya tampak pada dorongan kampanye daring terhadap pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 2022

➤ Daftar Pustaka

- Achmad, W. (2022). Social action and social solidarity: Community empowerment in the digital age. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 1(3), 179–184.
- Bahagijo, S., Prasetyo, Y. E., Kawuryan, D., Tua, B., & Eridani, A. D. (2022). Closing the digital gender gap in Indonesia through the roles and initiatives of civil society organizations. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 14–38.
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657.

Sitowin, P., & Alfirdaus, L. K. (2019). Media sosial dan gerakan sosial: Penggunaan Instagram dalam penolakan pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 271–280.

BAB 8

**RANTAI PASOK KOMUNITAS DAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN LOKAL**

Tujuan Pembelajaran:

- a. Memahami konsep dan perbedaan rantai nilai dan rantai pasok serta penerapannya di sektor komunitas.
- b. Mampu menjelaskan dan menganalisis digitalisasi dalam pemasaran produk komunitas.
- c. Memahami peran kelembagaan lokal (kelompok tani, nelayan, UMKM)
- d. Mampu menganalisis perubahan dan adaptasi koperasi serta lembaga ekonomi lokal.
- e. Memahami konsep rantai pasok inklusif dan pentingnya integrasi perspektif gender.

➤ **Konsep Rantai Nilai Dan Rantai Pasok**

Sistem logistik sebagai salah satu bagian dari rantai pasok (*supply chain*) memegang peranan penting dalam menunjang pemasaran komoditas hasil pertanian, karena berfungsi memastikan kelancaran kegiatan mulai dari pengadaan bahan, penyimpanan, transportasi, distribusi, hingga penyediaan layanan pengantaran kepada konsumen akhir. Sistem logistik juga berkaitan erat dengan konsep *value chain*, yang menekankan penciptaan nilai tambah pada setiap tahapan proses.

Efektivitas sistem logistik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pengangkutan, akan tetapi juga ditentukan oleh seberapa baik koordinasi antar entitas yang terlibat dalam sistem yang saling terintegrasi. Dengan demikian, sistem logistik yang terencana dan dikelola dengan baik dapat memperkuat sinergi antara

rantai nilai dan rantai pasok, sehingga distribusi komoditas menjadi efisien, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi.

Rantai Nilai (*Value Chain*)

Rantai nilai (*Value Chain*) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau organisasi guna menghasilkan suatu layanan atau produk agar memiliki nilai tambah dari input hingga sampai kepada konsumen akhir. Aktivitas dalam rantai nilai meliputi pengadaan input, proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pada pemasaran. Setiap titik dalam rantai ini memiliki peluang dalam peningkatan nilai tambah dan efisiensi. Analisis *Value Chain* dapat membantu para manajer untuk memahami posisi perusahaan pada rantai nilai produk untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan dan kelembagaan.

Upaya meningkatkan kesejahteraan produsen agribisnis, maka dalam konteks komunitas lokal, rantai nilai menjadi strategi penting guna meningkatkan kualitas dan nilai jual produk (misalnya dengan pengemasan ulang atau branding lokal), integrasi vertikal seperti menggabungkan produksi, pengolahan, dan pemasaran dalam satu koperasi atau kelompok.

Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Rantai pasok (*supply chain*) merupakan sebuah sistem yang menghubungkan aliran barang, informasi, dan biaya dari pemasok bahan baku hingga kepada konsumen tingkat akhir. Pada sistem rantai pasok ini bukan hanya berupa aktivitas fisik seperti logistik dan transportasi, tetapi juga meliputi manajemen stok, sistem informasi, serta pengambilan keputusan (Chopra & Meindl, 2016). *Supply Chain* juga didefinisikan sebagai jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama

bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir.

Supply chain dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila dapat membantu komunitas lokal untuk mengurangi beban biaya distribusi dan meminimalisir kerugian pascapanen, meningkatkan respon terhadap permintaan pasar serta dapat membangun transparansi dan kepercayaan antar pelaku.

Model rantai pasok secara sederhana terdiri dari empat komponen yaitu supplier, produsen, gudang, dan pengguna akhir. Seperti digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 8. 1 Model Sederhana *Supply Chain*

Berdasarkan gambar 1 bahwa model rantai pasokan secara sederhana terdiri dari empat komponen yang masing-masing berperan sebagai berikut:

- Supplier berperan dalam persediaan bahan baku
- Produsen berperan dalam menghasilkan produk
- Gudang atau Pusat Distribusui sebagai ruang penyimpanan dan juga distribusi ke toko-toko dan kapal-kapal produk
- Pengguna Akhir sebagai konsumen yang menerima produk.

Perpaduan antara rantai nilai dan rantai pasok akan menciptakan sistem yang berkelanjutan dan efisien. Pada rantai nilai berfokus pada apa yang dilakukan untuk meningkatkan nilai, sedangkan rantai pasok fokus pada

bagaimana alur barang dan jasa tersebut dapat dikelola untuk mencapai efisiensi.

Keberhasilan dari suatu rantai pasok (*supply chain*) dipengaruhi oleh beberapa tolok ukur strategis. Pertama, kapasitas kelembagaan lokal dalam manajemen logistik, karena lembaga-lembaga lokal tersebut berperan dalam mengatur aliran barang dan informasi secara efisien di tingkat komunitas. Kedua, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas ruang penyimpanan pendingin (*cold storage*) yang sangat menentukan kelancaran distribusi, terutama untuk produk-produk yang mudah rusak dan dengan masa simpan yang singkat. Ketiga, akses terhadap informasi pasar secara real-time yang memungkinkan pelaku rantai pasok untuk merespons dinamika permintaan dan penawaran dengan cepat dan tepat. Terakhir, kolaborasi multipihak atau multi-stakeholder collaboration antara pemerintah, swasta, komunitas, dan lembaga lainnya penting untuk menciptakan sinergi dalam setiap tahapan rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi ke konsumen akhir.

➤ Digitalisasi Pemasaran Komunitas

Digitalisasi global memicu perusahaan untuk memposisikan diri untuk tetap kompetitif karena digitalisasi ini dapat mengubah lanskap bisnis dan strategi yang perlu diterapkan. Digitalisasi pemasaran merupakan sebuah transformasi dari metode pemasaran konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital sehingga memungkinkan efisiensi biaya, perluasan jangkauan, dan interaksi yang lebih dinamis antara produsen dan konsumen. Pada komunitas lokal seperti kelompok tani, UMKM desa, nelayan, digitalisasi menjadi alat strategis untuk mengakses pasar secara lebih luas, mengurangi

ketergantungan pada tengkulak, dan membangun identitas merek berbasis budaya lokal.

Kurangnya pemahaman petani dan UMKM terhadap digital marketing bisa membawa sejumlah dampak negatif. Salah satunya yaitu kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar. Tanpa pemanfaatan platform digital, peluang untuk menjangkau lebih banyak konsumen menjadi lebih terbatas dan bisa hilang begitu saja, sehingga pertumbuhan usaha cenderung terbatas hanya pada area lokal. Selain itu, promosi produk atau layanan juga menjadi kurang maksimal karena UMKM tidak memanfaatkan strategi digital yang dapat disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan target pasar. Akibatnya, UMKM berisiko kalah bersaing dan tertinggal dengan pelaku usaha lainnya yang lebih aktif dan melek terhadap pemasaran digital.

Peran Teknologi Digital dalam Pemasaran Komunitas

Meningkatnya pertumbuhan teknologi digital yang begitu pesat dapat mempengaruhi perilaku konsumen, dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari referensi dan melakukan pembelian produk dan jasa melalui platform online (Hikmah & Wijaya, 2023). Saat ini konsumen lebih cenderung lebih aktif menggunakan media sosial untuk mencari informasi, membaca ulasan produk, dan membandingkan harga sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah produk. Sehingga transformasi digital dalam pemasaran komunitas penting menjadi perhatian yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Media Sosial sebagai Sarana Promosi

Platform digital seperti TikTok, Facebook dan Instagram dalam sebagai sarana promosi mampu memviralkan produk komunitas lokal melalui konten visual yang

menarik dan storytelling berbasis lokalitas. Studi oleh Suryani dkk. (2020) menunjukkan bahwa UMKM berbasis desa yang aktif menggunakan Instagram mengalami peningkatan dalam penjualan rata-rata 35% dalam satu tahun.

b. Marketplace dan *E-commerce* Lokal

Platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan marketplace berbasis komunitas seperti BukaLapak, Pasardesa.id yang pernah dikembangkan di Desa Panggungharjo memungkinkan pelaku lokal menjangkau konsumen nasional bahkan internasional, dengan adanya platform tersebut komunitas dapat melakukan penjualan komoditas/produk mereka tanpa perlu memiliki toko fisik.

c. Pembayaran Digital

Sistem pembayaran non tunai (*cashless*) seperti QRIS, GoPay, OVO, dan DANA saat ini sangat membantu efisiensi dalam transaksi, terutama di masa pasca-pandemi. Hal ini juga meningkatkan transparansi keuangan dan memudahkan pencatatan usaha komunitas lokal.

d. *Branding* Lokal Berbasis Cerita (*Storytelling*)

Salah satu strategi dalam penjualan di era digital yaitu dengan metode branding berbasis cerita. Storytelling yang mengangkat cerita asal-usul dari produk lokal, tokoh petani atau nelayan, serta nilai-nilai lokal yang diangkat dalam produk tersebut menjadi strategi kunci dalam membedakan produk komunitas lokal dari produk massal. Hal tersebut menjadi salah satu strategi untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang dikembangkan komunitas.

Tantangan Implementasi Digitalisasi

Meski pemasaran digital mempunyai banyak keuntungan, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dalam mengadopsi digitalisasi yang dihadapi di komunitas lokal diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Literasi Digital

Sebagian besar pelaku usaha komunitas petani/nelayan/UMKM belum terbiasa dan familiar dengan teknik pemasaran digital, pemahaman penggunaan algoritma, serta manajemen platform online. Sehingga rendahnya literasi digital ini masih menjadi permasalahan dalam implementasi digitalisasi pemasaran pada komunitas lokal.

b. Keterbatasan Infrastruktur

Masih banyak wilayah desa masih menghadapi kendala jaringan digital seperti koneksi internet yang lemah, listrik yang tidak stabil, serta minimnya dukungan teknis dan infrastruktur khususnya di daerah pedesaan dan pedalaman.

c. Kebutuhan Pelatihan Berkelanjutan

Digitalisasi membutuhkan proses yang panjang dan tidak sekali jadi, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas SDM dalam komunitas lokal seperti petani/nelayan/UMKM melalui pelatihan intensif dan keberlanjutan pendampingan agar mereka dapat mandiri dalam mengelola pemasaran mengimplementasikan digitalisasi pemasaran.

Tabel 8. 1 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani dan Kelompok Tani

Kelembagaan	Jumlah (kelompok)
KEP	12.429
Koperasi Pertanian	4.544
Perseroan Terbatas	21
CV	30
KUB	3.820
LKMA	2.145
Lainnya	1.869
Poktan	720.307
Gapoktan	64.522

Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, 2022

➤ **Penguatan Kelembagaan Lokal: Kelompok Tani, Nelayan, UMKM**

Konsep Kelembagaan Lokal dalam Ekonomi Komunitas

Kelembagaan lokal seperti kelompok tani, koperasi nelayan, serta asosiasi UMKM memiliki peran penting dalam struktur interaksi ekonomi komunitas. Dalam kerangka ekonomi komunitas, kelembagaan menjadi sarana untuk meng-organisasi sumberdaya, membangun solidaritas sosial, meningkatkan efisiensi dan daya tawar pelaku ekonomi kecil. Kelembagaan lokal tersebut meliputi struktur formal dan informal yang ada dalam komunitas untuk mengatur aktivitas ekonomi secara kolektif, termasuk didalamnya aktivitas produksi, distribusi, dan juga aktivitas pemasaran.

Pusat Penyuluhan Pertanian (2017) menyatakan bahwa kriteria umum dalam pengembangan kelembagaan tani menjadi KEP antara lain: (1) luas lahan usaha berkisar 200-3.200 ha, mengacu pada skala ekonomi berbasis kawasan per komoditas; (2) dibentuk dari 2 hingga 3

kelompok tani/Gabungan kelompok tani (gapoktan) yang disesuaikan berdasarkan batasan wilayah kerja pemerintahan setingkat kecamatan; dan (3) kegiatan usaha dilakukan mulai dari hulu hingga hilir dengan menerapkan prinsip agribisnis dan sifat usaha yang berkelanjutan. Kelembagaan petani dan kelompok tani saat ini semakin berkembang, berikut merupakan data perkembangan kelembagaan ekonomi petani seperti terlampir pada tabel 8.1.

Tantangan lainnya adalah ketergantungan yang cukup besar pada satu sosok pemimpin atau tokoh sentral dalam komunitas. Ketika pemimpin tersebut tidak lagi aktif, kinerja kelembagaan pun cenderung menurun karena tidak adanya regenerasi yang jelas. Di sisi lain, struktur organisasi yang tidak pernah diperbarui juga membuat lembaga kesulitan dalam beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Semua tantangan ini perlu disikapi secara serius agar kelembagaan lokal dapat berperan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan di tingkat komunitas.

Tantangan lainnya yaitu kelembagaan petani belum secara aktif menjalin kerja sama/ kemitraan dengan berbagai pihak guna memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usahanya. Hubungan kemitraan ini mencakup Dinas atau lembaga terkait yang memberikan pelatihan serta dukungan teknis bagi petani, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu-isu pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, koperasi yang mewadahi petani juga perlu bekerja sama dengan pembeli lokal dan eksportir guna menjamin pemasaran produk secara berkelanjutan. Di sisi lain, kemitraan dengan lembaga keuangan mikro dan

perbankan juga dijalin untuk mempermudah akses anggota terhadap pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau. Seluruh jejaring kerjasama ini berkontribusi besar dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan petani sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok agribisnis (Prasekti dkk, 2025).

➤ **Transformasi Koperasi dan Kelembagaan Lokal**

Koperasi merupakan lembaga ekonomi kolektif yang berazaskan pada prinsip keadilan sosial dan gotong royong. Koperasi memiliki peran penting yaitu sebagai wadah para anggotanya untuk produksi, akses permodalan, distribusi barang, dan bahkan pada negosiasi harga. Dalam sistem ekonomi, kelembagaan koperasi mempunyai manfaat guna memperoleh daya tawar yang lebih tinggi.

Sebelumnya telah banyak berdiri koperasi lokal berupa Koperasi Unit Desa (KUD), yang kini menghadapi berbagai tantangan struktural dan manajerial, seperti manajemen pengelolaan yang masih konvensional, minim inovasi digital dimana KUD belum memiliki sistem informasi dan keuangan berbasis digital, kurangnya transparansi terhadap informasi keuangan dan keputusan organisasi dalam KUD, dan tidak menarik generasi muda.

Arah Transformasi Koperasi: Menuju Koperasi Desa Merah Putih

Upaya menjawab berbagai permasalahan kelembagaan lokal, maka pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM saat ini mulai mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih, hal tersebut dimaksudkan sebagai transformasi koperasi konvensional menuju koperasi yang lebih modern berbasis komunitas lokal dan pengembangan teknologi digital.

Transformasi koperasi menuju Koperasi Desa Merah Putih mencakup empat arah strategis. Pertama, Digitalisasi Sistem Keanggotaan dan Akuntansi yang mencakup penggunaan aplikasi koperasi digital untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pencatatan simpanan/pinjaman, dan transparansi laporan keuangan. Kedua, Koperasi sebagai agregator pasar dan logistik sehingga koperasi bukan hanya sekadar lembaga simpan pinjam, akan tetapi koperasi dikembangkan sebagai agregator hasil pertanian dan produk UMKM untuk disalurkan ke pasar domestik/lokal maupun ekspor. Ketiga, kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan *Startup*: sinergi antara koperasi dengan BUMDes, inkubator bisnis kampus, dan startup logistik seperti TaniHub akan memungkinkan koperasi masuk dalam ekosistem ekonomi digital sehingga diharapkan digitalisasi kelembagaan dapat berkembang pesat. Keempat, transformasi kelembagaan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan anggota, karena koperasi berfokus bukan sekadar mengejar laba akan tetapi berfokus pada pemberdayaan para anggotanya.

➤ **Rantai Pasok Inklusif dan Peran Gender**

Rantai pasok inklusif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem rantai pasok yang menekankan kesetaraan akses untuk semua pihak, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi dan gender. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas lokal diperlukan keterlibatan perempuan di dalam rantai pasok. Rantai pasok inklusif membuka kesempatan yang setara kepada semua pelaku usaha, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti petani kecil, nelayan, UMKM kecil dan perempuan.

Rantai pasok inklusif tidak hanya berfokus di pemberdayaan ekonomi semata akan tetapi diharapkan juga berfokus pada pelatihan keterampilan, dan keadilan dalam distribusi hasil produksi serta akses pasar. Sehingga setiap individu yang terlibat dalam rantai pasok (*supply chain*) dapat memperoleh keuntungan yang adil dan mempunyai kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam setiap tahap produksi dan distribusi barang.

Peran Gender dalam Rantai Pasok Inklusif

Memahami cara pandang perempuan terhadap pembangunan merupakan hal yang penting, apalagi jika desa/wilayah tersebut mengusung semangat emansipasi dan inklusivitas. Keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan direncanakan ke depan, karena salah satu tujuan pembangunan adalah memastikan partisipasi aktif perempuan. Cara perempuan memaknai pembangunan bisa beragam, dan perbedaan perspektif ini dapat memengaruhi sejauh mana perempuan terlibat dan merasa terdorong untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan.

Olii & Nanggong (2022) bahwa Faktor gender memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal akses terhadap kredit. Perbedaan gender dapat mengurangi dampak positif akses kredit hingga 75% bagi UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pola yang berbeda dalam mendapatkan pinjaman. Namun, pada tiga aspek inklusi keuangan lain seperti kepemilikan rekening, kebiasaan menabung, dan penerimaan bantuan keuangan, perbedaan gender ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan.

Pada banyak kasus yang ditemukan, perempuan seringkali mengalami kendala yang disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya:

- a. Terbatasnya akses modal: banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan untuk pengembangan usaha kecil mereka.
- b. Pembagian kerja yang tidak adil: perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan yang tidak terhitung dalam perhitungan secara ekonomi formal, sebagai contoh seperti pekerjaan rumah tangga yang secara ekonomi tidak diperhitungkan.
- c. Terbatasnya akses informasi: masih banyak perempuan yang kekurangan akses ke informasi terkait pasar dan teknologi terbaru yang mampu mendukung peningkatan produksi dan pemasaran. Terbatasnya akses informasi tentunya menjadikan produksi hanya terbatas pada lokal dan pemasaran juga terbatas komunitas lokal.

➤ **Transformasi Digital dalam Rantai Pasok Komunitas**

Transformasi digital telah mengubah cara kerja rantai pasok pertanian, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dalam konteks rantai pasok komunitas, pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, trans-paransi, dan daya saing petani serta kelembagaan lokal. Integrasi antara digital *supply chain*, agritech, smart agriculture, dan koperasi digital menjadi elemen penting dalam membangun sistem agribisnis yang lebih modern dan berkelanjutan.

Digital *supply chain* merupakan sistem rantai pasok yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan seluruh pelaku agribisnis, mulai dari

petani, penyedia input, pengolah, distributor, hingga konsumen. Melalui sistem ini, informasi mengenai produksi, harga, permintaan pasar, dan distribusi dapat diakses secara cepat dan real-time sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat serta mengurangi inefisiensi dalam rantai pasok.

Penerapan digital *supply chain* didukung oleh perkembangan agritech (*agricultural technology*), yaitu penggunaan berbagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Teknologi seperti aplikasi pertanian digital, sensor, drone, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan analisis data membantu petani mengelola usaha tani secara lebih efektif, mulai dari perencanaan produksi hingga pemasaran hasil panen.

Salah satu bentuk penerapan *agritech* adalah *smart agriculture* atau pertanian cerdas. Konsep ini memanfaatkan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), sensor, dan analisis data untuk memantau kondisi lahan dan tanaman secara real-time. Dengan pendekatan ini, petani dapat mengoptimalkan penggunaan input produksi, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi risiko usaha. Selain itu, data yang dihasilkan juga mendukung perencanaan distribusi dan pemasaran dalam sistem rantai pasok.

Transformasi digital dilihat dari sisi kelembagaan akan mendorong lahirnya koperasi digital sebagai bentuk modernisasi organisasi ekonomi petani. Koperasi digital memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keanggotaan, transaksi, pemasaran, dan layanan usaha. Melalui platform digital, koperasi dapat memperkuat koordinasi antaranggota, memperluas akses pasar, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan organisasi.

Integrasi digital *supply chain*, *agritech*, *smart agriculture*, dan koperasi digital menciptakan ekosistem agribisnis yang lebih terhubung dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Sinergi tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai pasok, tetapi juga memperkuat posisi tawar petani, memperluas akses teknologi dan pasar, serta mendukung pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan

➤ **Daftar Pustaka**

- Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (6th ed.). Pearson Education.
- Hikmah, L. S., & Wijaya, R. S. (2023). Digitalisasi Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM Di Kota Sidoarjo. *Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 54–59. <https://doi.org/10.31506/komunitas:jpkm.v3i2.21016>
- Olii, N., & Nanggong, A. (2022). Peran Literasi Keuangan, Perbedaan Gender dan Inklusi Keuangan terhadap Kapabilitas Pemasaran UMKM. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7, 41–55. <https://doi.org/10.23917/benefit.v7i2.1488>
- Prasekti dkk. (2025). Peran kelembagaan petani dalam peningkatan daya saing agribisnis kopi di daerah pegunungan kecamatan sendang kabupaten tulungagung. 11(1), 30–41.
- Pusat Penyuluhan Pertanian (PPP), 2022, Mengenal Lebih Dekat Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP),

Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP-Kementan.
Jakarta: 32

Pusat Penyuluhan Pertanian (2017). Pedoman
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Petani (BUMP). Pusat Penyuluhan Pertanian-
BPPSDMP-Kementan. Jakarta

Suryani, D., Indriani, N., & Hidayat, R. (2020).
Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana
Pemasaran Produk UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal
Komunikasi dan Pemasaran Digital*, 2(2), 78–90.

BAB 9

PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF UNTUK GENERASI DIGITAL

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami pentingnya pendidikan abad ke-21, literasi digital, literasi kecerdasan buatan (AI literacy), dan kewargaan digital (digital citizenship) dalam mendukung pemberdayaan generasi digital.
- b. Menganalisis strategi pemberdayaan berbasis teknologi dan komunitas, termasuk penguatan peran sekolah, perguruan tinggi, komunitas, mahasiswa, serta pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan akses terhadap bidang STEM.
- c. Mengevaluasi penerapan nilai keadilan sosial dan inklusivitas serta memahami prinsip dan tahapan model pemberdayaan berbasis masyarakat dalam mewujudkan transformasi sosial yang berkelanjutan.

➤ Pendidikan dan Literasi Teknologi untuk Pemberdayaan

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat belajar, bekerja, dan berinteraksi. Dalam konteks tersebut, pendidikan dan literasi teknologi menjadi fondasi penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi digital. Literasi teknologi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Techataweewan & Prasertsin, 2018).

Pendidikan abad ke-21 menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*), kreativitas (*creativity*), komunikasi (*communication*), dan kolaborasi (*collaboration*). Kompetensi tersebut diperlukan agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan solusi berbasis teknologi bagi masyarakat (Kim, 2024).

Perkembangan AI juga mendorong pentingnya AI literacy atau literasi kecerdasan buatan. AI literacy mencakup kemampuan memahami cara kerja AI, mengevaluasi informasi digital secara kritis, memahami etika penggunaan teknologi, dan memanfaatkan AI untuk mendukung pengambilan keputusan (Ng dkk., 2021). Dalam sektor pertanian, AI dapat dimanfaatkan untuk prediksi cuaca, pemantauan tanaman, hingga pemasaran digital produk pertanian.

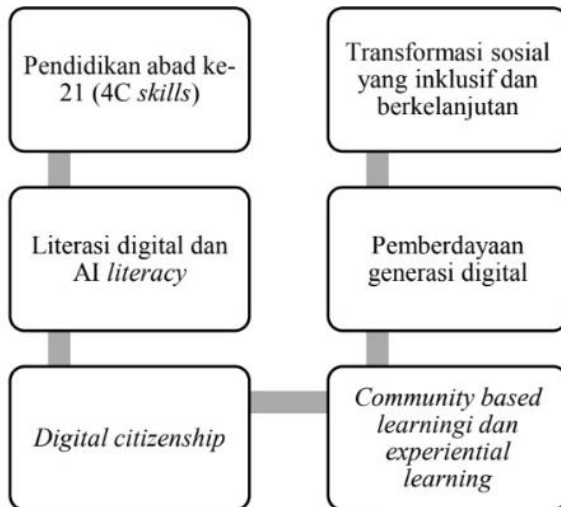
Selain itu, pendidikan digital perlu mengembangkan digital citizenship atau kewargaan digital. Digital citizenship menekankan penggunaan teknologi secara etis, aman, bertanggung jawab, dan produktif dalam kehidupan sosial (Ghamrawi, 2018). Penguatan digital citizenship penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi seperti *cyberbullying*, pelanggaran privasi, dan penyebaran hoaks.

Strategi pendidikan dan literasi teknologi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

- a. Pelatihan berbasis komunitas melalui sekolah lapang, pelatihan petani ke petani, dan pendampingan digital yang bersifat partisipatif (Gusmoi dkk., 2024).
- b. Integrasi teknologi digital dalam penyuluhan melalui aplikasi mobile, cyber extension, platform e-learning, dan grup komunikasi digital untuk memperluas akses informasi masyarakat (Sugihono dkk., 2024).

- c. Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam penyelesaian masalah nyata di lapangan (Wahyu dkk., 2024).
- d. Project-Based Learning dan Community-Based Learning yang memungkinkan peserta didik belajar melalui proyek nyata berbasis kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan pemecahan masalah (Albar & Southcott, 2021).

Melalui pendekatan tersebut, pendidikan dan literasi teknologi tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, tetapi juga membangun kapasitas kritis, adaptif, dan kolaboratif dalam menghadapi perubahan sosial di era digital. Berikut disajikan model pemberdayaan transformatif generasi digital untuk memperjelas hubungan antara pendidikan abad ke-21, literasi digital, AI literacy, digital citizenship, dan pembelajaran berbasis komunitas dalam proses pemberdayaan generasi digital pada Gambar 9.1.



Gambar 9. 1 Model Pemberdayaan Transformatif Generasi Digital

Sumber: Diadaptasi dari Kim (2024); Albar & Southcott (2021); Ng dkk., (2021); & Ghamrawi (2018).

➤ Integrasi Nilai-nilai Keadilan Sosial dan Inklusivitas

Pemberdayaan masyarakat di era digital harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Transformasi digital yang tidak disertai pemerataan akses berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Keadilan sosial berkaitan dengan distribusi akses yang adil terhadap pendidikan, teknologi, informasi, dan sumber daya pembangunan. Sementara itu, inklusivitas menekankan pentingnya pelibatan seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Rusy & Fathy (2019) menjelaskan bahwa modal sosial berupa jaringan, norma, dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang inklusif. Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat menjadi subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar penerima program.

White (2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan yang mengintegrasikan keadilan sosial dan inklusivitas memiliki tiga dimensi utama, yaitu *capacity*, *representation*, dan *access to resources*. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya.

Dalam era digital, prinsip inklusivitas juga harus diwujudkan melalui pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu dirancang secara partisipatif, responsif gender, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

➤ **Peran Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Komunitas dalam Pemberdayaan**

Pemberdayaan generasi digital memerlukan kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta. Dalam era *society 5.0*, institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kapasitas sosial dan transformasi masyarakat.

Tabel 9. 1 Peran Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Komunitas dalam Pemberdayaan Generasi Digital

Aktor	Peran Utama	Contoh Implementasi
Sekolah	Mengembangkan kompetensi abad ke-21, literasi digital, dan digital citizenship.	Pembelajaran berbasis komunitas, program sekolah peduli lingkungan, urban farming, serta kewirausahaan sosial dan pendampingan UMKM lokal.
Perguruan Tinggi	Memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	KKN, pengabdian masyarakat, project-based learning, penelitian terapan, pendampingan UMKM digital, dan program literasi digital.
Komunitas	Menjadi penggerak partisipasi masyarakat, fasilitator pembelajaran, dan ruang kolaborasi sosial.	Pelatihan literasi digital, pengembangan keterampilan teknologi, serta inovasi berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

Sumber: Tangül & Soykan (2021); Huang dkk.

➤ **Pemberdayaan Perempuan dan Akses Terhadap STEM**

Pemberdayaan perempuan dalam bidang STEM merupakan bagian penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan meningkat, kesenjangan gender di bidang STEM masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Verdugo-Castro dkk., (2022) representasi perempuan dalam bidang STEM secara global masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh stereotip gender, minimnya role model perempuan, keterbatasan dukungan sosial, serta ketimpangan akses pendidikan.

Dalam era transformasi digital, penguatan akses perempuan terhadap STEM menjadi semakin penting karena perkembangan ekonomi digital membutuhkan keterampilan teknologi dan inovasi. UNESCO (2021); Zhou dkk., (2025); & Figueroa & Lemus (2025) mengemukakan strategi pemberdayaan perempuan dalam bidang STEM dapat dilakukan melalui:

- a. Pendidikan STEM yang inklusif dan responsif gender;
- b. Program mentoring dan role model perempuan;
- c. Penguatan literasi digital dan AI literacy;
- d. Penyediaan beasiswa pendidikan STEM;
- e. Pengembangan komunitas belajar digital perempuan.

Penguatan perempuan dalam bidang STEM tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi masyarakat secara lebih luas.

➤ **Model Pemberdayaan Berbasis Masyarakat**

Model pemberdayaan berbasis masyarakat (community-based empowerment) merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Pendekatan ini berangkat dari paradigma *bottom-up* yang menekankan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal, kapasitas, dan potensi untuk menyelesaikan per-soalannya sendiri (Filho dkk., 2018). Tahapan pemberdayaan berbasis masyarakat Ledwith (2020) meliputi:

- a. **Penyadaran dan Pengorganisasian Masyarakat**
Tahap ini bertujuan membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi.
- b. **Pengembangan Kapasitas**
Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran partisipatif untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
- c. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal**
Tahap ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal baik material maupun nonmaterial untuk mendukung keberlanjutan program.
- d. **Penguatan Jaringan Kemitraan**
Kemitraan multipihak antara pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memperkuat program pemberdayaan.
- e. **Penguatan Kelembagaan Lokal**
Kelembagaan lokal yang kuat memungkinkan masyarakat mampu mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan partisipatif, pemberdayaan berbasis masyarakat mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era digital. Meskipun demikian, implementasi pemberdayaan digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital masyarakat, ke-terbatasan infrastruktur teknologi, serta ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antarwilayah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan sektor swasta menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dapat berlangsung secara inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

➤ **Daftar Pustaka**

- Albar, S. B., & Southcott, J. (2021). Problem and Project-based Learning through An Investigation Lesson: Significant Gains in Creative Thinking Behaviour within The Australian Foundation (Preparatory) Classroom. *Thinking Skills and Creativity*, 41(100853).
- Figueroa, C. J. P., & Lemus, M. A. A. (2025). Mentoring Women in STEM: Empowering through Social Technologies for Enhanced Inclusivity and Professional Growth. A Case Study. *Frontiers in Education*, 10, 1512143. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1512143>
- Filho, W. L., Raath, S., Lazzarini, B., Vargas, V. R., Souza, L. De, Anholon, R., Quelhas, O. L. G., Haddad, R., Klavins, M., & Orlovic, V. L. (2018). The Role of Transformation in Learning and Education for Sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 199, 286–295. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.017>
- Ghamrawi, N. A. R. (2018). Schooling for Digital Citizens. *Open Journal of Leadership*, 7, 209–224. <https://doi.org/10.4236/ojl.2018.73012>
- Gusmoi, M. S. T., Gifari, M. Z. Al, & Budiawan, A. (2024). Pelatihan Pertanian Berbasis Komunitas dalam Mendorong Inovasi dan Kemandirian Petani di Desa Baregbeg Kabupaten Ciamis. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(3), 1353–1361. <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/jai.v4i3.835>

- Huang, B., Jong, M. S., King, R. B., Chai, C., & Jiang, M. Y.-C. (2022). Promoting Secondary Students' Twenty-First Century Skills and STEM Career Interests Through a Crossover Program of STEM and Community Service Education. *Frontiers in Psychology*, 13, 903252. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.903252>
- Kim, M. (2024). A Snapshot of Creativity in PK-12 Education Policies and Practices in the United States. *Creative Education*, 15, 1399–1442. <https://doi.org/10.4236/ce.2024.157085>
- Ledwith, M. (2020). *Community Development: A Critical and Radical Approach* (3rd ed.). Policy Press. <https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/community-development-4>
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, K. W. S., & Qiao, M. S. (2021). AI Literacy: Definition, Teaching, Evaluation and Ethical Issues. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 504–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pa2.487>
- Ratten, V., & Usmanij, P. (2021). Entrepreneurship Education: Time for A Change in Research Direction? *The International Journal of Management Education*, 19, 100367. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100367>
- Rusy, & Fathy. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>

- Setiadi, D., Nurhayati, S., Ansori, Zubaidi, M., & Amir, R. (2023). Literasi Digital Pemuda dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. *Society*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.33019/society.v11i1.491>
- Sugihono, C., Hariadi, S. S., & Wastutiningsih, S. P. (2024). Integrasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Layanan Penyuluhan Pertanian. *Jurnal Penyuluhan*, 20(02), 178–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.25015/20202450736>
- Sutrisno, A. J., Satiani, L. N., Sitorus, D. S., & Zebua, D. D. N. (2024). Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Sumberejo untuk Mendukung Terciptanya Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1777–1781. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3944>
- Tangül, H., & Soykan, E. (2021). Comparison of Students' and Teachers' Opinions Toward Digital Citizenship Education. *Frontiers in Psychology*, 12, 752059. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.752059>
- Techataweewan, W., & Prasertsin, U. (2018). Development of Digital Literacy Indicators for Thai Undergraduate Students using Mixed Method Research. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(2), 215–221. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.07.001>
- UNESCO. (2021). Cracking the Code: Girls' and Women's Education in STEM. UNESCO Publishiing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377251?utm_source=chatgpt.com

- Verdugo-Castro, S., Garcia-Holgado, A., & Sanchez-Gomez, M. C. (2022). The Gender Gap in Higher STEM Studies: A Systematic Literature Review. *Heliyon*, 8, e10300. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10300>
- Wahyu, Maswadi, & Hutajulu, J. P. (2024). Pemberdayaan Petani Berbasis Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Innitiative (READSI) di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 8(1), 326–341. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.08.01.27>
- White, B. (2020). *Agriculture and The Generation Problem*. Practical Action Publishing Ltd. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3362/9781780447421>
- Zhou, C., Petri, S. M. R., & Bhattacharyya, S. (2025). *AI Roles and Responsibilities in Education* (S. Papadakis (ed.)). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-96855-6_3.

BAB 10

STRATEGI IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIGITAL

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep dasar, peluang, dan tantangan dalam implementasi pemberdayaan masyarakat digital.
- b. Merancang dan menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis digital secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
- c. Mengevaluasi dampak program digitalisasi serta mengembangkan kemitraan strategis untuk mendukung keberlanjutan program.

➤ Prinsip Desain Program Pemberdayaan Inklusif

Desain program pemberdayaan inklusif merupakan proses perencanaan yang menjamin partisipasi aktif, akses setara, dan manfaat adil bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, miskin, lansia, adat, dan minoritas lainnya. Pendekatan tersebut dapat mempertimbangkan keberagaman kapasitas individu, bahasa, budaya, gender, usia, serta perbedaan lainnya (Firnanda dkk., 2025), dan bertujuan membangun lingkungan yang ramah, terbuka, serta mudah diakses bagi semua peserta, termasuk individu dengan disabilitas (GDI Hub, 2022). Desain

inklusif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga menjamin proses yang adil, terbuka, dan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama kelompok rentan, dengan menekankan partisipasi aktif serta rasa dihargai dan didukung. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan etis dan praktis agar program berdampak secara merata dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini yaitu terdiri dari:

a. Prinsip Partisipatif

Program yang inklusif harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan: mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi tersebut bukan sekadar konsultasi formal, melainkan keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal.

b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Akses

Program harus menjamin bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, status sosial-ekonomi, atau budaya memiliki akses yang setara terhadap manfaat program. Kesetaraan bukan berarti perlakuan yang sama melainkan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu seperti menyediakan materi pelatihan dalam bentuk braille atau audio untuk peserta tunanetra atau menyediakan pelatihan di waktu yang fleksibel bagi ibu rumah tangga.

c. Prinsip Non-Diskriminasi

Pemberdayaan inklusif harus menghindari segala bentuk diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencakup pencegahan terhadap prasangka berdasarkan gender, agama, ras, status disabilitas, orientasi seksual, atau perbedaan budaya. Program

yang baik tidak hanya netral terhadap perbedaan tetapi juga proaktif dalam menciptakan ruang yang aman dan ramah bagi kelompok marginal.

d. Prinsip Berbasis Kebutuhan (*Need-Based*)

Desain program yang efektif harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan nyata masyarakat sasaran. Pendekatan ini menghindari pola top-down yang sering kali mengabaikan konteks lokal. Identifikasi kebutuhan harus dilakukan melalui riset partisipatif, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara, atau survei sosial. Program yang berbasis kebutuhan cenderung lebih relevan dan memiliki dampak jangka panjang.

e. Prinsip Berkelanjutan (*Sustainability*)

Inklusivitas tidak akan bermakna jika program hanya bersifat sementara. Desain program harus memikirkan aspek keberlanjutan, baik dalam bentuk kapasitas individu, kelembagaan lokal, maupun keberlanjutan finansial

f. Prinsip Adaptif terhadap Konteks Lokal

Program pemberdayaan inklusif harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan geografis pada masyarakat sasaran. Prinsip ini menuntut desainer program untuk menghormati kearifan lokal, bahasa daerah, norma sosial, dan struktur kekuasaan yang ada. Adaptasi menjadi kunci agar program diterima dan diadopsi secara luas oleh masyarakat.

➤ **Sinergi Multi-Stakeholder: Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Swasta**

Sinergi *multi-stakeholder* yaitu bentuk kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak (pemerintah, akademisi, komunitas, dan swasta) untuk menyelesaikan permasalahan bersama secara lebih efektif, efisien, dan

berkelanjutan. Afriansyah (2023), keberagaman aktor dapat meng-optimalkan sumber daya guna menciptakan keunggulan kompetitif. Setiap stakeholder berkontribusi sesuai peran dan keahliannya, sehingga menghasilkan solusi yang komprehensif, terintegrasi, dan berdampak luas. Pendekatan ini menekankan komunikasi, partisipasi, dan koordinasi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Sirait & Noer (2021) menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai komponen vital keberhasilan implementasi kebijakan, sementara kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah menjadi hambatan struktural utama di Indonesia yang menunjukkan urgensi pendekatan kolaboratif di setiap tahap implementasi kebijakan untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 10.1.



Gambar 10. 1 Empat aktor dalam Sinergi *Multi-Stakeholder*

Gambar 10.1 menunjukkan bahwa ada empat aktor ini memiliki peran strategis yang saling melengkapi meliputi:

a. Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia kebijakan berkelanjutan yang mendukung ekosistem pembangunan melalui infrastruktur, regulasi pro-rakyat, insentif fiskal, dan pemberdayaan. Pemerintah juga harus menciptakan ekosistem partisipatif yang transparan dan terbuka, dengan memahami aspirasi masyarakat serta memanfaatkan teknologi digital secara tepat. Partisipasi bermakna dibangun lewat komunikasi berkelanjutan (forum, survei, pertemuan langsung) dan respons adaptif terhadap perubahan. Agar kebijakan tetap relevan, peningkatan literasi digital warga menjadi prioritas untuk mewujudkan partisipasi yang efektif dan inklusif (Mannayong dkk., 2024).

b. Akademisi

Lembaga pendidikan tinggi dan para peneliti memiliki peran dalam menyediakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kajian ilmiah sehingga dapat menjadi dasar kebijakan dan inovasi. Akademisi terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu mengembangkan kapasitas lokal dan mentransformasikan pengetahuan menjadi solusi yang aplikatif.

c. Komunitas (Masyarakat)

Komunitas atau masyarakat merupakan aktor utama dan penerima manfaat dari setiap inisiatif pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Peran komunitas tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki potensi lokal, kearifan lokal, dan kekuatan sosial untuk mendukung keberhasilan program.

d. Swasta

Sektor swasta memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya, inovasi, dan jaringan distribusi. Pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau *shared value*, sektor swasta dapat mendukung pengembangan masyarakat sekaligus memperoleh manfaat bisnis yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan sektor swasta juga membuka peluang peningkatan skala dampak dan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Sinergi antar *stakeholder* (pemerintah, akademisi, komunitas, swasta) memungkinkan pendekatan holistik dalam menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kolaborasi memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program karena setiap pihak memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Sebaliknya, program tanpa sinergi cenderung sektoral, terfragmentasi, dan berisiko gagal mencapai tujuan jangka panjang. Partisipasi masyarakat yang optimal memerlukan pendekatan yang berpusat pada masyarakat serta memperhatikan kondisi lokal. Keterlibatan berbagai pihak juga memungkinkan pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan keberhasilan program secara keseluruhan.

➤ **Roadmap Pemberdayaan Digital**

Menurut Pratama dkk. (2025) adopsi teknologi tanpa perencanaan bertahap justru berisiko memperlebar jurang digital (*digital divide*). Oleh karena itu, Roadmap Pemberdayaan Digital disusun sebagai panduan strategis jangka panjang yang menjembatani kesenjangan akses teknologi menuju masyarakat yang mandiri secara digital. Tahapan dalam peta jalan ini dirancang secara ber-

kesinambungan, yang visualisasinya dapat dilihat pada Gambar 10.2.



Gambar 10. 2 Tahapan Tahunan Roadmap Pemberdayaan Digital

Gambar 10.2 menunjukkan bahwa transformasi digital masyarakat berlangsung secara evolutif yang terdiri dari empat fase utama:

a. Fase Penguatan Fondasi dan Aksesibilitas

Fokus utama pada tahun pertama adalah pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan akses internet yang terjangkau bagi wilayah marginal. Bersamaan dengan itu, dilakukan kampanye literasi digital dasar guna memutus mata rantai buta teknologi, serta sosialisasi mengenai pentingnya ruang digital yang aman dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Fase Kapasitasi dan Adopsi Tekno-Kreatif

Setelah akses tersedia, fokus bergeser pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keterampilan digital tingkat lanjut. Program di fase ini diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk produktivitas ekonomi, seperti pelatihan *e-commerce*, manajemen konten digital, dan penggunaan aplikasi

penunjang profesi lokal (misalnya aplikasi pertanian atau nelayan pintar).

c. Fase Kolaborasi Inovatif dan Kemandirian

Pada fase ini, komunitas yang telah terdigitalisasi didorong untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam menciptakan inovasi lokal. Fokus utamanya adalah pembentukan ekosistem ekonomi digital mandiri, penguatan kelembagaan komunitas, serta integrasi teknologi dalam tata kelola pelayanan publik berbasis warga (*smart community*).

d. Fase Keberlanjutan dan Replikasi Dampak

Tahap akhir dari roadmap ini adalah memastikan keberlanjutan program secara finansial dan operasional. Komunitas lokal dipersiapkan untuk menjadi mentor bagi wilayah lain, sehingga praktik baik pemberdayaan digital yang telah sukses dapat direplikasi secara masif di tingkat regional maupun nasional.

➤ Indikator Keberhasilan Program

Indikator Keberhasilan Program adalah alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan program, mencakup aspek input, proses, *output*, *outcome*, dan dampak. Dimensinya meliputi: (1) KPI (kuantitatif & kualitatif) untuk efisiensi dan efektivitas; (2) partisipasi masyarakat (misalnya Program Kotaku dari konsultasi hingga *delegated power*); (3) keberlanjutan program (adanya kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan serta kegiatan rutin); (4) inklusi sosial (rekognisi, partisipasi, resiliensi, akomodasi); dan (5) kualitas kebijakan (Indeks Kualitas Kebijakan dari LAN yang menilai perencanaan, formulasi, implementasi, dan evaluasi). Evaluasi kinerja juga menekankan pendekatan *mixed-methods* untuk menguji apakah program secara plausibel menyebabkan perubahan *outcome*.

➤ Monitoring, Evaluasi, dan Replikasi Praktik Baik

Keberhasilan suatu program pembangunan atau pemberdayaan tidak hanya ditetapkan oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan, melainkan juga oleh sejauh mana program tersebut dimonitor, dievaluasi, dan direplikasi. Ketiga elemen tersebut menjadi fondasi penting dalam menjamin akuntabilitas, pembelajaran berkelanjutan, dan perluasan dampak positif dari suatu program dapat dilihat pada Gambar 10.3.



Gambar 10. 3 Tiga Tahapan dalam Menjamin Akuntabilitas

Gambar 10.3 menunjukkan bahwa ketiga tahapan memiliki peranan penting dalam menjamin akuntabilitas, pembelajaran berkelanjutan, dan perluasan dampak dari program. Program, proses evaluasi dan monitoring merupakan bagian integral yang melekat pada setiap tahapan pelaksanaan. Sejak tahap perencanaan dimulai, fungsi evaluasi sudah harus diterapkan untuk menilai proses dan hasil perencanaan itu sendiri.

a. Monitoring (Pemantauan)

Monitoring merupakan proses sistematis untuk mengamati dan mencatat perkembangan pelaksanaan program secara berkala, guna memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, waktu, dan anggaran. Monitoring dalam pelaksanaan dapat mengidentifikasi hambatan atau penyimpangan sejak dini untuk mengambil tindakan korektif secara cepat, serta menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Monitoring berfungsi sebagai sistem pengawasan berkala sejak tahap awal pelaksanaan, memberikan informasi secara nyata mengenai capaian, hambatan, dan efektivitas pelaksanaan. Monitoring yang sistematis memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan perbaikan cepat terhadap deviasi yang terjadi selama pelaksanaan program.

b. Evaluasi

Evaluasi yaitu proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur hasil, dampak, efisiensi, dan relevansi program secara keseluruhan, baik selama pelaksanaan (evaluasi formatif) maupun setelah program selesai (evaluasi sumatif). Evaluasi bertujuan menilai sejauh mana tujuan tercapai, menganalisis faktor keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh tim pelaksana atau eksternal oleh pihak independen agar hasilnya lebih kredibel dan akuntabel. Menurut (Alfiana, Suwandi, Natalia Reyne Lumentah, Samuel PD Anantadjaya, 2023), evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai perkembangan dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan sedangkan (Olivia, 2021) menekankan bahwa evaluasi merupakan penilaian objektif dan sistematis terhadap proyek atau program untuk

mengukur pencapaian tujuan dan dampaknya bagi masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan suatu pendekatan layak diteruskan, dihentikan, atau diperbaiki.

c. Replikasi Praktik Baik (*Best Practices*)

Replikasi praktik baik merupakan proses menduplikasi atau mengadaptasi strategi, pendekatan, atau metode yang terbukti berhasil di suatu lokasi untuk diterapkan pada lokasi lain dengan konteks yang sama dengan tujuan memperluas manfaat program, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi melalui adaptasi lokal. Praktik baik perlu didokumentasikan dengan baik, didukung data hasil evaluasi, serta memiliki fleksibilitas agar dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal di tempat baru. Identifikasi praktik baik merupakan salah satu hasil penting dari monitoring dan evaluasi. Replikasi memungkinkan program tidak hanya berdampak pada satu komunitas, tetapi menyebar secara luas dengan pendekatan yang efisien dan terukur.

➤ ***Sustainability Framework***

Kerangka keberlanjutan (*sustainability framework*) merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu program, kebijakan, atau intervensi pembangunan dapat terus memberikan manfaat secara berkelanjutan dalam jangka panjang, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kerangka ini mencakup perencanaan yang matang, penguatan kelembagaan, alokasi sumber daya yang memadai, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Prinsip utama dalam *sustainability framework* meliputi keberlanjutan finansial (pendanaan

berkelanjutan), keberlanjutan institusional (kapasitas organisasi dan kebijakan pendukung), keberlanjutan sosial (penerimaan dan partisipasi masyarakat), serta keberlanjutan lingkungan (pelestarian sumber daya alam). Selain itu, kerangka ini juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak, mengidentifikasi risiko kegagalan, serta melakukan adaptasi terhadap perubahan konteks. Menerapkan sustainability framework, program tidak hanya berhasil dalam jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan, berkembang, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan inklusif.

Ketika kerangka keberlanjutan diterapkan dalam sebuah program atau kebijakan tidak hanya berorientasi pada raihan target dalam waktu singkat tetapi juga dilengkapi kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi strategis seperti pergantian kepemimpinan, naik-turunnya anggaran, atau perubahan dinamika sosial di masyarakat. Kerangka dapat mendorong proses pelebagaan (*institutional embedding*), yakni menyatukan kegiatan program ke dalam sistem dan prosedur organisasi yang berlangsung secara rutin, sehingga tidak tergantung pada peran individu atau proyek tertentu. Strategi peralihan pengelolaan (*handover strategy*) serta penguatan kapasitas lokal menjadi faktor penting agar komunitas setempat dapat meneruskan inisiatif secara mandiri. Pada akhirnya, keberlanjutan bukanlah sekadar mempertahankan aktivitas, melainkan upaya menciptakan dampak berantai yang positif, terus berkembang, dan terakumulasi seiring waktu, serta mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat secara menyeluruh.

➤ Inovasi Kebijakan Lokal dan Dukungan Ekosistem Digital

Inovasi kebijakan lokal adalah upaya pemerintah daerah merancang kebijakan yang adaptif, kreatif, dan sesuai konteks sosial-ekonomi serta budaya setempat, termasuk menciptakan ekosistem digital bagi UMKM melalui kebijakan publik, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor (Suryana dkk., 2024). Inovasi ini muncul sebagai respons terhadap tantangan pembangunan yang dinamis dan kompleks, mencakup digitalisasi pelayanan publik, tata kelola berbasis data, pemberdayaan ekonomi dengan platform digital, serta kolaborasi dengan swasta dan masyarakat sipil. Keberhasilan inovasi bergantung pada partisipasi, desentralisasi keputusan, transparansi, dan akuntabilitas. Peran teknologi digital seperti *e-commerce*, *big data*, dan IoT sangat penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM (Godwin dkk., 2024), karena UMKM yang memanfaatkan teknologi digital tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga membangun hubungan pelanggan melalui kualitas layanan yang lebih baik. Integrasi inovasi kebijakan lokal dan ekosistem digital menciptakan solusi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, mendorong inklusi sosial-ekonomi, serta mempercepat pencapaian SDGs.

➤ Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang efektif dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence based policy*) menjadi keniscayaan, di mana proses perlu menggunakan kerangka sistematis seperti GRADE EtD (*Evidence to Decision*) yang mengimbangkan bukti ilmiah, nilai-nilai masyarakat, serta kelayakan implementasi (Jue, 2026), termasuk dalam kebijakan fiskal kesehatan seperti cukai minuman berpemanis untuk menanggulangi obesitas

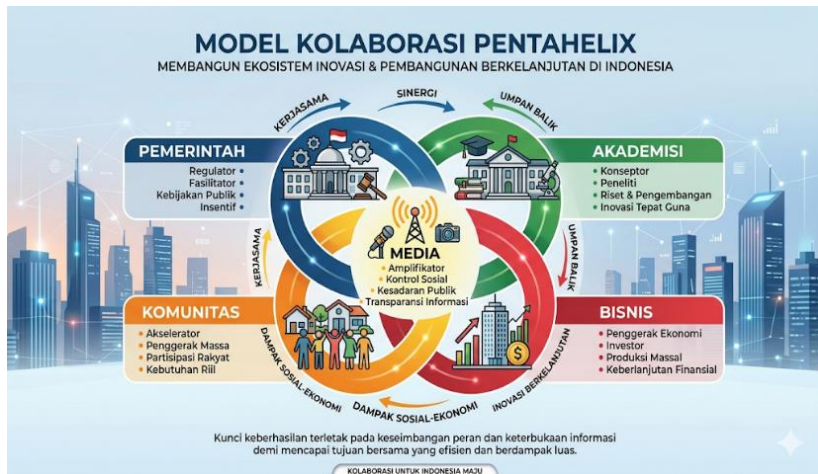
(Basto-Abreu dkk., 2024). Pengembalian kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan, pemerintah perlu melakukan reformasi prosedural dengan menerapkan siklus kebijakan yang benar meliputi penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi, dan prioritas sasaran pada program-program beranggaran besar serta mengkaji ulang kebijakan yang memberatkan masyarakat dan rentan korupsi, sembari membuka ruang dialog partisipatif agar masyarakat memiliki sarana efektif menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Selain itu, inovasi tata kelola dapat diadopsi dari praktik terbaik daerah seperti fleksibilitas fiskal melalui pembebasan PBB untuk kelompok rentan serta efisiensi anggaran untuk sektor produktif, dan replikasi mekanisme transfer anggaran berbasis ekologi sebagai role model regulasi hijau berkelanjutan. Semua rekomendasi ini harus didukung oleh sistem digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi publik (Solihat dkk., 2025) agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdampak namun juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan kebijakan dapat mencapai sasaran yang dituju maka pemerintah perlu menghadirkan sistem pemantauan dan evaluasi secara langsung (*real-time*) yang tersambung dengan data tiap wilayah. Sistem semacam ini berguna untuk menemukan sejak dini berbagai kendala di lapangan, sekaligus memberikan masukan kepada pembuat kebijakan agar dapat melakukan penyesuaian secara cepat dan terukur. Mekanisme umpan balik yang tanggap dalam menyikapi kebijakan yang didasari dengan bukti ilmiah sekalipun bisa saja tidak lagi relevan ketika kondisi sosial-ekonomi masyarakat mengalami perubahan. Sebaliknya, keberlangsungan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas institusi serta komitmen politik yang

berjangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi berupa peningkatan kompetensi para perencana dan evaluator kebijakan, serta adanya kepastian anggaran yang tidak hanya bersifat tahunan (multi-year budget). Rekomendasi kebijakan tidak hanya berakhir sebagai dokumen perencanaan, melainkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, terbuka, dan dapat dipertanggung-jawabkan guna mewujudkan perubahan yang nyata di tengah masyarakat.

➤ **Model Kolaborasi Pentahelix**

Model kolaborasi pentahelix merupakan perluasan dari konsep triple helix dan quadruple helix yang melibatkan lima aktor utama, yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas (Masyarakat), Pemerintah, dan Media. Upaya untuk mengoptimalkan kontribusi kelima pemangku kepentingan dalam mendorong perubahan sosial dan inovasi berkelanjutan. Kelima aktor memiliki fungsi yang saling mendukung: pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator kebijakan; akademisi sebagai penghasil pengetahuan dan konsep teoretis; sektor bisnis/swasta sebagai pendorong nilai ekonomi tambahan; komunitas sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan yang menyuarakan aspirasi dan partisipasi langsung; serta media berperan dalam menyebarkan informasi, sosialisasi, dan membentuk opini public untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 10.4.



Gambar 10. 4 Model Kolaborasi Pentahelix

Gambar 10.4 mengilustrasikan model kolaborasi penta-helix, yang melibatkan lima unsur utama: akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dalam model ini, masyarakat berperan ganda sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan yang menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi langsung, sementara media bertugas menyebarkan informasi, melakukan sosialisasi, serta membentuk opini publik guna mendukung sinergi lintas sektor tersebut.

Efektivitas model pentahelix di sejumlah bidang kebijakan, misalnya dalam upaya pencegahan stunting yang berhasil menekan prevalensi hingga 3,82% di Kabupaten Jombang, pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kuta, Bali yang meningkatkan jumlah UMKM lokal (Mandira dkk., 2024)(Arsyi Ananda Putri, 2023), pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, serta program ketahanan bencana di Kabupaten Malang. Kendati demikian, penerapan model ini menghadapi sejumlah tantangan seperti rumitnya koordinasi birokrasi,

ketimpangan kapasitas antarpemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan risiko dominasi pemerintah yang menyebabkan partisipasi pihak non-pemerintah hanya bersifat seremonial dan kurang substantif. Karena itu, keberhasilan kolaborasi pentahelix sangat bergantung pada komitmen bersama, kejelasan pembagian peran, penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut maka diperlukan pengembangan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil misalnya melalui pembentukan forum lintas aktor secara rutin, penyusunan kesepakatan bersama (*memorandum of collaboration*) yang mengikat secara sukarela, serta pemanfaatan platform digital untuk koordinasi dan berbagi data secara transparan. Pemerintah perlu bertindak sebagai enabler, bukan dominator, dengan memberikan ruang yang setara bagi komunitas, akademisi, bisnis, dan media dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Skema insentif yang mendorong partisipasi aktif sektor swasta dan media, misalnya dalam bentuk penghargaan, dukungan pendanaan kecil, atau pengakuan publik atas kontribusi mereka terhadap pembangunan.

Penguatan model pentahelix juga harus diiringi dengan pengembangan kapasitas lokal, terutama di tingkat desa dan kelurahan, agar kolaborasi tidak hanya berlangsung di level kebijakan makro tetapi juga menyentuh akar rumput. Pelatihan fasilitator komunitas, pendampingan hukum bagi masyarakat dalam menyuarkan aspirasi, serta penguatan media warga (*citizen journalism*) dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan

diperhitungkan. Sinergi yang setara dan berkelanjutan dalam model pentahelix tidak hanya menjadi kerangka kerja teoritis tetapi juga instrumen nyata untuk mendorong inovasi sosial, mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

➤ **Membangun Masyarakat Digital yang Adil dan Berdaya**

Ekspansi transformasi digital telah merambah ke berbagai sendi kehidupan, mencakup interaksi sosial, perilaku konsumsi, serta pengelolaan pemerintahan dan ekonomi. Agar kemajuan ini tidak melahirkan disparitas baru, teknologi digital harus diarahkan sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan memiliki daya saing, bukan justru memperlebar jurang pemisah. Setidaknya terdapat lima pilar utama yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerataan akses dan kesetaraan digital, mengingat wilayah pedesaan dan terpencil di Indonesia masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat digital, dan pasokan listrik, sehingga intervensi kebijakan perlu difokuskan pada perluasan jangkauan internet dan digitalisasi layanan publik. Kedua, penguatan literasi digital yang inklusif, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan etis mencakup keterampilan operasional dasar, navigasi internet, keamanan siber, hingga seleksi informasi yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap hoaks dan risiko digital lainnya. Ketiga, pemberdayaan ekonomi berbasis digital melalui optimalisasi potensi UMKM digital, ekonomi kreatif, serta platform kolaboratif, yang didukung pelatihan, pendampingan, dan kebijakan afirmatif agar

masyarakat berperan aktif dalam ekosistem ekonomi digital. Keempat, partisipasi masyarakat dalam tata kelola digital, yang meliputi keterlibatan dalam musyawarah publik, pengawasan pelaksanaan kebijakan digital, serta kontribusi terhadap inovasi dan produksi konten local sehingga demokrasi digital dapat diperkuat dan teknologi senantiasa dikembangkan untuk kepentingan bersama. Kelima, penciptaan ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berinteraksi dan berinovasi secara aktif (Coy dkk., 2021). Pemberdayaan masyarakat dalam ranah digital tidak semata-mata bertumpu pada pemanfaatan teknologi, melainkan juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga dalam proses perancangan dan penerapan teknologi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, melainkan turut serta menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Pelibatan berbagai kelompok dalam pengembangan teknologi akan menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan tepat guna (Fillan dkk., 2024). Dengan demikian, upaya membangun masyarakat digital yang adil dan berdaya tidak cukup hanya dengan memperluas akses terhadap teknologi, tetapi juga harus disertai penguatan kapasitas, peningkatan partisipasi, dan penegakan keadilan di setiap dimensi transformasi digital

➤ **Daftar Pustaka**

- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In Pemberdayaan Masyarakat.
- Alfiana, Suwandi, Natalia Reyne Lumentah, Samuel PD Anantadjaya, S. (2023). Dampak Corporate Social

Responsibility (Csr) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Darma Agung*, 31(6), 353–361.

Arsyi Ananda Putri, D. H. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang Arsyi. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(3), 69–81.

Basto-Abreu, Rossana Torres-Alvarez, Tonatiuh Barrientos-Gutierrez, Paula Pereda, A. C. D. (2024). Estimated reduction in obesity prevalence and costs of a 20 % and 30 % ad valorem excise tax to sugar-sweetened beverages in Brazil : A modeling study. *PLOS MEDICINE*, 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004399>

Coy, D., Malekpour, S., Saeri, A. K., & Dargaville, R. (2021). Rethinking community empowerment in the energy transformation: A critical review of the definitions, drivers and outcomes. *Energy Research and Social Science*, 72(December 2020), 101871. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101871>

Fillan, N. A. Z. S., Raden Zahira Nisrina Naziha, & Rifqi Jauhari. (2024). Partisipasi Karang Taruna Dalam Kegiatan Pemerintahan di Desa Jatimukti. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 55–62. <https://doi.org/10.15575/commen.v1i2.639>

Firnanda, N. P., Putri, L. D., Formal, P. N., Pendidikan, F. I., Padang, U. N., & Padang, K. (2025). Ekonomi Kreatif sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi. 3(1), 161–167.

- GDI Hub. (2022). Desain Inklusif dan Aksesibilitas Lingkungan Binaan di Solo, Indonesia. 1–124. www.AT2030.org
- Godwin, G., Raihana, S., Junaedi, P., & Hardini, M. (2024). Inovasi Bisnis Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Teknologi dan Adaptasi Digital. 5(2), 41–47.
- Jue, L. I. U. (2026). Principles for transforming health evidence to recommendations and decisions. 42(6), 641–644.
- Mandira, I. M. C., Ngurah, I. G., Hadi, W., Putu, N., Eka, N., Agung, A., Ngurah, A., Rahayu, S., Agung, A., Ngurah, A., Rusmini, T., & Nuraga, I. K. (2024). Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Harnessing Collaboration for Tourism in Kuta , Bali : Dual Analysing SWOT and Porters Diamond Model Harnessing Collaboration for Tourism in Kuta , Bali : Dual Analysing SWOT and. 16(1).
- Mannayong, J., S, M. R., & Faisal, M. (2024). Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation: Realizing More Active Public Engagement. Jurnal Administrasi Publik, XX(1), 51–72.
- Olivia, S. (2021). OECD Economic Surveys: Indonesia 2021. In Bulletin of Indonesian Economic Studies (Vol. 57, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1992831>

- Pratama, S., Ashari, M., Zulkarnain, S. A. B., & Sabrina, E. (2025). JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan The Importance of Digital Literacy in the World of Education : Learning Transformation in the Digital Era Pentingnya Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan : Transformasi Pembelajaran di Era Digital. 6(2), 554–561.
- Sirait, J., & Noer, K. U. (2021). Implementasi kebijakan keolahragaan dan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet The implementation of sports policies and the role of stakeholders in improving athlete achievement. JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi), 17(1), 1–10.
- Solihat, M., Solihin, O., & Abdullah, A. Z. (2025). Communication And Technology Innovation For Sustainable Development : Digital Synergy In Social Transformation. Aiccon, 341–352.
- Suryana, A., Pajriah, S., & Fajriyah, I. (2024). Blacksmith : Between history , culture , and economy. 2(1), 15–20.

BIODATA PENULIS



Novi Diana Badrut Tamami

Penulis lahir di Bondowoso pada tanggal 28 November 1981. Saat ini, beliau tinggal dan berdomisili di Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Sejak tahun 2006, beliau aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Penulis menyelesaikan pendidikan Magister (S-2) pada PS Manajemen Agribisnis di Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2023. Fokus riset dan kepakaran penulis berada pada bidang sosial ekonomi pertanian, khususnya yang berkaitan dengan isu gender dan pengembangan perempuan dalam konteks agribisnis dan masyarakat pesisir di Madura.



Priskilah Febi Widya Ningrum

lahir di Malang, 27 Februari 1999. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tungga-dewi Malang. Melanjutkan minatnya di bidang agribisnis penulis kemudian meraih gelar Magister Agribisnis (M.P) dari Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penulis adalah dosen di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Penulis mengampu beberapa mata kuliah antara lain Komunikasi Pertanian, Modal Sosial, Dinamika Kelompok, dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian.



Erlinda Yurisinthae

Dosen Program Magister Agribisnis. Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Penulis sejak tahun 1994 menjadi dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (UNTAN). Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Pertanian UNTAN. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan di Jurusan Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Selain menjadi pengajar di program S1, S2, dan program S3. Penulis pernah menjadi Ketua Laboratorium Ekonomi Pertanian, Ketua Pengelola S2 Agribisnis, dan Koordinator Akreditasi Program Studi pada Pusat Penjaminan Mutu (PPM) UNTAN.



Irfan Zikri

Merupakan dosen tetap di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala sejak 2006. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian, Institut Pertanian Bogor, dan meraih gelar magister serta doktoral di bidang Pembangunan Internasional dari Nagoya University, Jepang. Selama ini, ia mengampu mata kuliah terkait sosiologi perdesaan dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi sosial dalam agribisnis. Risetnya berfokus pada pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan agribisnis, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan lokal.



Helda Ibrahim

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 12 Mei 1969 Melanjutkan Kuliah D3 pada Jurusan Penyuluhan Pertanian Universitas Hasanuddin kemudian melanjutkan S1 di Jurusan Sosial Ekonomi Pada Universitas Hasanuddin kemudian Melanjutkan S2 pada program studi Agribisnis Universitas Hasanuddin. Tahun 2010 melanjutkan Pendidikan Doktoral pada Institut Pertanian Bogor Penulis adalah dosen Tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar.



Moh Muchlis Djibran

Penulis lahir di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 17 April 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Magister Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan selesai pada tahun 2015. Sejak tahun 2015, penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan mulai tahun 2023 dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Gorontalo.



Lu'lu'a Ulyn Ni'mah

Penulis lahir di Kudus pada 19 Juni 1997. Saat ini penulis merupakan dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Gelar Sarjana Agribisnis diperolehnya dari Universitas Wahid Hasyim pada tahun 2019 sedangkan gelar Magister Agribisnis diraih dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro pada tahun 2022. Penulis aktif dalam kegiatan penelitian dan penulisan di bidang agribisnis, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pertanian berkelanjutan, pemberdayaan petani, dan pengembangan agribisnis lokal.



Nur Saudah Al Arifa Dewi

Lahir di Wonosobo 4 Agustus 1989, Lulus S1 dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM tahun 2012 dan S2 di Magister Manajemen Agribisnis (MMA) UGM tahun 2015. Penulis merupakan ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Industri Halal Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Mengajar tingkat sarjana prodi Agribisnis untuk mata kuliah manajemen SDM, manajemen Agribisnis, manajemen strategi, kebijakan agribisnis dan agro-entrepreneur. Penulis merupakan Alumni Inspiring Lecturer Program (ILP), dan memiliki minat riset tentang manajemen SDM, manajemen strategi dan regenerasi petani muda.



Damara Dinda Nirmalasari Zebua

Saya lahir di Pekalongan pada 14 Agustus 1994 silam. Gelar Magister Agroekoteknologi (S2) saya peroleh dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana pada 2019 lalu. Sebagai bentuk kecintaan saya terhadap almamater, sejak saat itu hingga sekarang, saya bekerja sebagai dosen pada program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana. Tidak hanya mengajar, saya juga aktif meneliti dan menulis dalam bidang ilmu Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian serta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Yuwinti Nearti

Penulis kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Program Sarjana (S1) lulus tahun 2002. Program Magister (S2) di Pascasarjana Universitas Sriwijaya lulus tahun 2017. Saat ini aktif mengajar di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan. Selain aktif mengajar dan Narasumber pelatihan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pada petani tanaman hortikultura dan pangan yang diselenggarakan oleh Kemetrian Pertanian. Organisasi Masyarakat Agribisnis Indonesia sebagai pengurus divisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ikatan Alumni Pertanian UNSRI, dan Ikatan Program Studi Agribisnis (ISAPGRI) sebagai anggota